

**ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI  
MUHAMMAD BÂQIR AL-SHADR  
(Munculnya Persoalan Ekonomi dan Peran Negara  
Dalam Bidang Ekonomi)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah



**OLEH :**

**SYAMSUATIR**  
NIM 0706 S2 573

**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2012**

## ABSTRAK

Syamsuatir, *“Analisis Terhadap Pemikiran Ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr (Munculnya Persoalan Ekonomi dan peran Negara Dalam Bidang Ekonomi)”*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Bâqir al-Shadr dalam bidang ekonomi. Karena luasnya pembahasan yang mencakup semua pemikiran ekonomi Bâqir al-Shadr tentang ekonomi, maka penelitian ini dibatasi dan fokus dalam membahas tiga poin dari pemikiran ekonomi Bâqir al-Shadr, yaitu konsep *Iqtishâd*, munculnya persoalan ekonomi dan tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Iqtishâduna* yang merupakan karya terbesar Bâqir al-Shadr dalam bidang ekonomi, sementara sumber sekunder adalah kitab-kitab dan artikel-artikel yang memiliki relevansi pembahasan dengan tema yang dibahas.

Muhammad Bâqir al-Shadr adalah pemikir muslim yang produktif dalam menghasilkan karya di berbagai bidang disiplin ilmu. Walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang ekonomi, akan tetapi Bâqir al-Shadr piawai dalam menjelaskan pemikiran dan teori-teori ekonomi konvensional. Penguasaannya terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis marxisme terlihat di bagian awal kitab *Iqtishâduna*. Kapasitasnya sebagai seorang ahli hukum Islam yang menempati posisi *Marja`* dalam hirarki ahli hukum Syi'ah membuat teori ekonomi yang ia hasilkan sangat kental bernuansa tauhid, dengan demikian, agama merupakan landasan dari pemikiran-pemikiran yang dihasilkannya dan al-Qur'an dan Hadis merupakan dasar berpijak dari doktrin yang ia kemukakan.

Pemikiran Bâqir al-Shadr di bidang ekonomi dimulai dengan pembahasan tentang hakikat ekonomi Islam. Baginya Ekonomi Islam bukanlah ilmu yang dihasilkan dari fenomena-peristiwa yang terjadi, melainkan doktrin agama yang tidak boleh berubah sepanjang masa, namun doktrin ini hanya berupa prinsip dasar yang menyisakan begitu luas ruang kosong untuk diisi dengan kebijakan-kebijakan yang fleksibel, yang memungkinkan adanya perubahan seiring perubahan zaman dan tempat serta kondisi, akan tetapi tidak boleh keluar dari prinsip dasar yang telah ditetapkan syari'at. Di antara prinsip dasar itu antara lain adalah keadilan sosial (QS. 2 : 279, 16 : 90, 4 : 58, 6 : 152, 7 : 28-29, 57 : 25), kepemilikan multi jenis yang terdiri dari kepemilikan pribadi, umum dan negara (QS. 4 : 32) dan kebebasan bertindak dalam aktifitas ekonomi yang dibatasi oleh aturan-aturan syari'at. Doktrin lain yang bisa digali dari sumber al-Qur'an dan hadis adalah bahwa persoalan ekonomi bukanlah disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia, teori ini tidak sejalan dengan Islam karena Allah swt menyatakan bahwa alam ini diciptakan dengan sangat

teratur dan terukur untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (QS. 2 : 29, 54 : 49), Allah swt Maha Adil dan Dia tidak akan menzalimi hamba-Nya dengan menciptakan hamba-Nya tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya (QS. 10 : 44). Persoalan ekonomi sesungguhnya disebabkan oleh kezaliman manusia dalam melakukan aktifitas ekonomi dalam bentuk eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain, dan ingkar nikmat dalam bentuk eksploitasi alam tanpa mengindahkan dan mempertimbangkan kelestariannya (QS. 14 : 32-34). Untuk menghentikan dan kezaliman tersebut, maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam ranah ekonomi. Peran dan fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi juga didasarkan kepada doktrin yang mengatakan bahwa dalam teori kepemilikan, negara mempunyai porsi kepemilikan terbesar dari sumber daya alam yang harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Atas dua dasar tersebut, maka setidaknya bagi al-Shadr, ada tiga peran dan fungsi negara dalam bidang ekonomi, yaitu menjamin kesejahteraan rakyat (HR. Ja`far al-Shadiq dan Musa bin Ja`far), mewujudkan keseimbangan sosial (QS. 59 : 7) dan intervensi negara dalam menetapkan aturan-aturan untuk menjamin kemaslahatan.

Pemikiran-pemikiran Bâqir al-Shadr yang sepintas keluar dari fatron mainstream, kalau diteliti lebih mendalam ternyata memiliki relevansi dengan kenyataan kehidupan ekonomi pada saat ini, tanpa disadari ada beberapa doktrin ekonomi yang diterapkan di beberapa negara ternyata memiliki kesesuaian dengan pemikiran ekonomi Bâqir al-Shadr. Sebagai contoh, peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keseimbangan sosial bisa kita temukan dalam konstitusi beberapa negara seperti konstitusi RI Undang-undang Dasar 1945. Begitu juga intervensi negara dalam bidang ekonomi yang justru sudah mulai ditemukan di negara-negara kapitalis. Konsep kepemilikan multi jenis yang dikemukakan al-Shadr, dan juga oleh ekonom muslim lain, tampak lebih realistis dan logis untuk diterapkan dibandingkan konsep kepemilikan pribadi yang diusung kapitalisme atau kepemilikan kolektif yang diusung kaum sosialis.

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KA. PRODI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
 BAB I    PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	14
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
E. Tinjauan Pustaka .....	16
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	21
 BAB II    BIOGRAFI MUHAMMAD BÂQIR AL-SHADR .....	 23
A. Kelahiran dan Asal Usul .....	23
B. Paham Keagamaan .....	24
C. Pendidikan .....	26
D. Karier Akademik .....	31
E. Aktifitas Sosial Politik .....	31
F. Kematian .....	34
G. Karya Tulis .....	35
H. Pengaruh Bâqir al-Shadr .....	42

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ILMU EKONOMI .....	45
A. Pengertian dan Prinsip Ilmu Ekonomi .....	45
B. Munculnya Persoalan Ekonomi .....	51
C. Tanggung Jawab Negara Dalam Bidang Ekonomi .....	53
D. Konstitusi Ekonomi di Berbagai Negara .....	60
BAB IV PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BÂQIR AL-SHADR .....	70
A. Iqtishâd dan Ekonomi Dalam Pandangan Bâqir al-Shadr .....	70
B. Munculnya Persoalan Ekonomi .....	89
C. Tanggung Jawab Negara Dalam Bidang Ekonomi .....	99
D. Pemikiran Ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr di Antara Pemikiran Ekonomi Lain .....	112
E. Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr Dengan Konteks Kekinian .....	125
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	137
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran .....	140
DAFTAR PUSTAKA .....	142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	148

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dua dekade terakhir, dua ideologi ekonomi, sosialisme dan kapitalisme,<sup>1</sup> berlomba menancapkan pengaruhnya di berbagai negara dunia. Dua ideologi ini bersaing untuk membuktikan diri sebagai ideologi yang paling benar dan paling ampuh dalam mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia, masing-masing pengusung kedua ideologi ini berlomba mengemukakan argumen bahwa ideologi merekalah yang paling tangguh dan akan bertahan dalam waktu yang sangat lama. Hukum dialektika Marx mengatakan bahwa sistem kapitalisme akan mengalami kehancuran dan dengan sendirinya sistem komunisme akan menjadi sistem ekonomi satu-satunya di dunia. Sementara Francis Fukuyama dalam karyanya *The End of History and the Last Man* mendeklarasikan kemenangan Kapitalisme Liberal sebagai representasi akhir zaman.<sup>2</sup> Silih berganti kedua ideologi ini mengalami pasang surut dalam sejarah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, indikasi kegagalan dua ideologi ini semakin jelas, keduanya dinilai gagal dalam menghadirkan solusi untuk memecahkan problem-problem utama ekonomi umat manusia.

---

<sup>1</sup> Di samping dua ideologi di atas, juga berkembang ideologi campuran yang mencoba menggabungkan dua ideologi tersebut. Ideologi campuran ini dianggap ideologi yang paling banyak diterapkan di negara-negara dunia pada saat ini.

<sup>2</sup> Sebagai mana dikutip dari *Magazine National Interest*, 1989. Lihat Agustianto, *Dekonstruksi Kapitalisme*, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). 30 Januari 2010.

Runtuhnya Tembok Berlin (Jerman Timur) pada tahun 1989 dan tumbanganya raksasa Uni Soviet, yang merupakan jantung komunisme di Eropa Timur pada decade 1990-an, adalah bukti nyata kegagalan sosialisme sekaligus mematahkan hukum dialektika Marx. Untuk sementara waktu,<sup>3</sup> runtuhnya komunisme seolah menandai kemenangan ideologi liberal sebagai satu-satunya ideologi ekonomi dan semakin membuktikan tidak ada yang menandingi tumbuhnya pemikiran neo liberal “*Washington Consensus*”<sup>4</sup> semenjak awal 90an. akan tetapi krisis ekonomi masa kini masih tetap terasa mendalam dan mengkhawatirkan serta telah menimbulkan penderitaan-penderitaan yang memilukan bagi umat manusia.<sup>5</sup> Roy Davies dan Glyn Davies, dalam buku *The History of Money From Ancient Time to Present Day* (1996), sebagai mana dikutip oleh majalah al-Wa’ie, menguraikan bahwa sepanjang abad 20 telah terjadi lebih dari 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap lima tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan umat manusia. Yang paling aktual tentunya adalah krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika di penghujung tahun 2011 dan masih berlanjut

---

<sup>3</sup> Robert L Heilbrunner, seorang sosialis penganut Marxisme, dalam salah satu artikelnya di akhir tahun 1980an di *New Yorker* yang berjudul “*Triumph of Capitalism*” mengatakan bahwa debat lama antara Kapitalisme dan Sosialisme telah berakhir dan Kapitalisme telah menang. Lihat Mark Skousen, *The Making of Modern Economics : The Lives and Ideas of Great Thinkers*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern : Sejarah Pemikiran Sosial*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-3, h. 522.

<sup>4</sup> Washington Consensus merupakan “kesepakatan” yang dicapai IMF, Bank Dunia dan Departemen Keuangan Amerika Serikat, disebut *Washington Consensus* karena ketiga lembaga ini berkedudukan di Washington. Di antara rekomendasi dari Washington Consensus adalah liberalisasi perdagangan, privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah, dan deregulasi undang-undang yang menghalangi persaingan.

<sup>5</sup> Majalah *Al-Wa’ie*, no. 100 tahun IX, h. 9.

sampai sekarang. Hal ini membuktikan bahwa apa yang diyakini oleh Fukuyama sangat jauh dari kebenaran.

Dengan kegagalan dua ideologi ini dalam membangun kesejahteraan umat manusia di muka bumi serta memecahkan problem-problem ekonomi, maka semakin banyak cendekiawan dunia yang mulai pesimis dengan eksistensi ilmu ekonomi. Agustianto mencatat setidaknya ada beberapa pakar ekonomi dunia yang secara khusus menulis buku tentang *The Death of Economics* tersebut, antara lain Paul Omerod, Umar Ibrahim Vadillo, Critovan Buarque, di samping ekonom barat lainnya seperti Robert Heibronner, Lester Thurow, Kevin Philip dan lain-lain.<sup>6</sup> Sebenarnya, sejak awal tahun 1940-an, para ahli ekonomi Barat, telah menyadari indikasi kegagalan tersebut. Adalah Joseph A Schumpeter<sup>7</sup> dengan bukunya *Capitalism, Socialism and Democracy*<sup>8</sup> menyebutkan bahwa teori ekonomi modern telah memasuki masa-masa krisis. Dalam pidatonya bertajuk “*March Into Socialism*” dia mengatakan bahwa tatanan Kapitalisme cenderung untuk menghancurkan dirinya sendiri.<sup>9</sup> Pandangan yang sama dikemukakan juga oleh ekonom generasi 1950-an dan 60-an, seperti Daniel Bell dan Irving Kristol dalam buku *The Crisis in Economic Theory*. Demikian pula Gunnar Myrdal dalam buku *Institutional Economics, Journal of Economic Issues*, juga Hla Mynt, dalam

---

<sup>6</sup> Agustianto, *The Death Of Economics Dan Chance Ekonomi Syariah*, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), 03 Nopember 2009.

<sup>7</sup> Joseph A Schumpeter (1883-1950) lahir di Moravia, Kekaisaran Astro-Hungaria. Dia mempelajari mempelajari Ilmu Ekonomi dari Friedrich Von Weiser dan Eugen Bohm-Bawerk. Schumpeter terkenal sebagai orang yang Anti Keynes, ekonom besar lain yang sezaman dengannya. Lihat Mark Skousen, *The Making of Modern Economics...* h, 519-520.

<sup>8</sup> *Capitalism, Socialism and Democracy* adalah buku Best Seller yang telah diterjemahkan ke dalam 16 bahasa dunia.

<sup>9</sup> Mark Skousen, *The Making of Modern Economics...* h, 521.



buku *Economic Theory and the Underdeveloped Countries* serta Mahbubul Haq dalam buku *The Poverty Curtain : Choices for the Third World*.<sup>10</sup>

Di balik rasa pesimisme tersebut, muncul gagasan untuk mencari jalan ketiga dalam mengatasi problem ekonomi di dunia. Kehadiran konsep ekonomi baru tersebut bukanlah gagasan awam, tetapi mendapat dukungan dari ekonom terkemuka di dunia. Anthony Giddens, sebagaimana dikutip oleh Agustianto, dalam bukunya *The Third Way* menyatakan dunia seyogyanya mencari jalan ketiga dari pergumulan sistem kakap dunia yakni kapitalisme dan sosialisme.<sup>11</sup> Dan tidak berlebihan rasanya jika jalan ketiga yang ditunggu-tunggu tersebut adalah Ekonomi Islam.<sup>12</sup> Peraih hadiah Nobel 2001, Joseph E. Stiglitz<sup>13</sup> dan Bruce Greenwald, dalam buku *Toward a New Paradigm in Monetary Economics*, sebagaimana dikutip oleh Khairunnisa Musari, menawarkan paradigma baru dalam ekonomi moneter. Dalam buku tersebut mereka mengkritik teori ekonomi kapitalis (konvensional) dengan mengemukakan pendekatan moneter baru yang entah disadari atau tidak

---

<sup>10</sup> Agustianto, *The Death Of Economics...*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Pemikiran ekonomi sebagai ilmu yang inheren dengan ilmu fiqh bukanlah hal yang baru. Menurut Nejatullah Siddiqi, secara kronologis sejarah pemikiran ekonomi Islam bisa dikelompokkan kepada tiga periode, yaitu *Periode Pertama* yang ditandai dengan munculnya pemikir ekonomi Islam sampai tahun 450 H seperti Abu Yusuf, Al-Syaibani, Abu Ubaid, Yahya ibn Umar, al-Mawardi dan Ibn Hazm, 400 tahun berikutnya adalah *Periode Kedua* dan intelektual yang lahir pada periode ini antara lain Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun dan lainnya, 500 tahun berikutnya adalah *Periode Ketiga* dengan cendekiawan semisal Syah Waliyullah, Muhammad ibn Abdul Wahab, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal dan lain sebagainya. Masa berikutnya adalah masa di mana lahir banyak tokoh pemikir kontemporer yang pada akhirnya membentuk mazhab pemikiran dalam Ekonomi Islam. Lihat Nejatullah Siddiqi, *The History of Islamic Economic Thought*, Dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Reza Awan, *Lecture on Islamic Economics*, (Jeddah : IRTI IDB, 1992), h. 71.

<sup>13</sup> Joseph E Stiglitz dilahirkan pada tanggal 09 Februari 1943, guru besar ekonomi di Columbia University dan Stanford University.

merupakan sudut pandang ekonomi Islam di bidang moneter, seperti peranan uang, bunga, dan kredit perbankan.<sup>14</sup>

Ekonomi Islam merupakan ideologi yang berbeda dengan ideologi ekonomi konvensional, karena masing-masing didasarkan atas pandangan-dunia (*weltanschauung/Worldview*) yang berbeda. Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler, dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhirat dalam bangunan pemikirannya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi konvensional menjadi bebas nilai (*positivistic*). Sementara itu, ekonomi Islam justru dibangun atas prinsip-prinsip Islam, di samping mewujudkan kesejahteraan di dunia, ekonomi Islam juga akan bermuara kepada *Falah* (kebahagiaan dan kejayaan) di akhirat.

Dalam tataran paradigma mendasar seperti ini, ekonom-ekonom muslim tidak menghadapi masalah perbedaan pendapat yang berarti. Namun dalam menjelaskan apa dan bagaimanakah konsep ekonomi Islam, mulai muncul perbedaan pendapat dan memunculkan mazhab-mazhab dalam Ekonomi Islam itu sendiri. Sampai saat ini, menurut Adiwarman Karim, pemikiran ekonom-ekonom muslim kontemporer dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi tiga mazhab, yaitu Mazhab Iqtishâduna ( Bâqir al-Shadr), Mazhab Mainstream dan Mazhab Alternatif-Kritis<sup>15</sup>

---

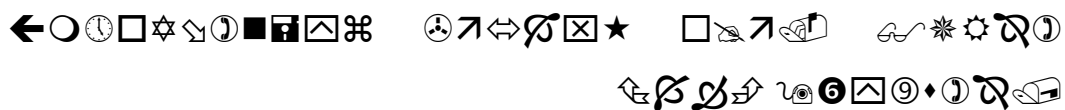
<sup>14</sup> Khairunnisa Musari, *Stiglitz, Indonesia dan Ekonomi Syari'ah*, [www.pkesinteraktif.com](http://www.pkesinteraktif.com), 4 October 2010.

<sup>15</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 30.

### *Mazhab Bâqir Shadr*

Mazhab ini dipelopori oleh Muhammad Bâqir al-Shadr dengan bukunya yang fenomenal : *Iqtishâdunâ*. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang kontradiktif.<sup>16</sup> Yang satu anti Islam, sedangkan yang lainnya adalah Islam.<sup>17</sup>

Menurut mereka, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam memandang masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Mazhab Bâqir al-Shadr menolak pernyataan ini, karena menurut mereka, Islam tidak mengenal adanya sumber daya terbatas. Dalil yang dipakai antara lain adalah Surat al-Qamar ayat 49:



<sup>16</sup> Islam adalah ideologi yang berasal dari agama. Sementara pandangan dunia kapitalis sangat dipengaruhi oleh gerakan *Enlightenment* (Pencerahan) yang merentang sejak abad ke-17 sampai abad ke-19. *Enlightenment* atau *the Age of Reason* adalah sebuah bentuk ekstrim dari suatu penolakan terhadap banyak keyakinan Kristen. Pandangan dunia Sosialis didasarkan pada Materialisme Dialektika (*Dialectical Materialism*) yang mengatakan bahwa materi, alam dan dunia nyata muncul “tanpa direncanakan” sebagai kenyataan, tidak berasal usul dari sumber Supranatural maupun transendental apapun. Lihat Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung : Alfabeta, 2010), cet. Ke-1, h. 4. Muhammad Umar Chapra, *Negara Sejahtera Menurut Islam*, dalam John J Donohue dan John L Esposito, *Islam in Transition : Muslim Perspectives*, terj. Machnun Husein, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-malasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), cet. Ke-5, h. 420.

<sup>17</sup> Bâqir Al-Hasani memberikan sepuluh argument untuk memperkuat pendapat ini. Lihat Bâqir al-Hasani, *The Concept of Iqtishâd*, dalam Bâqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, *Essays on Iqtishâd : The Islamic Approach to Economic Problem*, (Silver Spring : Nur, 1989), h. 21-23.

“*Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran*”.<sup>18</sup>

Karena segala sesuatunya sudah terukur dengan sempurna, maka sesungguhnya Allah swt telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia.<sup>19</sup>

Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Contoh : manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas.

Mazhab Bâqir al-Shadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.<sup>20</sup>

Pemikiran tentang keserakahan tidak terbatas dan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah di atas mengharuskan adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur perekonomian masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan apa yang

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1998), h. 883.

<sup>19</sup> Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm*, (tt, Maktabah Awlad Syaikh Li al-Turats, t.th), Jilid 14, h. 303.

<sup>20</sup> Bâqir al-Hasani, *Op.Cit.*, h. 21-22.

diyakini oleh kaum liberalis dalam sistem perekonomian mereka yang sudah lama yakin dengan sistem *Laizes Faire*.

Tokoh-tokoh mazhab ini, selain Muhammad Bâqir al-Shadr, adalah Abbas Mirakhor,<sup>21</sup> Bâqir al-Hasani, Kadim al-Shadr, Iraj Toutounchian, Hedayati dan lain-lain.

### ***Mazhab Mainstream***

Mazhab Mainstream berbeda pendapat dengan mazhab di atas, mazhab ini justru setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan kepada keinginan manusia yang tidak terbatas.<sup>22</sup> Dalil yang dikemukakan antara lain adalah Surat al-Baqarah ayat 155, Surat al-Takatsur ayat 1-5 dan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berarti :

*“Jika seandainya manusia memiliki dua lembah yang dipenuhi dengan harta, maka niscaya mereka akan mencari lembah yang ketiga, mulut manusia tidak akan penuh (tidak akan puas) kecuali oleh tanah, dan bertobatlah kepada Allah bagi orang yang mau bertobat.”*<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Abbas Mirakhor pernah menjadi ekonom Research Department IMF dan merupakan mantan guru besar ekonomi di Florida Institute of Technology. Gelar PhD ia peroleh dari Kansas State University, dan telah menghasilkan beberapa karya tulis, antara lain *Islamic Finance : Progress and Challenges, Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance, An Introduction to Islamic Finance*, dll. Beliau juga pernah menerima Islamic Development Bank's (IDB) 2003 prize di bidang ekonomi Islam.

<sup>22</sup> MA Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, (terj.), Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 20.

<sup>23</sup> Ibnu Hajar al-`Asqalâni, *Fath al-Bâri Juz 11*, (Beirut : Dar al-Ma`rifah, th), h. 253. al-Nawâwi, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim Juz 7*, (Kairo : al-Mathbaqah al-Mishriyah al-Azhar, 1929), h. 138.

Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional.<sup>24</sup> Kelangkaan sumber dayalah (*Scarcity*) yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Namun demikian, mazhab ini berbeda dengan ekonomi konvensional dalam menyelesaikan Dilema *Scarcity* versus *Unlimited Wants* ini. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas untuk menyelesaikan dilema ditentukan berdasarkan keinginan pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama, boleh juga mengabaikannya dan mempertuhankan hawa nafsunya. Tetapi di dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja. Perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya –termasuk ekonomi– selalu dipandu oleh Allah swt lewat al-Qur'an dan Sunnah.<sup>25</sup>

Tokoh-tokoh mazhab ini di antaranya adalah Muhammad Umar Chapra,<sup>26</sup> Muhammad Abdul Mannan,<sup>27</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi,<sup>28</sup> dan

---

<sup>24</sup> Dalam ekonomi konvensional, permasalahan ekonomi dipercaya muncul karena persoalan *Scarcity* (kelangkaan), yaitu terbatasnya barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Lihat Abdurrahman al-Maliki, *al-Siyâsah al-Iqtishâdiyyah al-Mutsala*, (terj.), (Jakarta : Al-Izzah, 2001), h. 11.

<sup>25</sup> M A Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice...*, h. 20.

<sup>26</sup> Muhammad Umar Chapra lahir di Bombay, India (11 Februari 1933), memperoleh gelar MBA dari Universitas Karachi dan Ph.D. dari Universitas Minnesota, bekerja sebagai *Research Advisor* di *Islamic Research & Training Institute* (IRTI), *Islamic Development Bank* (IDB). Sebelumnya dia adalah *Senior Economic Advisor* di *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA). Pada tahun 1989 dia menerima dua penghargaan bergengsi, yaitu *Islamic Development Bank Award* di bidang Ekonomi Islam, dan *King Faisal International Award* di bidang *Islamic Studies*. Di antara karyanya adalah *Islam and Economic Development : a Strategy For Development With Justice And Stability* (1993) *Islam and the Economic Challenge* (1992), *Towards a Just Monetary Sistem : a Discussion of Money, Banking and Monetary Policy in the Light of Islamic Teachings* (1985), *Monetary And Fiscal Economics Of Islam: An Outline Some Major Subjects For Research* (1978), *Money and Banking in an Islamic Economy, in Monetary and Fiscal Economics of Islam* (1978), *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy, in Islamic Perspective. Studies in Honour of Abu A'la Mawdudi* (1979), *The Future of Economis: an Islamic Perspective*. (2000) dan masih banyak buku lainnya. Lihat Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2005), h. 297.

lain-lain. Mayoritas tokoh ini bekerja di Islamic Development Bank (IDB) yang memiliki dukungan dana dan akses ke berbagai Negara sehingga penyebaran pemikirannya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Mereka adalah para doktor di bidang ekonomi yang belajar (dan ada juga yang mengajar) di universitas-universitas barat. Oleh karena itu, mazhab ini tidak pernah membuang sekaligus teori-teori ekonomi konvensional ke keranjang sampah

Umar Chapra misalnya berpendapat bahwa usaha mengembangkan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga yang telah dicapai oleh ekonomi konvensional selama lebih dari seratus tahun terakhir.<sup>29</sup>

Mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-Islam sama sekali tidak diharamkan. Hikmah atau ilmu itu bagi umat Islam adalah ibarat barang yang hilang. Di mana saja

---

<sup>27</sup> Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh (1938), mendapatkan gelar master Ekonomi dari Universitas Rasjshahi dan Michigan State University, gelar doktor ia peroleh dari universitas yang sama dalam bidang industri dan keuangan. Berkat karyanya "*Islamic Economics, Theory and Practice*" (1970), Ia mendapat penghargaan dari pakistan sebagai *Highest Academic Award Of Pakistan* pada tahun 1974 yang baginya setara dengan hadiah pulitzer. Bukunya yang lain adalah *The Making Of Islamic Economic Society* dan *The Frontier Of Islamic Economics* (1984). Lihat Mohamed Aslam Haneef, *Contemporar Muslim Economic Thought : a Comparative Analysis*, terj. Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 15.

<sup>28</sup> Mohammad Nejatullah Siddiqi lahir di Gorakhpur India (1931), pemenang *King Faisal International Price* untuk bidang *Islamic Studies* dan penerima *Shah Waliyullah Award* (2003). Beliau juga guru besar ekonomi dan studi Islam di Aligarh University dan guru besar ekonomi di King Abdulaziz University Jeddah. Di antara hasil karyanya adalah : *Recent Theories of Profit: A Critical Examination* (1971); *Economic Enterprise in Islam* (1972); *Muslim Economic Thinking* (1981); *Banking Without Interest* (1983); *Insurance in an Islamic Economy* (1985); *Teaching Economics in Islamic Perspective* (1996); *Role of State in Islamic Economy* (1996) and *Dialogue in Islamic Economics* (2002). Lihat Mohamed Aslam Haneef, *Contemporar Muslim Economic Thought...*, h. 37.

<sup>29</sup> M Umar Chapra, *The Future of Economics, An Islamic Perspective*, (Leicester : The Islamic Foundation, 2000), h. 49.

ditemukan, maka umat muslimlah yang paling berhak mengambilnya.<sup>30</sup> Catatan sejarah umat muslim memperkuat hal ini. Para ulama dan ilmuwan muslim banyak meminjam ilmu dari peradaban lain seperti Yunani, India, Persia, Cina dan lain sebagainya. Yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat dibuang, sehingga terjadi transformasi ilmu pengetahuan dengan diterangi oleh cahaya dan petunjuk Islam.

### ***Mazhab Alternatif-Kritis***

Pelopop mazhab ini adalah Timur Kuran,<sup>31</sup> Jomo Kwame Sundaram,<sup>32</sup> Muhammad Arif dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik dua mazhab sebelumnya, mazhab Bâqir Shadr dikritik karena dianggap sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara itu, mazhab Mainstream dikritik karena dianggap sebagai jiplakan dari ekonomi neo-klasik dengan menghilangkan variable riba dan memasukkan variable zakat serta niat.

Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan

---

<sup>30</sup> Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dan Imam Ibnu Majah. Lihat Abi Isa Muhammad bin Isa at-Turmudzi, *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Turmudzi Juz V*, (Kairo : Mustafa Albabi Al-Halabi, 1975), cet. Ke-2, h. 51 dan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mâjah Juz IV*, (Beirut : Dar el-Marefah, 1996), cet. Ke-1, h. 454.

<sup>31</sup> Timur Kuran adalah Profesor Ekonomi dan Ilmu Politik di Program Islamic Studies Duke University, pernah menjabat Ketua Jurusan di University of Southern California. Gelar Ph.D di bidang ekonomi didapatnya dari Stanford University pada tahun 1982. Beliau adalah editor serial "*Economics, Cognition, and Society*", penulis "*Islam and Mammon*" (2004) dan artikel "*Why the Middle East Is Economically Underdeveloped: Historical Mechanisms of Institutional Stagnation.*" *Dalam the Journal of Economic Perspectives* (2004).

<sup>32</sup> Jomo Kwame Sundaram dilahirkan di Penang Malaysia pada tanggal 11 Desember 1952.



kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ia adalah tafsiran manusia terhadap al-Qur'an dan Hadis, sehingga nilai kebenarannya tidak bersifat mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.<sup>33</sup>

Dari tiga mazhab ekonomi Islam di atas, maka mazhab Bâqir al-Shadr menurut hemat penulis bisa dianggap membawa gagasan baru dalam pemikiran ekonomi yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, pemikiran-pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Muhammad Bâqir al-Shadr berusaha mendobrak pemikiran ekonomi konvensional yang sudah lama mapan. setidaknya ada tiga hal yang perlu dicermati dari gagasan dan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Bâqir Shadr dan pengikutnya, yaitu :

1. Konsep *Iqtishâd*
2. Munculnya persoalan ekonomi
3. Peran pemerintah dalam bidang ekonomi

Pemikiran Bâqir al-Shadr beranjak dari pemikiran bahwa ekonomi bukanlah sebuah ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin berupa tuntunan yang diberikan Islam. Oleh karena itu kehadiran Islam, khususnya ajarannya tentang ekonomi, bukan hendak menemukan fenomena tentang ekonomi di tengah masyarakat, akan tetapi ingin menerapkan ajaran Islam di

---

<sup>33</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, h. 30.

bidang ekonomi. Salah satu doktrin Islam tentang ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh Bâqir al-Shadr, adalah sumber daya yang disediakan oleh Allah dengan penuh keseimbangan (QS. Al-Qamar : 49 ). Persoalan ekonomi bukan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, akan tetapi karena ketidakadilan distribusi kekayaan, oleh karena itu diperlukan campur tangan pemerintah dalam perjalanan roda perekonomian masyarakat.

Pemikiran Bâqir al-Shadr dalam tiga permasalahan di atas menjadi sangat menarik untuk digali lebih dalam, bukan hanya karena Bâqir al-Shadr membawa “pemikiran baru” yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran ekonomi yang sudah mapan, akan tetapi juga mengingat latar belakang keilmuan Bâqir al-Shadr yang dibesarkan dalam iklim keilmuan Islam yang sangat kental, khususnya lingkungan tradisional syi’ah, serta penguasaannya terhadap ilmu-ilmu umum yang berkembang di dunia barat, terutama ilmu ekonomi. Penguasaannya terhadap teori-teori ekonomi yang dikemukakan oleh Karl Marx dan para ekonom yang mengemukakan teori-teori liberal seakan menghapus kecurigaan bahwa pemikiran yang dia lahirkan tidak didasarkan atas fanatisme semata.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih mendalam dan sistematis dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BÂQIR AL-SHADR (Munculnya Persoalan Ekonomi dan Peran Negara Dalam Bidang Ekonomi)”**.

## B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah penelitian yang berkaitan dengan judul di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pandangan Bâqir Shadr tentang Kapitalisme dan Marxisme
2. Konsep *Iqtishâd* menurut Bâqir al-Shadr
3. Munculnya persoalan ekonomi
4. Distribusi Pra Produksi
5. Distribusi Pasca Produksi
6. Peran dan tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi
7. Praktek bank tanpa riba dalam Islam
8. Bagaimana perbandingan pemikiran ekonomi Bâqir al-Shadr dengan pemikiran ekonom lain
9. Bagaimana relevansi pemikiran ekonomi Bâqir al-Shadr dengan konteks kekinian

Masalah-masalah penelitian yang diidentifikasi di atas cukup banyak, dan tidak semua masalah-masalah di atas dapat diteliti sekaligus dalam satu penelitian, oleh karena itu permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini perlu dibatasi dan dirumuskan.

## C. Batasan dan Rumusan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah sebagaimana yang tergambar dalam identifikasi masalah di atas, maka dalam tulisan ini masalah yang diteliti dibatasi dalam hal pemikiran Bâqir Shadr tentang konsep *Iqtishâd*, munculnya persoalan ekonomi dan tanggung jawab negara dalam bidang

ekonomi. Dari pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dicari jawaban adalah :

1. Bagaimana pandangan Muhammad Bâqir al-Shadr tentang *Iqtishâd*, munculnya persoalan ekonomi dan peran Negara dalam bidang ekonomi
2. Bagaimana perbandingan pemikiran Ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr tentang *Iqtishâd* dan munculnya persoalan ekonomi dengan pemikiran ekonom muslim lain
3. Bagaimana relevansi pemikiran ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr tentang *Iqtishâd*, munculnya persoalan ekonomi dan peran negara di bidang ekonomidalam konteks kekinian.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Muhammad Bâqir al-Shadr tentang *Iqtishâd*, munculnya persoalan ekonomi dan peran Negara dalam bidang ekonomi,
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pemikiran Ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr tentang *Iqtishâd* dan munculnya persoalan ekonomi dengan pemikiran ekonom muslim lain,
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr tentang *Iqtishâd*, munculnya persoalan ekonomi dan peran negara di bidang ekonomidalam konteks kekinian.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai khazanah keilmuan dan tambahan literatur di bidang Ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Bâqir al-Shadr sebagai tokoh muslim kontemporer,
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya,
3. Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Magister di bidang Ekonomi Islam pada Program Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri merupakan disiplin ilmu yang relatif masih baru. Permasalahan-permasalahan ekonomi yang diangkat oleh ulama terdahulu biasanya hanyalah permasalahan fiqih muamalah yang memang dibutuhkan oleh zamannya, seperti kitab *al-Kharj* yang merupakan jawaban Abu Yusuf terhadap pertanyaan yang dikemukakan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Belakangan muncul para ekonom muslim yang menggagas dan membahas ilmu ekonomi Islam secara sistematis. Beberapa ilmuwan, sesuai dengan latar belakang keilmuan serta kapasitas yang mereka miliki, mencoba untuk membangun ilmu Ekonomi Islam dan berusaha untuk menjawab persoalan ekonomi sesuai dengan pandangan Islam yang mereka miliki. Muhammad Bâqir Al-Shadr yang dianggap pionir dalam ilmu ekonomi Islam telah membuahkan beberapa karya dalam hal ini, seperti magnum opus nya *Iqtishâdunâ*, *Bank Allâ Ribâwi fî al-Islâm*, *Maqâlât Iqtishâdiyyah* dan *Al-Bank al-Islâmiyyah*.

Akan tetapi, sejak kematiannya, menurut hemat penulis, belum banyak penelitian yang berusaha membongkar pemikiran ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr, penelitian tentang Muhammad Bâqir al-Shadr lebih banyak tertuju pada pemikiran dan peran politiknya serta pengaruhnya terhadap pergerakan Islam di Timur Tengah. Namun, beberapa penelitian tentang pemikiran ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr dapat disebutkan di sini, antara lain :

Nazeh al-Hasan melakukan penelitian dengan judul *Muhammad Bâqir al-Shadr Dirâsah fî al-Manhaj*, dalam penelitian yang telah dibukukan ini beliau merangkum manhaj pemikiran (metode berpikir) Muhammad Bâqir al-Shadr secara umum, baik di bidang filsafat, ekonomi, sejarah, sosiologi, fiqih dan Ushul maupun dalam bidang tafsir. Sesuai dengan judulnya, penelitian ini hanya berusaha meneliti model berpikir Bâqir al-Shadr, dan tidak berusaha untuk menggali hasil ijtihad Muhammad Bâqir al-Shadr.

Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohamed Aslam Haneef dengan judul *Contemporar Muslim Economic Thought : a Comparative Analysis*, penelitian ini sesungguhnya tidak khusus membahas pemikiran ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr, akan tetapi sesuai judulnya, penelitian yang merupakan tesis (1989) di *University of Malaya* ini merupakan usaha untuk membandingkan kerangka umum dari pemikiran ekonomi ilmuwan muslim kontemporer, yaitu Muhammad Bâqir al-Shadr, Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Haider Naqvi, dan Sayyid Mahmud Taleghani.

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan salah satu usaha untuk membongkar pemikiran ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr, terutama tentang konsep *Iqtishâd*, munculnya permasalahan ekonomi yang merupakan landasan bagi tumbuhnya pemikiran serta teori dalam ilmu ekonomi, serta bagaimana tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi. Pemikiran yang dilahirkan oleh Muhammad Bâqir al-Shadr dan mazhab ekonominya sengaja dipilih karena pemikiran mereka terbilang “unik” bila dibandingkan dengan pemikiran ekonom lain. Harapan penulis, di samping adanya saran dan masukan, hendaknya akan muncul karya tulis lain yang membahas hal yang sama dari sudut pandang mazhab yang berbeda, sehingga ada komparasi pemikiran, dengan demikian para ekonom dan masyarakat muslim bisa melihat adanya alternatif pilihan dalam bidang ekonomi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian keputakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cetakan keenam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 125.

## 2. Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari jenis data yang digunakan, maka penelitian ini bersifat kualitatif.<sup>35</sup> Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka.<sup>36</sup> Data dalam bentuk kata verbal diperoleh dari hasil pengumpulan data yaitu observasi literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali/mengeksplorasi pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi, terutama Muhammad Bâqir al-Shadr, yang berkaitan dengan persoalan di atas yang tersebar di dalam karya tulis mereka, baik yang berbentuk buku maupun dalam bentuk artikel. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; *Pertama*, studi kepustakaan atau observasi literatur metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian yang *kedua*, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. *Ketiga*,

---

<sup>35</sup> Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap obyek yang bersifat sosiologis. Lihat *ibid*. Lihat juga Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, h. 3. Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif”, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi Bogdan, Kirk dan Miller mendefinisikan “penelitian kualitatif”, tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasan dan peristilahannya.

<sup>36</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1989), h. 41-42.



setelah itu dilakukan penela'ahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.<sup>37</sup>

#### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar bisa dibagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan data orisinal yang diambil langsung dari karya Muhammad Bâqir Shadr, terutama yang berkaitan dengan pemikiran ekonominya, yaitu kitab *Iqtishâduna*. Sementara data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari tangan kedua, yaitu tulisan-tulisan yang mengulas kehidupan dan pemikiran ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr.

#### **5. Metode Analisis Data**

Lebih lanjut untuk menganalisis data yang diperoleh dipergunakan metode induktif, yaitu berusaha untuk memaparkan pemikiran ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr untuk kemudian dicarikan kesimpulan akhirnya.

Di samping itu, karena penelitian ini juga berusaha mengetahui posisi dan perbandingan antara pemikiran Muhammad Bâqir al-Shadr dengan pemikiran-pemikiran ekonomi lain, baik pemikiran ekonomi yang

---

<sup>37</sup> Mastuhu dkk. 2000. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), h. 86.

dicetuskan oleh ekonom konvensional maupun pemikiran ekonomi yang berasal dari cendekiawan muslim lain, maka dalam penelitian ini metode komparasi juga digunakan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Profil singkat Muhammad Bâqir al-Shadr berisi tentang Kelahiran dan Asal Usul, Pendidikan, Karier Akademik, Aktifitas Sosial Politik, Kematian, Karya Tulis dan Pengaruh Pemikirannya Terhadap Dunia Modern.
- BAB III** : Gambaran Umum Tentang Ilmu Ekonomi, berisi tentang Pengertian dan Prinsip Ilmu Ekonomi, Munculnya Persoalan Ekonomi, Tanggung Jawab Negara di Bidang Ekonomi, dan Konstitusi Ekonomi di Beberapa Negara.
- BAB IV** : Pemikiran Ekonomi Muhammad Bâqir al-Shadr, berisi tentang Iqtishâd dan Ekonomi Dalam Pandangan Bâqir al-Shadr, Munculnya Persoalan Ekonomi Menurut Bâqir Shadr, Tanggung Jawab Negara di Bidang Ekonomi Menurut Bâqir Shadr, serta Relevansi dan Perbandingan

Pemikiran Ekonomi Bâqir Shadr Dengan Pemikiran  
Ekonomi Modern.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

Daftar Kepustakaan

## BAB II

### BIOGRAFI MUHAMMAD BÂQIR AL-SHADR

#### A. Kelahiran dan Asal Usul

Imam Al-Sayyid al-Syahid Muhammad Bâqir bin Al-Sayyid Haidar Ibn Ismâ'il Al-Shadr,<sup>1</sup> lahir di Kazhimiyah,<sup>2</sup> pinggiran kota Baghdad, Irak, pada 25 DzulQa'dah 1353 H / 1 Maret 1935 M. Ayahnya meninggal saat Muhammad Bâqir Al-Shadr masih berusia empat tahun. Kemudian ia, bersama kakaknya Isma'il dan Adiknya Aminah, diasuh oleh ibunya. Ibunya sendiri merupakan anak seorang ulama besar Syaikh Abdul Husain al-Yasin dan saudara perempuan dari tiga orang ulama kenamaan. Paman-pamannya dari pihak ibunya inilah yang berjasa mengasuh dan mendidik Bâqir al-Shadr dan saudaranya karena paman-pamannya dari pihak ayah memilih untuk tinggal di Iran, tempat kakeknya berpindah dan menetap. Kakek buyut Bâqir

---

<sup>1</sup> *Sayyid* menurut bahasa berarti tuan atau pemuka. Dalam arti khusus digunakan sebagai gelar orang-orang keturunan Sayyidina Husein ibn Ali ra (cucu Rasulullah saw), sebagai mana gelar *Syarif* untuk keturunan Sayyidina Hasan ibn Ali ra. Adakalanya kedua gelar itu bercampur aduk antara keturunan kedua cucu Rasulullah saw tersebut. Pemberian gelar ini bukan dari agama, tapi hanya kebiasaan kaum muslimin secara turun temurun. Di samping Sayyid Muhammad Bâqir Shadr, tokoh pemikir kontemporer lain yang bergelar Sayyid antara lain Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, Sayyid Abul A'la al-Maududi dan lain-lain. Sedangkan Syahid (*The Martyr*) adalah gelar untuk para syuhada' yang gugur dalam memperjuangkan agama Allah, seperti Syahid Hasan Al-Banna, Syahid Sayyid Quthb dll. Lihat Sayyid Abdullah Haddad, *al-Fushûl al-'Ilmiyyah wa al-Ushûl al-Hikmiyyah*, (terj.), (Bandung : Mizan, 1990), cet. Ke-4, h. 46 dan Azyumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam Jilid 6*, (Jakarta : Ictiar Baroe Van Hoeve, 2005), h. 183.

<sup>2</sup> Kazhimiyah merupakan tanah leluhur Bâqir al-Shadr, Imam Musa Al-Kâzhim, daerah ini juga merupakan saksi sejarah perjuangan para leluhur Bâqir al-Shadr dalam menghadapi kekuasaan tirani. Musa al-Kâzhim sendiri merupakan Imam ketujuh dalam kepercayaan Syi'ah Itsna Asya'irah (Syi'ah Dua Belas), bernama lengkap Abu Abdillah Musa ibn Ja'far, lahir di Abwa' pada tahun 128 H/745 M dan wafat dalam penjara al-Sindi ibn Shahik pada tanggal 6 Rajab 183/799 M dan dimakamkan di Masjid Kazhimiyah. Lihat Al-Sayid 'Ammar Abu Raghif, *Al-Sayid Muhammad Bâqir Al-Shadr : Theoritian in Iqtishâd*, dalam Bâqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, *Essays on Iqtishâd : The Islamic Approach to Economic Problem*, (Silver Spring : Nur, 1989), h. 7.

al-Shadr, Shadr al-Din al-Amili, bermigrasi dari Jabal Amili, Selatan Lebanon ke Najaf, Irak, untuk menuntut ilmu di kota tersebut. Setelah menyelesaikan studinya di kota tersebut ia pindah ke Isfahan, di sana ia menetap dan memiliki beberapa orang anak. Salah seorang anaknya, Ismail, kakek Bâqir al-Shadr, kembali ke Iraq dan beberapa saat kemudian kembali lagi ke Isfahan dan wafat di sana. Sayyid Haidar, ayah Bâqir al-Shadr, adalah satu-satunya anak Ismail yang menetap di Irak. Sayyid Haidar wafat di Irak dalam keadaan miskin tanpa meninggalkan makanan harian untuk keluarganya. Akan tetapi kedalaman iman yang dimiliki membuat keluarga ini mampu bertahan hidup dalam kemiskinan.<sup>3</sup>

## B. Paham Keagamaan

Muhammad Bâqir al-Shadr adalah penganut aliran Syi'ah dari Sekte Syi'ah Imamiyah. Secara garis besar aliran Syi'ah terdiri dari empat sekte, yaitu *Kaisaniyyah*, *Zaidiyyah*, *Imamiyyah* dan *Kaum Gulat*. Syiah Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai Imam (pemimpin) penggantinya dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Salah satu dasar mereka adalah hadis Nabi :

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَهُ وَ عَادَ مَنْ عَادَهُ ( رواه الترمذی )

---

<sup>3</sup> Al-Sayid `Ammar Abu Raghif, *Al-Sayid Muhammad Bâqir As-Shadr* :..., h. 7.

“Siapa yang saya adalah pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Ya Allah, tolonglah orang yang menolong Ali, dan musuhilah orang yang memusuhinya. (HR. Tirmidzi)<sup>4</sup>

Hadis ini, menurut Syi’ah Imamiyah, adalah nas yang lahir sebagai wasiat Nabi tentang pengangkatan Ali bin Abi Thalib ra sebagai khalifah beliau.<sup>5</sup> Dengan demikian mereka tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar ra, Umar bin Khattab ra dan Usman bin Affan ra. Aliran ini sesudah Abad III H, akan tetapi ada pula yang mengatakan bahwa ia lahir sesudah hilangnya Muhammad Mahdi al-Muntazhar secara misterius pada tahun 260 H.<sup>6</sup> Dalam perkembangannya, golongan ini terpecah menjadi beberapa sekte, yaitu : *al-Bâqiriyyah*, *al-Ja`fariyyah al-Waqifiyyah*, *al-Nawusiyyah*, *al-Afthâhiyyah*, *al-Syumaitiyyah*, *al-Isma`iliyyah al-Waqifiyyah*, *al-Mûsawiyyah*, *al-Mufadhdhiliyyah*, dan *al-Istna al-Asyariyyah*. Dari golongan-golongan tersebut sekte *Itsna Asyariyyah* merupakan sekte terbesar sampai saat ini.<sup>7</sup>

Muhammad Bâqir al-Shadr merupakan penganut paham *Itsna Asyariyyah*, yang meyakini raibnya Imam kedua belas, yaitu Muhammad Mahdi al-Muntazhar.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Turmudzi, Abi Isa Muhammad bin Isa al-Turmudzi, *al-Jâmi’ al-Shahîh Sunan al-Turmudzi Juz XIII*, (Kairo : Mustafa Albabi Al-Halabi, 1975), h. 165.

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Târikh al-Mazâhib al-Islâmiyyah fî al-Siyâsah wa al-Aqâ'id Jilid I*, (Beirut : Dar el-Fikr al-Araby, t.th), h. 52-53.

<sup>6</sup> Abdul Fatah Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut : Dar el-Fikr, t.th), h. 170.

<sup>7</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam Jilid V*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. Ke-3, h. 5-8.

<sup>8</sup> Pemikiran Shadr tentang al-Mahdi dapat dilihat dalam bukunya Bahts Haul al-Mahdi. Lihat Muhammad Bâqir al-Shadr, *Bahts Haul al-Mahdi*, (Beirut : Dar al-Ta’aruf al-Mathbu’at, 1992)

### C. Pendidikan

Muhammad Bâqir Al-Shadr tumbuh di tengah lingkungan yang kental dengan nilai-nilai agama. Ia juga tumbuh di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, di mana ketekunan, kehalusan budi dan ketinggian ilmu menjadi suatu kebanggaan.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia mulai belajar dasar-dasar ilmu tulis menulis. Saat itu ia telah menunjukkan tanda-tanda kejeniusan yang membuat guru-gurunya terkesan. Pelajaran-pelajaran sekolah tidak cukup menantang bagi Muhammad Bâqir al-Shadr sehingga ia mulai mencari tantangan ilmiah di luar sekolah. Ia mulai berkenalan dengan berbagai macam literatur baik yang berasal dari lingkungannya maupun dari luar lingkungannya tanpa menganggap remeh pelajaran yang diberikan oleh gurunya di sekolah, bahkan ia menunjukkan perhatian yang sangat tinggi terhadap penjelasan yang disampaikan gurunya.<sup>9</sup>

Di sekolah Bâqir al-Shadr menjadi penomena, bukan hanya karena kejeniusannya yang luar biasa akan tetapi juga karena kecakapannya dalam menjaga pergaulan dengan teman-temannya sehingga bisa mengambil hati mereka yang senantiasa mengelilinginya di lingkungan sekolah untuk mendengarkan ulasan-ulasan ilmiah yang keluar dari mulutnya tentang Islam, filsafat, budaya dan isu-isu lainnya. Pujian yang diberikan gurunya tidak membuat ia besar kepala, justru pada saat guru-gurunya memberikan pujian, ia menunjukkan sikap yang rendah hati. Interaksinya dengan lingkungan sosial

---

<sup>9</sup> Al-Sayid `Ammar Abu Raghif, *Al-Sayid Muhammad Bâqir Al-Shadr* : ..., h. 8.

berjalan semakin baik karena ia aktif dalam berbagai macam kegiatan dan juga sering memberikan ceramah/pidato di depan khalayak ramai yang berkumpul di halaman pusara Imam Ali ra dalam berbagai kesempatan.

Pada usia 10 tahun, dia berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain tentang kultur Islam. Dia mampu menangkap isu-isu teologis yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang guru pun. Ketika usia 11 tahun, dia mengambil studi logika terutama tentang filsafat Aristoteles, di akhir studinya ia berhasil menulis sebuah buku yang mengkritik para filosof. Ini merupakan indikasi awal dari perdebatan serius yang pada akhirnya mempertajam kepribadian Bâqir al-Shadr sebagai seorang ahli filsafat.

Pada usia 13 tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya *Ushûl 'Ilm al-Fiqh* ( asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas ). Sementara itu ia mulai meninggalkan bangku sekolah atas izin gurunya untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah dan kembali lagi saat ujian akan dilaksanakan. Akan tetapi berkat kecemerlangan dan kecerdasannya ia selalu mendapatkan nilai yang luar biasa walaupun tidak mengikuti pelajaran di sekolah. Pada usia sekitar 16 tahun, dia pergi ke Najaf<sup>10</sup> untuk menuntut pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islami. Dengan inisiatif sendiri, ia memasuki *Hauza 'Ilmiyyah*<sup>11</sup> untuk mengikuti jejak para pendahulunya. Sekitar empat tahun

---

<sup>10</sup> Najaf adalah pusat agama kaum Syi'ah sejak abad VIII dan terletak di selatan Kota Baghdad, Irak. Najaf juga dianggap sebagai ibu kota Hukum Islam Syi'ah karena di sana berkumpul para ahli fiqih syi'ah. Lihat John L Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 4*, (Bandung : Mizan, 2002), cet. Ke-2, h. 151.

<sup>11</sup> Hauza merupakan lembaga pendidikan syi'ah tradisional dan pusat teologis kaum Syi'ah. Hauza pertama sekali didirikan pada abad ke-11 M di Kota Najaf dan berkembang pesat



kemudian, dia menulis sebuah ensiklopedi tentang Ushul, *Ghâyah Al-Fikr fî Al-Ushûl* ( pemikiran puncak dalam Ushul ).

Tradisi di kota Najaf, sebagai mana di seluruh Sekolah Pemikiran Syi'ah *Hauza 'Ilmiyyah*, seorang murid diharuskan melalui tiga tahapan, tahap pertama siswa diajarkan dasar gramatikal arab, orasi, mantiq, fiqih dalam level fatwa. Kemudian, pada tingkatan kedua siswa konsentrasi dalam mempelajari Dasar Hukum Islam, Ushul Fiqih dan Kaidah *Istinbath* Hukum Islam. Pada tahapan ketiga seorang siswa akan belajar langsung kepada seorang Fuqaha' terkemuka untuk mengetahui pemikiran fuqaha tersebut langsung dari yang bersangkutan. Pada tahap ini siswa sudah belajar metode pembentukan kaidah ushul (*Tharîqah Binâ' al-Qâ'idah al-Ushûliyyah*). Untuk dua tahap pertama biasanya seorang siswa menghabiskan waktu delapan tahun untuk menyelesaikannya.

Kejeniusan Bâqir al-Shadr membuat ia mampu menguasai pelajaran dalam satu hari di mana murid lain tidak mampu untuk menguasainya dalam waktu satu minggu. Ia terbiasa mengurung diri di rumah untuk belajar selama 16 jam dalam sehari semalam tanpa menghiraukan kegiatan lain.<sup>12</sup> Di samping itu dia juga tidak mengkhususkan diri untuk belajar pada seorang guru saja, dia menghadiri berbagai kelas yang dilaksanakan oleh berbagai guru tanpa harus menjadi siswa regular dari salah satu mereka. Pada tingkat kedua, yang

---

pada masa Dinasti Syafawi berkuasa di mana Syi'ah menjadi mazhab resmi Negara. Saat ini institusi Hauza sudah menyebar ke berbagai kota. Akan tetapi lembaga Hauza yang terkemuka saat ini terletak di Kota Najaf, Iraq dan Kota Qom, Iran, dua kota yang merupakan poros ilmu kaum Syi'ah dewasa ini.

<sup>12</sup> Naze al-Hasan, *al-Sayyid Muhammad Bâqir Shadr Dirâsah fî al-Manhaj*, (Beirut : Dar al-Ta'aruf al-Mathbu'at, 1992), h. 15.

dikenal dengan nama *Marhalah al-Suthuh*, dia lebih banyak memperoleh ilmu dari buku-buku dibandingkan dengan ilmu yang ia dapat dari gurunya.

Kemudian setelah itu, ia mulai menghadiri kelas yang dilaksanakan oleh pamannya, seorang faqih terkemuka, Syekh Muhammad Ridha al-Yasin, yang memiliki murid para fuqaha terkenal di kota Najaf karena kedalaman ilmu fiqih yang ia miliki. Di awal kehadirannya murid Muhammad Ridha Yasin yang lain tidak percaya bahwa kehadiran Bâqir al-Shadr dalam majlis tersebut akan berlanjut dan cenderung meremehkannya karena begitu mudanya usia Bâqir al-Shadr saat itu. Akan tetapi begitu pamannya mengemukakan persoalan fiqih, pemecahan yang dikemukakan oleh Bâqir al-Shadr membuka mata semua hadirin bahwa ia memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh murid yang lain. Hal ini membuat ia menjadi bintang dalam pembelajaran fiqih dan ia belajar dari pamannya sampai pamannya tersebut meninggal dunia. Pada saat itu ia juga belajar fiqih dan ushul fiqih dari ulama terkemuka lainnya, yaitu Sayyid al-Khû'i,<sup>13</sup> yang dalam berbagai kesempatan begitu membanggakannya dan memprediksi bahwa anak muda yang menjadi muridnya tersebut kelak akan menjadi sosok yang berpengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan.

Semasa di Hauza, dia juga diuji, sebagaimana tradisi yang berlaku di lembaga tersebut, untuk mengajarkan ilmu yang ia dapatkan kepada murid-

---

<sup>13</sup> Sayyid Abu al-Qasim al-Khû'i (1899-1992), adalah seorang mujtahid Syi'ah yang banyak diikuti. Setelah kematian Ayatullah Muhsin al-Hakim pada tahun 1970, Khû'i menjadi mujtahid Syi'ah yang pengikutnya paling luas. Di antara karyanya adalah *al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*, *al-Masâ'il al-Muntakhabah*, dan *al-Minhâj al-Shâlihîn*. Lihat John L Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 3*, (Bandung : Mizan, 2002), cet. Ke-2, h. 219.

murid yang lain, yang mana beberapa di antara mereka pada akhirnya menjadi para pejuang yang menemani perjuangan Bâqir al-Shadr.

Pada saat berumur 20an tahun, Shadr telah memperoleh derajat sebagai mujtahid Mutlaq yang selanjutnya meningkat kembali menjadi posisi yang lebih tinggi yaitu marja<sup>14</sup> atau dikenal sebagai otoritas pembeda. Perlu dicatat di sini, sekalipun memiliki latar belakang pendidikan tradisional, namun Shadr memiliki minat intelektual yang tajam dan seringkali bermain dalam isu-isu kontemporer. Beberapa fakta akan hal ini dapat dilihat dalam penguasaannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum. Dua karya masterpiece al-Shadr yang mewakili pemikirannya dalam bidang filsafat dan ekonomi dapat dirujuk dalam *Falsafatunâ* (filsafat kita) dan *Iqtishâdunâ* (ekonomi kita).

Muhammad Bâqir al-Shadr adalah sedikit dari tokoh-tokoh Islam yang mampu berbicara dengan fasihnya pemikiran-pemikiran Barat. Kesan apalogi yang selama ini melekat pada pemikir Islam, ia tepis dengan kejernihan dan kecerdasan pemikirannya. Ia begitu akrab dengan karya-karya pemikir Islam klasik maupun modern, tapi ia juga paham pemikiran-pemikiran Barat yang berkembang. Dalam karyanya yang terkenal yaitu *Falsatuna* dan *Iqtishâdunâ* ia dengan fasihnya mengutarakan kritik-kritik terhadap pemikiran Barat seperti Karl Marx, Descartes, John Locke dan lain-lain.

---

<sup>14</sup> *Marja`* merupakan gelar yang diberikan kepada seorang *Ayatullah ‘Uzhma* (Grand Ayatollah) yang diberikan otoritas tertinggi untuk menetapkan hukum syara’ bagi para pengikutnya. Di dalam system penetapan hukum (Ushul Fiqh) yang dianut oleh Syi’ah Imamiyah, fatwa yang dikeluarkan oleh seorang marja merupakan sumber hukum setelah Al-Qur’an, Hadis dan Fatwa Imam.

#### D. Karier Akademik

Keterlibatan Bâqir al-Shadr dalam dunia politik telah dimulai sebelum tahun 60an dan pada saat itu reputasinya sebagai seorang ahli fiqih dan ushul fiqih sudah sangat diperhitungkan. Mengingat keahliannya sebagai seorang ahli fikih, oleh para seniornya di Hauza, ia diproyeksikan sebagai Grand Marja' berikutnya. Untuk itu ia diminta untuk meninggalkan dunia politik dan meletakkan jabatannya di Partai Da'wah dan Buletin Al-Awa' mengingat seorang *Grand Marja'* tidak boleh bersentuhan dengan dunia politik dan tidak boleh terlibat dalam kepengurusan sebuah partai. Pada tahun 1961 ia meletakkan jabatan di Partai Da'wah dan Buletin Al-Awa', akan tetapi secara pribadi ia masih berhubungan dan berkomunikasi dengan anggota partai dan editorial bulletin tersebut.

Dengan posisinya sebagai pemimpin tertinggi Hauza, maka fokusnya sekarang terarah untuk mengembangkan dan memperbaiki Hauza. Salah satu yang menjadi keinginannya terhadap Hauza adalah memperbaiki kurikulum Hauza yang selama lebih kurang satu setengah abad hanya terfokus pada pelajaran fikih dan ushul fikih serta cenderung menganggap pelajaran lain tidak penting. Di samping itu ia juga merencanakan untuk mendirikan universitas yang bergaya barat.<sup>15</sup>

#### E. Aktivitas Sosial Politik

Sebagai salah seorang pemikir yang paling terkemuka, Muhammad Bâqir al-Shadr melambangkan kebangkitan intelektual yang berlangsung di

---

<sup>15</sup> TM Aziz, *The Role of Muhammad Bâqir Al-Shadr in Shi'a Political Activism in Iraq from 1958 to 1980* (www.victorynewsmagazine.com), 03 Februari 2010

Najaf antara 1950-1980. Ciri lain yang mencolok dari kebangkitan itu adalah dimensi politiknya, dan saling berpengaruh antara apa yang terjadi di lorong gelap dan sekolah tinggi berdebu Najaf, dan Timur-Tengah pada umumnya.

Intelektualitas yang ia miliki mempertajam sensitifitasnya terhadap persoalan sosial, masa kecilnya sebagai seorang yatim memberinya energi yang positif, rasa cinta yang besar terhadap masyarakat serta punya hati nurani yang tajam. Kemiskinannya tidak mengurangi moralitasnya, justru sebaliknya meninggalkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap orang-orang miskin dan membuktikan bahwa kekayaan bukanlah segala-galanya dalam hidup.

Menurut pengakuannya, sampai tahun 50an, ia menjalani hidupnya dengan penuh rutinitas yang monoton. Dia tidur lebih awal kemudian bangun di kala fajar menjelang. Ia memulai hari dengan shalat dan zikir, membaca dan menjalani rutinitas mengajar dan meneliti sepanjang hari. Barulah di akhir tahun 50an lah ia mulai bersentuhan dengan politik.

Keterlibatannya dalam politik erat kaitannya dengan bermunculannya berbagai ideologi dan gerakan politik pasca tumbangannya kerajaan yang dibentuk penjajah Inggris di tangan Jendral Qasim pada tahun 1958. Di antara kelompok politik tersebut Partai Komunis menjadi kekuatan politik terbesar berkat kedekatannya dengan Jenderal Qasim dan organisasinya yang ditata dengan sangat baik dan rapi. Melihat kenyataan ini kaum syi'ah mulai menyadari bahwa mereka tengah dihadapkan kepada bahaya kekuatan politik Atheis yang suatu saat bisa menghapus Islam dari kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> TM Aziz, *The Role of Muhammad Bâqir Al-Shadr in Shi'a Political Activism...*

Untuk menghadang bahaya ini tidak ada pilihan lain selain menghimpun segenap kekuatan yang ada di kota Najaf dan dibentuklah sebuah organisasi “*Jamâ’ah al-‘Ulamâ’*”<sup>17</sup> di bawah pimpinan Syaikh Murtadha al-Yasin, paman sekaligus mertua Bâqir Shadr sendiri. Pada saat itu Al-Shadr adalah seorang intelektual yang masih sangat muda sekali sehingga ia belum bisa diangkat sebagai anggota *Jamâ’ah al-‘Ulamâ’* yang beranggotakan para mujtahid terkemuka yang berusia lebih tua, akan tetapi melalui mertuanya yang merupakan pimpinan dalam organisasi tersebut serta melalui kakaknya Ismail al-Shadr, ia bisa memberikan pengaruh. Ia sudah aktif menulis untuk jurnal *Jamâ’ah al-‘Ulamâ’* yang dibacakan oleh Hadi Al-Hakim di Radio Pemerintah.<sup>18</sup> Dia juga menulis editorial di Jurnal Al-Awa’, jurnal bulanan yang dikeluarkan oleh *Jamâ’ah al-‘Ulamâ’*. Di jurnal tersebut dia menulis dasar-dasar program politik pergerakan Islam.<sup>19</sup> Dalam periode ini ia juga menghasilkan dua masterpiecenya, *Falsafatunâ* dan *Iqtishâdunâ*.

Keterlibatannya dalam politik semakin besar dengan mendirikan Partai Da’wah Islam (*Islamic Da’wa Party*) sekaligus menjadi ketua dari partai tersebut.<sup>20</sup> Nama partai tersebut, yaitu Partai Da’wah Islam, juga merupakan buah ide dari Bâqir al-Shadr sendiri. Dia juga menggariskan rencana besar partai untuk mendirikan Negara Islam serta merumuskan langkah-langkah

---

<sup>17</sup> Menurut Talib al-Rifa’i, kolega Baqie Shadr, *Jama’at al-Ulama’* terdiri dari sepuluh orang mujtahid, yaitu : Murtada Al Yasiyyin, Abbas al-Rumaythi, Isma’il al-Shadr, Muhammad Tahir Shaykh Radi, Muhammad Jawad Shaykh Radi, Muhammad Taqi Bahr al-Ulum, Musa Bahr al-Ulum, Muhammad Reda al-Mudhaffar, Husayn al-Hamadani, and Muhammad Bâqir Shakhsh.

<sup>18</sup> TM Aziz, *The Role of Muhammad Bâqir Al-Shadr ...*,

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Menurut Al-Rifa’I, partai ini didirikan oleh Mahdi Al-Hakim, Al-Rifa’I dan seorang koleganya. Akan tetapi setelah Bâqir Shadr diperkenalkan kepada Mahdi Al-Hakim, akhirnya dia ditunjuk menjadi ketua partai tersebut.

untuk mewujudkan rencana besar tersebut lewat empat buah artikel (*Al-`Amal wa al-Ahdâf*, *Da`watuna ila al-Islâm Yajîb an Takûn Inqilâbiyyah*, *Haula al-Marhalah al-`Ulâ min `Amal al-Da`wah*, *Haula al-Ism wa al-Syakl al-Tanzhîmi li Hizb al-Da'wah al-Islâmiyyah*") yang dirilis oleh partai tersebut.

Walau di awal pergerakan politik, al-Shadr dan para ulama Najaf lain bangkit untuk menghadang bahaya komunisme, akan tetapi Partai Ba'ts lah yang terbukti menjadi musuh terburuk mereka. Dengan mulai berkuasanya Partai Ba'ts di bawah pimpinan Ahmad Hasan al-Bakr dan Saddam Hussein pada musim panas 1968, dunia sekolah agama dan ulama yang relatif tertutup di Najaf itu diserang langsung oleh sistem raksasa yang meredam mutlak, yang berpadu dengan meningkatnya "pen-sunni-an" dari rezim di Baghdad.

## **F. Kematian**

Keterlibatannya dalam dunia politik membuat ia harus berhadapan langsung dengan penguasa saat itu, Saddam Husein. Perkembangan antagonisme antara Saddam Hussein di Bagdad dan Muhammad Bâqir al-Shadr di Najaf antara tahun 1968 dan 1980 belum sepenuhnya tercatat, tetapi peristiwa Asyura (hari berkabung tahunan bagi syuhada Imam Husein bin Ali pada 680 M) ternyata sering diwarnai kekerasan. Terutama pada 1974 dan 1977, dan lebih tajam setelah Khomeini mulai berkuasa pada Februari 1979, antagonisme berkobar dalam kerusuhan besar-besaran. Dilaporkan bahwa pada kerusuhan 1977 agen keamanan pemerintah Ba'ts sedah menanyai mereka mereka yang ditangkap tentang hubungan mereka dengan al-Shadr.

Kemudian setelah Shadr jelas-jelas menjadi ancaman besar bagi pemerintah, para pemimpin Irak langsung bergerak meredam kegiatan dan pengaruhnya.<sup>21</sup>

Al-Shadr ditangkap beberapa kali sepanjang 1970-an, tetapi pada Juni 1979, ketika dia sedang bersiap-siap memimpin delegasi Irak untuk memberi selamat kepada Khomeini di Teheran, dia dilarang untuk meninggalkan rumahnya di Najaf. Ketegangan terus meningkat, hingga serangan granat melawan kaum Ba'ts meletus di Kota Bagdad dan berujung dengan penyingkiran al-Shadr dari Najaf pada sore 5 April 1980. Dia dan saudara perempuannya, Bintu al-Huda,<sup>22</sup> dibawa ke Bagdad dan diyakini bahwa mereka dibunuh pada 8 April 1980.<sup>23</sup>

## G. Karya Tulis

Karya Bâqir al-Shadr mungkin merupakan karya paling beragam untuk seorang penulis Muslim pada Abad XX. Al-Shadr menulis buku-buku tentang filsafat, tafsir al-Qur'an, logika, pendidikan, hukum undang-undang, ekonomi, perbankan tanpa bunga, serta karya tradisional lain tentang Fiqih dan Ushul Fiqih, dan penyelidikan historis tentang awal kontroversi Sunni-Syi'ah.<sup>24</sup> Di samping itu dia juga aktif menulis di berbagai jurnal dan surat kabar. Di antara buku-bukunya yang terkenal adalah :

### Fiqih

- *Buhûts fî Syarh al-`Urwah al-Wutsqa*, 4 volumes. Juz pertama diterbitkan pada tahun 1391 H.

---

<sup>21</sup> John L Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 4...*, h. 154.

<sup>22</sup> Bint al-Huda adalah nama pena dari Amina

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 151.



- *Minhâj al-Shâlihîn (Ta'liq 'Ala Risalah Amaliyah li al-Sayyid Muhsin al-Hakim)*, 2 volumes.
- *Al-Fatâwa al-Wadhîhah*. Dalam buku ini Bâqir al-Shadr mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana menata dan menampilkan Fiqih Islam sehingga syariat lebih membumi. Diterbitkan oleh *Mathba'ah al Adab*, Najaf pada tahun 1977.
- *Mûjaz Ahkâm al-Hajj*.
- *Al-Ta'liqah 'ala Manâsik al-Hajj*.
- *Al-Ta'liqah 'ala Shalâh al-Jumu'ah*.

### **Ushul Fiqih**

- *Durûs fî 'Ilm al-Ushûl*, terdiri dari tiga bagian. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1397 H/1977 M.
- *Al-Ma'âlim al-Jadîdah li al-Ushûl*. Buku ini merupakan salah satu dari tiga buah buku yang dipersiapkan oleh Bâqir al-Shadr untuk mahasiswa di Kuliah Ushuluddin Baghdad. Diterbitkan pada tahun 1385 H.<sup>25</sup>
- *Ghâyah al-Fikr fî al-Ushûl*. Buku ini ditulis pada usia yang sangat muda. Yaitu pada usia 20 tahun dan diterbitkan pada tahun 1974.

### **Filsafat**

- *Falsafatunâ (Our Philosophy/ filsafat kita)*, ditulis pada tahun 1959, karya terkemuka Bâqir al-Shadr dalam bidang filsafat yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk ke dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Buku ini, di samping *Iqtishâdunâ*, dianggap sebagai *Magnum*

---

<sup>25</sup> Fadil al-Nuri, *al-Syâhid al-Shadr Fadâ'iluhu wa-Syamâ'iluhu*, (Qum: Mahmud al-Hasyimi Office, 1984), h. 64.

*Opus*, dari Bâqir al-Shadr.<sup>26</sup> Pembahasan dalam buku ini secara garis besar bisa dibagi dua, bagian pertama merupakan pembahasan tentang teori ilmu pengetahuan dan bagian kedua membahas tentang ide-ide filosofi dunia. Dalam buku ini Bâqir Shadr juga mengkritisi beberapa ide para filosof barat, seperti Hegel dan Karl Marx. Komunisme menurutnya tidak akan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat karena sejak awal ideologi ini dibangun di atas asumsi dasar yang sudah keliru.<sup>27</sup>

### **Mantiq/Logika**

- *Al-Usûs al-Mantiqiyyah li al-Istiqrâ'*. Diterbitkan pada tahun 1391 H.

### **Theologi/Aqidah**

- *Al-Mûjaz fî Ushûl al-Dîn : al-Mursil, al-Rasûl, al-Risâlah*. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh M. Ayoub dengan judul *The Revealer, The Messenger, and The Message*.
- *Al-Tasyayyu' wa al-Islâm - Bahts Haul al-Wilâyah*. Tulisan ini merupakan muqaddimah dari kitab *Tarikh Syi'ah al-Imâmiyah wa Aslâfihim* yang disusun oleh DR. Abdullah Fayyad, diterbitkan pada tahun 1397 H/1977 M.
- *Bahts Haul al-Mahdi* (Pembahasan tentang Imam Mahdi). Tulisan ini merupakan muqaddimah dari kitab *Mausû'ah 'an al-Mahdi* yang disusun oleh Sayyid Muhammad al-Shadr, diterbitkan pada tahun 1397 H/1977 H.

---

<sup>26</sup> Untuk menyusun buku ini Bâqir al-Shadr tidak memiliki cukup uang untuk membeli buku-buku filsafat barat. Akan tetapi seorang Arab Nasionalis, pemilik sebuah toko buku, bersedia meminjamkannya buku-buku tersebut. Lihat TM Aziz, *The Role of Muhammad Bâqir Al-Shadr ...*

<sup>27</sup> Muhammad Bâqir al-Shadr, *Falsafatuna*, (Beirut : Dar al-Ta'âruf li al-Mathbu'ât, 1989), h. 7-8.

## **Ekonomi**

- *Iqtishâdunâ (Our Economics)*. buku ini merupakan suatu diskusi terinci tentang Ekonomi Islam dan merupakan suatu serangan terhadap kapitalisme dan sosialisme. Pada 1984, Istishaduna diterjemahkan sebagian ke dalam bahasa Jerman, disertai mukadimah panjang mengenal alim Syi'ah ini oleh seorang orientalis muda Jerman. Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk Bahasa Indonesia.

Buku ini secara garis besar bisa dibagi dua bagian. Bagian pertama merupakan penjelasan dan kritikan Bâqir Sadar terhadap teori ekonomi Marxis dan Kapitalis. Beliau menjelaskan teori Marxis dengan sangat jelas sekali seolah beliau sendiri adalah seorang pengikut Marxis. Kemudian beliau menyerang teori tersebut, menghancurkan akar dan dasar-dasar teori ekonomi tersebut. Penjelasan dan serangan terhadap Kapitalisme tidak sepanjang yang beliau berikan terhadap ekonomi Marxis, sebab menurutnya, struktur ideologi kapitalisme sebagai sebuah mazhab tidak serumit struktur ideologi Marxis. Hal ini juga disebabkan karena kuatnya ideologi Marxis di Irak pada saat buku ini disusun.

Bagian kedua buku ini baru membahas tentang mazhab ekonomi di dalam Islam. Bagian ini merupakan jawaban terhadap tuduhan yang dilontarkan oleh kaum komunis dan sekularis yang mengatakan bahwa Islam kering dari solusi yang bisa menjawab persoalan-persoalan ekonomi. Dengan mengagumkan dia merumuskan doktrin ekonomi Islam yang didasarkan

kepada hukum Islam, suatu kajian yang belum pernah dilakukan oleh para ilmuwan sebelumnya.

- *Al-Bank alla Ribâwi fî al-Islâm*. Buku ini ditulis pada tahun 40an sebagai jawaban yang ditujukan kepadanya mengenai Bank.
- *Maqâlât al-Iqtishâdiyyah*.
- *Al-Bank al-Islâmiyyah*.

### **Tafsir dan Ulumul Qur'an**

- *al-Madrasah al-Qur'âniyyah al-Tafsîr al-Maudhû'i li al-Qur'ân al-Karim*.
- *Al-Buhûts fî 'Ulûm al-Qur'ân*.
- *Maqâlât al-Qur'âniyyah*.

### **Sejarah**

- *Ahl al-Bait Tanawwu' al-Ahdâf wa Wahdah al-Hadaf*.
- *Fadâk fî al-Târîkh*. Sebuah buku yang mencoba menggali isu-isu seputar periode awal Islam. Buku ini ditulis saat beliau baru berusia 17 tahun dan diterbitkan pada tahun 1374 H.

### **Kebudayaan Islam**

- *Al-Islâm Yaqûd al-Hâyah*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan judul *Islam Leads Life*. Buku ini merupakan kumpulan dari enam artikel yang ditulis oleh al-Shadr. Satu artikel di antaranya membahas pembentukan Negara Islam serta menggariskan Struktur Negara Islam itu sendiri. Sementara lima artikel yang lain membahas prinsip-prinsip Negara Islam serta struktur ekonomi dari Negara Islam tersebut.
- *Al-Madrasah al-Islâmiyyah*. Diterbitkan pada tahun 1393 H/1973 M.

- *Risâlatunâ*. Buku ini terdiri dari artikel-artikel yang ditulis di dalam pembukaan majalah “*Al-Adhwa*”.
- *Nazhrah `Âmmah fî al-Ibâdah*.
- *Maqâlât wa Muhazrât*

#### **Artikel**

- *Al-'Amal wa al-Ahdaf*
- *Al-'Amal al-Shâlih fî al-Qur'ân*
- *Ahl al-Bait: Tanawu` al-Adwar wa Wihdah al-Hadaf*
- *Da'watana li al-Islâm Yajîb an Takûn Inqilâbiyyah*
- *Daur al-A'immah fî al-Hâyah al-Islâmiyyah*
- *al-Daulah al-Islâmiyyah*
- *Haula al-Marhalah al-Ûlâ min 'Amal al-Da'wah*
- *Haul al-Ism wa al-Syâkl al-Tanzhîmi li Hidzb al-Da'wah al- Islâmiyah*
- *al-Hurriyyah fî al-Qur'ân*
- *al-Ittijahât al-Mustaqbaliyyah li al-Harakah al-Ijtihâd*
- *al-Insân al-Mu'âshir wa al-Musykilah al-Ijtimâ'iyyah.*
- *al-Jânib al-Iqtishâdi Min al-Nizhâm al-Islami*
- *Khalafât al-Insan wa Syahâdah al-Anbiya'*
- *Khaththuth Tafshîliyyah 'An Iqtishâd al-Mujtama' al-Islami.*
- *Lamhah Fiqhiyyah Haul Dustûr al-Jumhûriyyah al-Islâmiyyah.*
- *Mâdza Ta`rif 'an al-Iqtishâd al-Islâmi.*
- *Manâbi' al-Qudra fî al-Daulah al-Islâmiyah.*
- *al-Mihna*

- *Minhâj al-Shâlihîn*
- *Muqaddimah fî al-Tafsîr al-Maudhû'î Li al-Qur'ân*
- *Nazhârah 'Ammah fî al-'Ibâdah" : al-Fatâwa al-Wadhîhah*
- *al-Nazhriyyah al-Islâmiyyah li al-Tauzî' al-Mashâdir al-Thâbi'iyyah*
- *al-Nizhâm al-Islâm Muqâran bi al-Nizhâm al-Ra'sumâli wa al-Mârikis*
- *Risâlatuna wa al-Da'wah*
- *Al-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah*
- *Shûrah 'An Iqtishâd al-Mujtama' al-Islâmi*
- *al-Usûs al-'Âmmah li al-Bank fî al-Mujtama' al-Islâmi*
- *Utruhât al-Marja'iyyah al-Shâlihah*
- *al-Yaqîn al-Riyâdh wa al-Mantiq al-Wadh'i*
- *Muqaddimah li al-Shahîfah al-Sajadiyyah*

Di samping buku-buku dan makalah di atas, menurut Nazez al-Hasan, ada dua karya Muhammad Bâqir al-Shadr yang hilang dan tidak pernah diterbitkan, yaitu *Kitâb Falsafî* dan *Bahts Tahlîl al-Dzihn al-Basyari*.<sup>28</sup>

Dari puluhan karya di atas, *Falsafatunâ* dan *Iqtishâdunâ* dipercaya sebagai dua karya Monumental Bâqir al-Shadr,<sup>29</sup> dua karya ini telah mencuatkan Muhammad Bâqir Shadr sebagai teoritis kebangkitan Islam terkemuka. Sistem filsafat dan ekonomi alternatif ini disempurnakan melalui masyarakat dan lembaga.<sup>30</sup> Dalam *Falsafatunâ* dan *Iqtishâdunâ*, Bâqir al-

---

<sup>28</sup> Nazez al-Hasan, *al-Sayyid Muhammad Bâqir Shadr...*, h. 18.

<sup>29</sup> Dalam *Falsafatunâ* dan *Iqtishâdunâ*, Bâqir Shadr menjanjikan jilid ketiganya yang diberi judul dengan pola yang sama, *Mujtama'unâ* (Masyarakkat Kita). Lihat Muhammad Bâqir Shadr, *Iqtishâduna*, (Beirut : Dar al-Ta'aruf lil Mathbu'at, 1981), h. 27.

<sup>30</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Asatrus, 2005), h. 251-252.

Shadr ingin menyajikan kritik yang serius terhadap aliran Marxisme dan Kapitalisme. Buku ini baik dari segi struktur maupun metodologi, tak diragukan lagi inilah sumbangsih paling serius dan paling banyak disaluti di bidang ini. Di dalam berbagai karyanya beliau juga menganjurkan konsep Islam sebagai ganti konsep-konsep yang telah ada (Marxisme dan Kapitalisme) dalam membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Dia juga sering menjadi konsultan bagi berbagai organisasi islam, seperti Bank Pembangunan Islam.

Karangan dan karya Bâqir al-Shadr di atas menunjukkan kapasitas keilmuan Bâqir Shadr sebagai seorang alim yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman, akan tetapi juga ilmu-ilmu umum dan isu-isu actual lainnya. Hal ini menempatkan Bâqir Shadr sebagai seorang ilmuwan langka pada zamannya, karena kebanyakan ulama atau ilmuwan hanya memfokuskan diri pada satu bidang saja sekaligus menjawab kritik sejumlah orang terhadap tokoh-tokoh agama yang dinilai tidak memperhatikan perkembangan sains dan filsafat kontemporer. Di samping itu, di samping seorang ilmuwan yang jenius dalam menelurkan dan membangun ide-ide, ia juga dikenal sebagai seorang yang piawai dalam menjelaskan ide-idenya.

#### **H. Pengaruh Bâqir al-Shadr**

Barangkali kematian al-Shadr merupakan titik puncak tantangan terhadap Islam Syi'ah di Irak. Dengan meninggalnya al-Shadr, Irak kehilangan aktivis Islamnya yang paling penting. Tapi ketenaran Shadr justru semakin meningkat setelah ia dihukum gantung oleh pemerintahan Irak. Reputasi al-

Shadr semenjak itu diakui di berbagai kalangan masyarakat. Namanya telah melintasi Mediterania, ke Eropa dan Amerika Serikat.

Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, al-Shadr mencoba memanfaatkan jaringan Syi'ah untuk memperkuat daya tariknya, tetapi organisasi itu tidak terstruktur secara memadai dan efektif, dan pemerintah telah waspada akibat keberhasilan Syi'ah sebelumnya di Iran. Namun, kematiannya justru menandai awal penyebaran pengaruhnya ke seluruh Timur Tengah, di tengah konfrontasi antara Teheran dan Bagdad.

Di Iran perdebatan mengenai hukum undang-undang maupun ekonomi dan perbankan menyadari keunggulan penalaran al-Shadr. Di Irak, Pakistan dan Lebanon, jaringan sahabat serta murid al-Shadr dari Najaf menghasilkan beberapa pemimpin yang dikagumi oleh Kaum Syi'ah. Akan tetapi, pengaruh intelektual al-Shadr juga terlihat di daerah lain di Timur Tengah, yang menerima pemikirannya meskipun pemerintah sunni bersikap skeptis terhadap keulamaan hukum Syi'ah. Di Mesir dan Yordania, buku-bukunya diajarkan di Universitas, serta karya-karya kritisnya diterbitkan. Di Aljazair, yang gerakan Islamnya tidak memiliki pemikir orisinal untuk menyandarkan pandangan, konsep-konsep *Iqtishâdunâ* ditemukan di dalam terbitan *Front Islamique du Salut* (FIS).<sup>31</sup> Hanna Batatu, dalam sebuah artikel di *Middle East Journal* di Washington tahun 1981, menunjukkan pada orang-orang pentingnya Shadr bagi gerakan bawah tanah Syi'ah di Irak. Dalam artikel tersebut dia mengatakan : “Jadi tidak mungkin lagi mengabaikan nilai penting Muhammad

---

<sup>31</sup> John L Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 4...*, h. 154.



Bâqir Ash-Shadr dalam kebangkitan berbagai gerakan politik Islam, di Irak, di dunia Syi'ah dan di dunia Muslim pada umumnya”.

Kemunculan Buku *Iqtishâdunâ* sangat fenomenal dan dianggap pioner di bidangnya. Kemunculan buku ini juga menandai munculnya mazhab baru dalam pemikiran ekonomi khususnya ekonomi Islam. Pasca kemunculan buku ini pemikiran Bâqir al-Shadr dalam bidang ekonomi selanjutnya dikembangkan oleh beberapa Ekonom Muslim, seperti Abbas Mirakhor, Bâqir al-Hasani, Kadim al-Shadr,<sup>32</sup> Iraj Toutounchian,<sup>33</sup> dan Hedayati.

---

<sup>32</sup> Salah satu karyanya adalah *Iqtishâd from poin of View of Fiqh and Economics*

<sup>33</sup> Di antara karya tulisnya adalah *Theory of Demand and Economic Analysis of Infaq*

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG ILMU EKONOMI

#### A. Pengertian Dan Prinsip Ilmu Ekonomi

Ekonomi merupakan bagian vital yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapa pun orangnya, dari suku manapun, dari bangsa manapun, agama apapun, tidak akan terlepas dari aspek yang satu ini. Bagaimana tidak, sejak manusia dilahirkan, ia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Tingkah laku ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, Adam dan hawa ke permukaan bumi. Dan bisa dikatakan, sejak saat itu manusia sudah menjalankan prinsip ekonomi.<sup>1</sup> Akan tetapi sebagai sebuah ilmu yang tersusun secara sistematis ilmu ekonomi dianggap lahir pada tahun 1776 M seiring dengan munculnya buku yang ditulis oleh Adam Smith<sup>2</sup> yang berjudul *An Inquiry Into The Nature And Causes of the Wealth of Nation* atau lebih dikenal dengan buku *The*

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), h. 1.

<sup>2</sup> Adam Smith lahir di Kikalady, kota kecil di dekat Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1723. pada mulanya dia adalah seorang ahli filsafat yang memberi kuliah Moral Philosophy di Universitas Glasgow. Dalam buku *The Wealth of Nation* mengandung pemikiran dari Phytagoras, Democritus, Epicurus, Zeno, Plato dan Aristoteles. Di samping itu, intelektual Adam Smith tumbuh di bawah bimbingan Francis Hutcheson. Francis Hutcheson banyak dipengaruhi oleh Antony Ashley Cooper, yang lebih dikenal dengan Lord Shaftesbury dari kedua orang inilah kemungkinan Adam Smith berkenalan dengan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Di samping itu, setelah menyelesaikan studi di Glasgow, ia menghabiskan waktu enam tahun untuk penelitian di Oxford University, di mana disinyalir dia banyak bersentuhan dengan pemikiran Ibnu Khaldun tanpa ia sadari. Di antara karyanya (a) *The Theory of Moral Sentiments*, (b) *Lectures on Justice, Police, Revenue, and Arms*, (c) *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Lihat Euis Amalia, hal 3-24 dan Ibarahim M Oweiss, *Ibnu Khaldun Father of Economics*, [www.islamicworld.com](http://www.islamicworld.com).

*Wealth Of Nation* saja.<sup>3</sup> Kemunculan buku ini memicu lahirnya para pemikir ilmu ekonomi yang lain sehingga ilmu ekonomi berkembang dengan pesat sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri.

Kata “Ekonomi” berasal dari Bahasa Yunani “Oikonomia” yang terdiri dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos secara harfiah berarti rumah tangga sementara nomos berarti mengatur. Jadi arti asli dari kata “oikonomia” adalah mengatur rumah tangga. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Xenophone.<sup>4</sup>

Walaupun pada awalnya kata “ekonomi” ini terkesan khusus (rumah tangga), akan tetapi sejalan dengan perkembangan ekonomi menjadi suatu ilmu, arti asli tadi berkembang menjadi arti baru, yaitu pengetahuan yang tersusun menurut cara yang runtut dalam rangka mengatur rumah tangga.

P.A. Samuelson<sup>5</sup> mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya terbatas tetapi dapat

---

<sup>3</sup> Kemunculan buku ini menahbiskan Adam Smith sebagai Bapak Ilmu Ekonomi.

<sup>4</sup> Deliarov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), edisi revisi, h. 11.

<sup>5</sup> Paul Anthony Samuelson Lahir di Gary Indiana pada tahun 1915 dari keluarga Yahudi. Samuelson merupakan ekonom yang mengembangkan ilmu ekonomi dengan pendekatan matematika. Oleh karena itu, Samuelson dianggap sebagai tokoh yang paling bertanggungjawab dalam perkembangan ekonomi matematika pada akhir abad ke-20. Ia juga dikenalm sebagai sosok yang memperkenalkan ekonomi Keynesian di samping juga dianggap sebagai Bapak Ekonomi Makro Modern. Ia memperoleh pendidikan umum di Chicago, setelah itu melanjutkan studi di Universitas Chicago dengan mengambil konsentrasi pada jurusan matematika. Tahun 1941 Samuelson mendapatkan gelar Ph.D dari Universitas Harvard. Di usianya yang relatif muda tepatnya 32 tahun, Samuelson memperoleh gelar profesor penuh dari Intitut teknologi Massachussets. Atas kepiawaiannya dalam ekonomi matematika, pada tahun 1947 Samuelson menerima medali utama Jhon Bates Clark dari asosiasi ekonomi Amerika sebagai ahli ekonomi yang paling berbakat di bawah umur 40 tahun. Selain itu, pada tahun 1970 Samuelson memperoleh hadiah Nobel dalam bidang ilmu ekonomi dan juga pernah menjadi penasehat ekonomi Presiden John F Kenedy. Lihat Mark Skousen, *The Making of Modern Economics : The Lives and Ideas of Great Thinkers*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern : Sejarah Pemikiran Sosial*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-3, h. 437-442.

dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat.

Mankiw, sebagaimana dikutip Putong, mengatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya ilmu ekonomi kemudian bercabang-cabang mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi itu sendiri. Menurut Alfred W Stonier dan Douglas C Hague, Secara garis besar ilmu ekonomi bisa dibagi sebagai berikut :

1. *Descriptive Economics* / Ilmu Ekonomi Deskriptif

Yaitu ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau suatu Negara pada suatu masa tertentu. Seperti Ekonomi Indonesia Pada Tahun 70an, Ekonomi Dunia Pasca Perang Dunia.

2. *Economic Theory* / Ilmu Ekonomi Teori

Ilmu Ekonomi Teori kemudian terbagi kepada Ilmu Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro. Ilmu ekonomi teori ini membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2009), ed. Ke-3, h. 2-3.

Dalam hal ini makro ekonomi mengkaji tentang pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, inflasi, kebijakan fiskal dan lain sebagainya.

Ekonomi mikro menunjuk pada telaah cara bekerjanya sistem ekonomi yang dilakukan secara particular atau berkaitan dengan hal-hal yang bersifat lebih mendalam. Seperti pembentukan rumah tangga, rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen dan lain sebagainya.

### 3. *Applied Economics* / Ilmu Ekonomi Terapan

Ekonomi terapan merupakan penggunaan teori ekonomi pada masalah-masalah ekonomi tertentu. Dalam ekonomi terapan kita dapat melihat manfaat langsung teori ekonomi itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu ekonomi terapan ini kita mengenal adanya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi pembangunan dan lain sebagainya.

Di samping jenis ilmu ekonomi di atas, dalam literatur konvensional juga dikenal adanya ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Ilmu Ekonomi positif adalah ilmu ekonomi yang membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi, misalnya berapakah tingkat pengangguran hari ini. Sedangkan ilmu ekonomi normatif adalah ilmu ekonomi yang melibatkan pertimbangan etika dan nilai keadilan, seperti misalnya : haruskah sistem perpajakan diarahkan dalam kaidah mengambil

dari yang kaya untuk menolong yang miskin, atau haruskah orang miskin bekerja apabila mendapatkan bantuan pemerintah.<sup>7</sup>

Dalam ilmu ekonomi dikenal adanya prinsip ekonomi yang terdiri dari sepuluh prinsip dan merupakan ide pokok yang mendasari ilmu ekonomi, memahami sepuluh prinsip ekonomi bisa dikatakan *overview* dari bahasan ilmu ekonomi secara keseluruhan. Sepuluh prinsip ekonomi tersebut adalah :

Prinsip 1 : Kita selalu melakukan Trade Off (tarik ulur).

Tidak ada yang gratis di dunia. Ketika kita memilih sesuatu, sesuatu yang lain pasti kita korbankan. Pengorbanan ini bisa berupa waktu, uang, konsentrasi atau hal lain. Contoh klasik dari prinsip ini adalah tarik-ulur antara senjata dan mentega (*Gun and Butter*). Semakin besar pengeluaran pemerintah/Negara untuk membangun pertahanan (senjata), semakin sedikit sumber daya yang tersisa untuk memproduksi barang konsumsi (mentega). Begitu pula sebaliknya.

Prinsip 2 : Biaya adalah segala sesuatu yang anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu.

Terkadang kita melupakan pengertian biaya atau harga yang sebenarnya dari pilihan yang kita ambil. Konsep yang sering dilupakan adalah biaya kesempatan (*Opportunity Cost*), yaitu kesempatan yang hilang demi menjalankan suatu pilihan. Oleh karena itu, harga yang harus dibayar untuk S2 bukan Cuma biaya kuliah, buku, asrama dan biaya hidup saja. Biaya

---

<sup>7</sup> Paul A Samuelson dan William Nordhaus, *Economics*, ( New York : McGraw-Hill, 1998), cet. Ke-16, h. 8.

kesempatan yang timbul akibat kehilangan kesempatan bekerja dengan gaji yang layak seharusnya ikut masuk pertimbangan.

Prinsip 3 : Orang rasional berpikir secara bertahap/pada marjin.

Konsep orang rasional berarti seseorang akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan, sesuai dengan kesempatan yang ada. Bila dihadapkan kepada sejumlah pilihan, manusia diasumsikan mampu menghitung keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan yang kemudian menjatuhkan pilihan yang terbaik bagi dirinya, yaitu yang memberikan keuntungan yang maksimal.

Prinsip 4 : Orang selalu bereaksi terhadap insentif.

Insentif adalah segala sesuatu, baik berupa reward maupun punishment, yang membujuk seseorang untuk bertindak. Dalam ilmu ekonomi, insentif merupakan hal yang sangat krusial. Pengetahuan mengenai insentif dan apa reaksi orang terhadap insentif tersebut sangat penting untuk mengetahui kerja dan gerakan pasar, dan juga bagi para pembuat kebijakan.

Prinsip 5 : Perdagangan dapat menguntungkan semua pihak.

Prinsip 6 : Pasar secara umum adalah wahana yang baik guna mengkoordinasikan kegiatan ekonomi.

Prinsip 7 : Pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil kerja mekanisme pasar.

Walaupun pasar merupakan wahana yang baik untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, hal ini bukan berarti pemerintah tidak boleh mengintervensi kegiatan perekonomian.

Prinsip 8 : Standar hidup di suatu Negara tergantung pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa.

Prinsip 9 : Harga-harga akan meningkat apabila pemerintah mencetak uang terlalu banyak.

Prinsip 10 : Masyarakat menghadapi Trade Off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran.<sup>8</sup>

Sepuluh prinsip ekonomi di atas akan menjawab tiga pertanyaan besar dalam kegiatan ekonomi, yaitu bagaimana seseorang membuat keputusan untuk memenuhi kebutuhannya, bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana roda perekonomian berjalan secara umum.<sup>9</sup>

## **B. Munculnya Persoalan Ekonomi**

Persoalan Ekonomi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *The Economic Problem* atau *The Fundamental Economic Problem* merupakan salah satu teori ekonomi yang paling mendasar dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Dari definisi tentang ekonomi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa persoalan yang paling mendasar dalam ekonomi adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi/memuaskan keinginan manusia yang tidak terbatas (*the finite resources available are insufficient to satisfy all human wants*). Atau secara sederhana dapat dijelaskan : “*How do we satisfy unlimited wants with limited resources?*”. Situasi ini memunculkan fenomena yang disebut dengan *Scarcity* (kelangkaan). Untuk memecahkan masalah

---

<sup>8</sup> Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, (New York : South-Western College Pub, 2003), cet. Ke-19, h. 3-12.

<sup>9</sup> *Ibid*



tersebut dilakukan alokasi terhadap pilihan-pilihan yang menimbulkan kepuasan (utility) tertinggi bagi seorang individu. Dalam menentukan pilihan ini manusia diasumsikan sebagai *Homo Economicus* yang paling mengetahui keinginannya dengan prinsip yang dikenal dengan rasionalitas ekonomi.

Dari sinilah bermunculan teori ekonomi untuk mengatasi persoalan tersebut. Disebabkan adanya kelangkaan tersebut maka tidak ada barang ekonomis yang bisa didapatkan tanpa biaya (cost). Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang membuat pilihan. (*Problems of Choices*).

Di samping pemikiran di atas, kaum sosialis mengemukakan teori bahwa persoalan ekonomi sesungguhnya muncul karena kesenjangan antara produksi dengan proses distribusi. Apabila kesenjangan tersebut bisa dihilangkan maka stabilitas ekonomi akan terwujud.<sup>10</sup>

Kesenjangan tersebut muncul karena adanya perbedaan kelas di tengah masyarakat, yaitu kelas pekerja (proletar) dan pemilik modal (borjuis) yang memegang kapital. Kelas sosial ini akan menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat, kaum buruh akan semakin tertekan dengan kelas sosialnya. Sebaliknya kaum borjuis akan semakin berjaya. Maka untuk menghilangkan hal itu maka sistem perekonomian harus disentralisasi dengan memusatkan perekonomian itu pada pemerintah. Dengan sistem yang baru ini maka pemerataan akan dapat dilakukan, tidak ada lagi kepemilikan pribadi, yang ada hanya milik bersama secara kolektif.

---

<sup>10</sup> Muhammad Baqir Sadr, *Iqtishaduna...*, h. 347.

### C. Tanggung Jawab Negara Dalam Bidang Ekonomi

Keterlibatan Negara dalam perekonomian sangat berkaitan erat dengan ideologi ekonomi yang dianutnya, terutama pandangan ideologi yang dianut dalam memandang persoalan ekonomi. Ideologi ekonomi menjadi dasar pemerintah untuk menetapkan kebijakan di bidang ekonomi. Dalam perjalanan historisnya, umat manusia di bawah dominasi Barat telah mengalami dua ideologi ekonomi utama dalam kurun dua ratus tahun terakhir, yaitu kapitalisme<sup>11</sup> dan sosialisme.<sup>12</sup>

#### 1. Tanggung Jawab Negara Menurut Kaum Kapitalis

Konsepsi peran negara di bidang ekonomi dalam pandangan kaum kapitalis tidak bisa dipisahkan dari *Laissez faire, Laissez Passer*, yang secara harfiah berarti biarkan semuanya berjalan sendiri, biarkan barang-barang lewat. Dalam sistem kapitalisme, Negara tidak diperkenankan masuk terlalu jauh dalam interaksi ekonomi. Peran Negara di sini hanya terbatas pada tiga hal, yaitu :

*Pertama, Penegakan keadilan.* Peran ini diorientasikan untuk menjaga kebebasan tiap individu yang tertuang di dalam sistem pasar bebas yang didaulat sebagai sistem sosial masyarakat modern. Intervensi pemerintah baru dibutuhkan manakala terjadi ketimpangan dan

---

<sup>11</sup> Sistem Kapitalis dibangun di atas tiga kerangka dasar, yaitu : (a) Kelangkaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, (b) Nilai (value) suatu barang yang dihasilkan, itulah yang menjadi dasar penelitian ekonomi, dan (c) Harga (Price) memiliki peran vital dalam produksi, konsumsi dan distribusi, di mana harga merupakan alat pengendali. Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Magfur Wahid, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), h. 29-30.

<sup>12</sup> Sistem Sosialis dibangun di atas tiga prinsip dasar, yaitu : (a) Mewujudkan kesamaan (*equality*) secara ril, (b) Menghapuskan kepemilikan individu (*Private Proverty*), dan (c) Mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Lihat Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung : Alfabeta, 2010), cet. Ke-1, h. 6.

ketidakadilan dalam interaksi pasar bebas. Namun dalam situasi normal negara dilarang ikut campur tangan tanpa, sebab dengan masuknya Negara dalam kepentingan ekonomi setiap individu tanpa adanya alasan yang tepat, Negara dianggap melanggar kebebasan dan telah bertindak tidak adil.

Selain itu, untuk optimalisasi peran pemerintah dalam menjalankan keadilan, maka pemerintah harus juga bertindak adil dalam artian tidak memihak manapun yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan keadilan yang dimaksud.

1. Harus ada pemisahan dan kemerdekaan antara kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif.
2. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan. Pembatasan di sini adalah bahwa pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum dan keadilan.
3. terdapat jaminan akan berlangsungnya kekuasaan oposisi. Artinya dalam rangka untuk mengontrol kebijakan pemerintah, dibutuhkan sebuah kekuasaan di luar pemerintahan untuk menjamin dan mengawasi bahwa pemerintah akan senantiasa bertindak adil.

*Kedua*, Pertahanan Keamanan. Dengan peran ini dimaksudkan negara wajib melindungi seluruh warganya dari serangan dan ancaman negara lain.

*Ketiga*, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana serta lembaga-lembaga publik tertentu yang bisa menunjang dan meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti penyediaan jalan.<sup>13</sup>

Melalui tiga fungsi pemerintah dan negara di atas, para pengusung ideologi kapitalis yakin bahwa kesejahteraan akan dapat mudah terealisasi karena dengan bimbingan *Invisible Hand* (Tangan Gaib) sistem pasar bebas akan mampu menjawab segenap permasalahan dan pertanyaan selama ini yang berkenaan dengan bagaimana cara mendatangkan kesejahteraan.<sup>14</sup>

## 2. Peran Negara Di Bidang Ekonomi Menurut Kaum Sosialis

Aliran sosialisme muncul sejak abad XIX setelah kebobrokan sistem kapitalisme tersingkap secara sempurna. Tersingkapnya kebobrokan kapitalisme ini setelah masyarakat Eropa dan Rusia menderita akibat kezaliman sistem ini dan karena banyaknya kesalahan di dalamnya. Menurut Abdurrahman Al-Maliki, pada paruh pertama abad XIX, pemikiran-pemikiran sosialis ini hanya merupakan pemikiran-pemikiran yang berbentuk ide-ide konseptual (*Abhats Fikriyah*), dan tampak di dalam publikasi-publikasi terbatas seperti risalah-risalah(makalah) dan beberapa tulisan di media massa.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Hambali, *Peran Negara Di Bidang Ekonomi (Telaah Komparatif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Islam)*, tesis pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, h. 103-107.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *al-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla*, (terj.), (Jakarta : Al-Izzah, 2001), h. 8.

Sosialisme merupakan anti tesis dari sistem kapitalisme. Jika sistem Ekonomi Kapitalis tegak di atas pengkultusan terhadap kebebasan individu dan terlepas dari segala ikatan. Maka Sistem ekonomi Sosialis menghilangkan pemilikan individu dan kebebasannya dan menganggap semua kekayaan itu sebagai perisai pemerintahan. Dalam sistem sosialisme, sentralisasi perencanaan sistem ekonomi pemerintah adalah hal yang harus diutamakan. Masyarakat industri akan menjadi baik apabila diorganisaikan secara baik. Dan pemerintah harus memiliki peran penting di dalamnya.

Sebagaimana dikemukakan Karl Marx dalam konsepsi materialisme historis, Sosialisme merupakan bentuk masyarakat transisi dari sistem kapitalisme menuju sistem komunisme. Menurut Karl Marx sistem social masyarakat dari awal manusia sampai sekarang bergerak dan berkembang melalui lima tahapan pokok. Deskripsi perkembangan masyarakat tersebut diawali sistem masyarakat komunal primitif, perbudakan (*slavery*), feodalisme, kapitalisme dan sosialisme menuju masyarakat komunisme. Perkembangan-perkembangan tersebut, semua disebabkan oleh perkembangan tenaga-tenaga produktif atau factor ekonomi.<sup>16</sup>

Pertama, masyarakat komunal primitif, yaitu masyarakat yang proses produksinya masih mempergunakan alat-alat yang sangat sederhana. Pada tingkat ini alat-alat produksi dimiliki secara bersama

---

<sup>16</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi...*, h. 83

(komunal). Dalam masyarakat ini belum mengenal hak milik pribadi sehingga surplus value (nilai lebih) belum ada pada masa ini. Pola produksi pada saat itu masih terbatas pada kebutuhan konsumsi pribadi. Menurut para ahli bahwa ciri masyarakat primitif adalah terbatasnya produksi barang-barang pada kebutuhan individu dan tiadanya sistem politik yang terpisah dalam komunitas.

Kedua, masyarakat perbudakan (*slavery*), masyarakat ini tercipta berkat hubungan produksi antara orang-orang yang memiliki alat-alat produksi dengan orang-orang yang hanya memiliki tenaga kerja. Berawal dari cara produksi demikian ini menyebabkan berlipat gandanya keuntungan pemilik produksi. Pada tahap inilah masyarakat mulai terbelah menjadi kelas-kelas, yaitu pemilik alat produksi dan budak. Upah yang diterima kaum budak hanya sampai pada batas mempertahankan hidup saja.

Ketiga, Feodalisme, runtuhnya masyarakat perbudakan melahirkan bentuk masyarakat baru, yaitu feodalisme. Alat-alat produksi tersentral pada golongan bangsawan, terutama kaum tuan tanah. Sedangkan buruh tani yang berasal dari budak yang dimerdekakan. *Relation of Production* semacam ini melahirkan corak produksi baru, di mana kaum buruh tani lebih mendapatkan bagian yang layak dari kerjanya. Dari corak masyarakat ini lahir kelas baru dalam masyarakat, yakni tuan tanah dan buruh tani.

Keempat, masyarakat kapitalisme, munculnya perbedaan kepentingan pada masa feodalisme, yaitu kelas tuan tanah yang bertujuan untuk mendapatkan untung yang lebih besar, maka pengembangan wilayah pangsa pasar adalah keharusan. Dengan melakukan pendirian pabrik-pabrik kaum feodal ini mencari keuntungan. Akibatnya muncul perdagangan yang mencari pasar dan melemparkan hasil produksi yang selalu bertambah. Pada puncaknya kepentingan ini menjadi tidak terbendung. Dari sini lahir kelas kaya baru, yaitu borjuis yang menjelma pada sistem kapitalisme. Karakteristik yang menonjol pada sistem ini adalah kebebasan individu yang didasarkan pada hak milik atas alat-alat produksi. Dari relasi produksi ini muncul kelas baru, yaitu kelas borjuis dan proletar.

Kelima, masyarakat sosialisme, bentuk masyarakat yang dipahami oleh Marx sebagai masyarakat terakhir dari hasil evolusi sejarah. Pada masyarakat ini tidak ada hak milik, kelas dan pembagian kerja. Semuanya dikelola secara kolektif (bersama). Sosialisme merupakan tahapan masyarakat tradisional menuju masyarakat komunis, yaitu masyarakat tanpa Negara dan kelas. Dalam sosialisme Negara masih ada hanya saja fungsinya sudah jauh berkurang dan melemah, yaitu hanya sebagai alat mempertahankan hasil revolusi dari serangan balik kaum borjuis. Negara dalam hal ini adalah dalam bentuk kediktatoran proletariat yang bertugas untuk memangkas sisa-sisa kelas borjuis yang ada. Selain itu Negara dalam perkembangannya adalah sesuatu yang harus dilenyapkan sebab

dalam pemikiran sosialisme Marx Negara merupakan perwujudan dari sistem kelas. Sebagai pengganti keberadaan pemerintahan dan komando, maka kehidupan dalam sistem sosialisme komunisme adalah dipegang oleh kediktatoran proletariat yang termanifestasi dalam partai tunggal, yakni komunisme.<sup>17</sup> Partai ini berwenang mengorganisasi seluruh dimensi kehidupan dalam sistem sosialisme komunisme. Oleh karena itu dalam diskursus kekinian sistem sosialisme komunis adalah sistem yang menjadi lawan dari bentuk pemerintahan yang demokratis. Di bawah kediktatoran proletariat seluruh tenaga-tenaga produktif yang telah dikuasai kaum kapitalis dinasionalisasikan. Semua hak milik pribadi dinasionalisasikan menjadi hak milik bersama. Sistem pembagian kerja diwujudkan dalam bentuk perlakuan bahwa seluruh masyarakat adalah karyawan atau buruh bagi Negara dengan persamaan upah yang ketat. Seluruh proses produksi dikendalikan oleh Negara (kediktatoran proletariat).<sup>18</sup>

Landasan teori yang terejawantahkan pada fase ini adalah bahwa setiap orang harus memberikan sesuai dengan kecakapannya dan setiap orang harus diberikan sesuai dengan kebutuhannya (*From each according to his ability, to each according to his needs*).<sup>19</sup>

Kaidah tersebut, mengindikasikan bahwa proses produksi pada fase sosialisme adalah didasarkan pada kecakapan individu-individu dalam

---

<sup>17</sup> Dalam suratnya kepada seorang teman, Lenin pernah mengatakan "tidak mengapa membunuh tiga per empat penduduk dunia asalkan seperempat sisanya menjadi sosialis. Lihat Yusuf Qardhawi, *Malâmiḥ al-Mujtama' al-Muslim Alladzî Nansyuduh*, (terj), *Sistem Masyarakat Dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta : Citra Islami Press, 1997), cet. Ke-1, h. 56.

<sup>18</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi...*, h. 83-86.

<sup>19</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer...*, h. 6.



bekerja. Kerja pada fase ini adalah sebagai sarana obyektivasi setiap individu, sehingga kerja bukanlah pekerja paksaan sebagaimana dalam kapitalisme, melainkan kerja atas dasar kebebasan dan Universalitas manusia.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan, bahwa berkaitan dengan peran pemerintah dalam bidang ekonomi, ada dua ide besar yang berkembang di dunia sejauh ini, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme dengan *Laissez Faire*-nya menghendaki ketiadaan atau peran minimal negara dalam bidang ekonomi. Anti tesis dari pandangan tersebut adalah pandangan kaum sosialis yang cenderung mengusung peran sentral negara dalam bidang ekonomi melalui sistem perencanaan yang sentralistik.

#### **D. Konstitusi Ekonomi Di Berbagai Negara**

Kapitalisme dalam bentuk klasiknya *Laissez Faire* telah menghilang dari peredaran. Ia telah mengalami modifikasi. Pemerintah telah ikut campur tangan secara ekstensif untuk memperbaiki dan menutup kekurangannya, setidaknya sebagian dari, beberapa dampak kerugian atas modal (*Equity*).<sup>20</sup> Sementara bentuk murni sosialisme atau komunisme sebagaimana yang dicitakan Karl Marx juga sudah tidak ada lagi di dunia. Untuk melihat seperti apa keterlibatan negara dalam bidang ekonomi di beberapa negara dapat dilihat dari konstitusi ekonomi yang ditetapkan di negara tersebut seperti terlihat di bawah ini.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 2.

## 1. Konstitusi Ekonomi di Negara Liberal-Kapitalis

Konstitusi negara-negara liberal-kapitalis pada umumnya tidak memuat ketentuan mengenai dasar kebijakan ekonomi dalam naskah undang-undang dasarnya. Dalam kelompok ini kita juga bisa membedakan antara negara-negara Anglo-Amerika beserta negara-negara anggota *Commonwealth* yang menganut tradisi *Common Law* dengan negara-negara Eropa Kontinental dengan tradisi *Civil Law*.

Pada negara-negara *Common Law* yang mengikuti tradisi hukum Inggris, masalah-masalah perekonomian dipandang sebagai fenomena pasar (market) yang berkembang dalam dinamika masyarakat sendiri, sehingga tidak memerlukan pengaturan yang ketat oleh negara. Sehingga persoalan ekonomi tidak disinggung dalam konstitusi atau undang-undang mereka. Yang lebih fleksibel adalah konstitusi tertulis negara-negara Eropa Barat Kontinental yang menganut tradisi *Civil Law*. Walau menganut paham kapitalisme-liberalisme, tetapi kebiasaan negara-negara ini untuk menuangkan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam bentuk hukum tertulis, pada perkembangannya menjadi kebutuhan untuk menulis kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut dalam bentuk undang-undang (*Legislative Acts*) dan bahkan lebih tinggi lagi dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi.

Contoh dari negara-negara yang menganut *Common Law* adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia dan Kanada. Sementara negara-negara yang menganut *Civil Law* antara lain adalah Perancis, Jerman, Belanda,

Swedia, Belgia, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia dan negara Eropa lainnya.

Konstitusi Amerika Serikat terdiri dari 8 bagian. Yaitu *Preamble* yang memuat *Statement of Power*, *Article One* tentang *Legislative Power*, *Article Two* yang memuat *Executive Power*, *Article Three* tentang *Judicial Power*, *Article Four* tentang *States Power and Limit*, *Article Five* tentang *Amandements*, *Article Six* tentang *Federal Power*, dan *Article Seven* tentang *Ratification*. Sejak ditetapkan pada tahun 1878,<sup>21</sup> Konstitusi Amerika Serikat telah mengalami 27 kali amandemen. Dalam naskah asli maupun amandemen konstitusi tersebut, tidak ditemukan satu pasal atau satu ayatpun yang mengatur persoalan hak-hak ekonomi, apalagi mengenai sistem perekonomian seperti yang lazim ditemukan di negara-negara sosialis komunis. Kalaupun ada pasal yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan, hanya yang berhubungan dengan kebijakan administrasi negara di bidang keuangan (moneter), perpajakan (fiskal), dan anggaran (budgeting).<sup>22</sup>

Di Australia, undang-undang tertinggi adalah *the Commonwealth of Australia Constitution Act 1990*, konstitusi ini terdiri atas 128 section yang dikelompokkan ke dalam 8 chapter. Dari kesemua materinya, tidak satupun yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Yang ada hanya ketentuan mengenai administrasi keuangan negara, seperti anggaran dan

---

<sup>21</sup> Konstitusi Amerika dianggap asebagai kontitusi pertama di zaman modern, dikatakan di zaman modern, karena jauh sebelumnya sudah ada konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia, yaitu Piagam Madinah (Madinah Charter) yang sudah ada sejak tahun 623 M.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta : Kompas, 2010), h. 125-131.

perpajakan yang juga terdapat dalam konstitusi Amerika Serikat, ditambah dengan ketentuan yang dimaksudkan untuk sekedar menjaga integrasi ekonomi nasional sebagai kesatuan ekonomi.<sup>23</sup>

Di samping negara-negara *Common Law* di atas, beberapa negara yang menganut *Civil Law* sudah mulai fleksibel dalam memuat persoalan ekonomi ke dalam konstitusi mereka. Perancis misalnya, sejak tahun 1958, ketentuan mengenai ekonomi sudah mulai disinggung di dalam konstitusi mereka walaupun itu hanya berkenaan dengan bentuk lembaga negara yang diberi tanggung jawab konstitusional untuk kebijakan ekonomi (Dewan Ekonomi dan Sosial). Adapun mengenai substansi kebijakan serta apa ideologi kebijakan ekonomi yang harus dijadikan landasan dalam merancang dan menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial itu sama sekali tidak dimuat dalam konstitusi.<sup>24</sup>

Di Spanyol, dasar-dasar kebijakan ekonomi diatur dalam Bagian VII Konstitusi Spanyol tahun 1978. Dalam bagian tersebut dinyatakan : (a) Keseluruhan kekayaan negara dalam pelbagai bentuknya, terlepas dari siapa pemiliknya, tunduk kepada kepentingan umum, (b) inisiatif masyarakat dalam perekonomian diakui. Cabang produksi dan pelayanan yang penting dapat ditentukan dengan undang-undang sebagai sektor publik yang dimonopoli oleh negara. Tindakan intervensi oleh negara dalam kegiatan perusahaan dapat dilakukan apabila kepentingan umum

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 131-133.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 134-136.

menghendaki.<sup>25</sup> Selanjutnya dalam section berikutnya dinyatakan (c) bentuk-bentuk keikutsertaan dalam program Social Security dan kegiatan badan-badan publik yang secara langsung berkaitan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan umum, (d) pemerintah secara efisien mempromosikan berbagai bentuk keikutsertaan dalam perusahaan dan mendorong masyarakat koperasi dengan perundang-undangan. Pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kesempatan bagi pekerja untuk turut serta dalam kepemilikan usaha, (e) pemerintah memajukan modernisasi dan pengembangan semua sektor ekonomi pada umumnya, dan khususnya dalam bidang pertanian, logistik, perikanan dan kerajinan, untuk meningkatkan standar hidup sehingga seluruh rakyat Spanyol mencapai taraf kehidupan yang sama, (f) dengan tujuan yang sama, perlakuan khusus akan diberikan kepada daerah pegunungan.

## 2. Konstitusi Ekonomi di Negara Komunis

Konstitusi di semua negara komunis selalu memuat ketentuan mengenai perekonomian. Di Republik Rakyat China (RRC), aturan mengenai ekonomi dimuat di dalam konstitusi negara tersebut, yaitu Konstitusi 1982 pasal 6, 9, 10 dan 11.

Dalam pasal 6 dinyatakan : “dasar sistem ekonomi sosialis Republik Rakyat China adalah kepemilikan umum sosialis terhadap faktor-faktor produksi yaitu kepemilikan kepemilikan oleh seluruh rakyat dan kepemilikan kolektif oleh rakyat pekerja. Kepemilikan publik sosialis

---

<sup>25</sup> Section 128 Bagian VII Konstitusi Spanyol tahun 1978.

menggantikan sistem eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain. Sistem ini menerapkan prinsip bahwa setiap orang memberikan sesuai dengan kemampuannya dan mendapatkan sesuai dengan kerjanya”. Demikian pula dalam pasal 7 ditegaskan : “Perekonomian negara adalah perekonomian sosialis di bawah kepemilikan oleh seluruh rakyat, hal ini merupakan kekuatan utama dalam perekonomian nasional. Negara memastikan konsolidasi dan pertumbuhan perekonomian negara”.

Pasal 9 menyatakan : “Sumber daya mineral, air, hutan, gunung, padang rumput, padang belantara, pantai dan sumber daya alam lain dimiliki oleh negara, yaitu oleh seluruh rakyat dengan pengecualian hutan, gunung, padang rumput, padang belantara, pantai dan sumber daya alam lain yang dimiliki secara bersama-sama yang diatur oleh undang-undang. Negara menjamin pemakaian rasional dari sumber daya alam dan melindungi hewan dan tumbuhan langka. Pengambilan atau pengrusakan terhadap sumber daya alam oleh organisasi dan individu mana pun adalah dilarang”.

Selanjutnya dalam pasal 10 dijelaskan : “tanah di kota-kota dimiliki oleh negara, sementara tanah yang berada di luar perkotaan dimiliki oleh masyarakat secara kolektif kecuali bagian-bagian tertentu yang dimiliki oleh negara berdasarkan undang-undang. Tidak ada organisasi atau individu yang boleh mengambil, membeli, menjual atau menyewa tanah, atau secara ilegal memberikan tanah tersebut kepada pihak lain. Semua organisasi atau individu yang menggunakan tanah harus

mempergunakannya secara rasional”. Sedangkan dalam artikel 11 disebutkan : “perekonomian individu dari rakyat pekerja di kota dan di desa, yang dilaksanakan dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang, adalah kelengkapan terhadap perekonomian publik sosialis. Negara melindungi hak dan kepentingan perekonomian individu. Negara membimbing, membantu dan mengawasi perekonomian individu dengan administrasi yang rapi”.

Sementara Kuba, Negara komunis terbesar di Benua Amerika, meski telah mengalami beberapa kali pergantian konstitusi, akan tetapi aturan tentang ekonomi dalam konstitusi ekonomi negara tersebut tetap dipertahankan. Sebagai negara merdeka, Kuba menentukan kedaulatannya dalam pasal 11 atas lingkungan hidup dan kekayaan alam, atas mineral, perkebunan, dan sumber-sumber hewani di atas dan di dalam tanah, dan di dasar laut di zona ekonomi maritim yang diakui oleh hukum dan praktik negara. Pasal 14 lebih lanjut menegaskan bahwa Kuba menganut sistem ekonomi sosialis yang didasarkan atas pemilikan rakyat sosialis atas sumber-sumber produksi dengan cita-cita penghapusan eksploitasi manusia atas manusia. Dengan tegas dinyatakan bahwa prinsip distribusi yang berlaku di Kuba adalah “dari setiap orang sesuai dengan kapasitasnya, dan untuk setiap orang sesuai dengan pekerjaannya”.

Dalam Pasal 15 Konstitusi Kuba 1992 dinyatakan, bahwa kekayaan negara sosialis, sebagai kekayaan milik seluruh rakyat, meliputi (a) tanah yang tidak dimiliki oleh petani kecil atau koperasi yang mereka

bentuk, lapisan bawah tanah, tambang, mineral, perkebunan dan sumber-sumber hewani di zona ekonomi Kuba, hutan, perairan sarana dan prasarana komunikasi, dan (b) pabrik gula, pabrik-pabrik, sarana transportasi utama dan semua bank dan fasilitas yang telah dinasionalisasi dan diambil alih dari para imperialis, tuan tanah, dan kaum borjuis, serta pabrik-pabrik, perusahaan, dan fasilitas ekonomi dan fasilitas pusat-pusat ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan olahraga yang telah atau yang akan dibangun, dipelihara, atau dibeli oleh negara di masa yang akan datang. Semua kekayaan tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pribadi atau badan hukum, kecuali atas hal-hal yang dapat disetujui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.<sup>26</sup>

Di Vietnam, salah satu negara komunis di Asia Tenggara, aturan tentang ekonomi dibahas dalam bab tersendiri, yaitu Bab II tentang “*The Economic Sistem*” yang terdiri dari 15 pasal.

Di samping konstitusi negara-negara komunis di atas, menarik juga untuk disinggung sistem ekonomi di negara eks-komunis. Rusia, yang merupakan negara bekas komunis Uni Soviet, telah melakukan perubahan mendasar dalam sistem ekonominya. Seiring dengan deklarasi kemerdekaan Negara Rusia pada tanggal 24 Agustus 1991 dan pembubaran Uni Soviet pada tanggal 21 Desember 1991, maka dua tahun berikutnya, yaitu pada tanggal 12 Desember 1993, maka berlakulah konstitusi baru, yaitu Konstitusi Federasi Rusia tahun 1993. Melalui

---

<sup>26</sup> *Ibid*



konstitusi ini, telah terjadi liberalisasi yang sangat mendasar. Pasal-pasal tentang *Economic Sistem* yang bercorak sosialis tidak ditemukan lagi di dalam konstitusi tersebut.<sup>27</sup> Digantikan dengan pasal-pasal yang bersifat liberal, seperti pasal 35 Konstitusi Rusia tahun 1993 yang mengatakan bahwa hak milik pribadi dilindungi undang-undang, dan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, menguasai, menggunakan, dan mengelolanya sendiri, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain.<sup>28</sup>

### 3. Konstitusi Ekonomi Indonesia

Indonesia bukanlah negara komunis dan juga bukan negara kapitalis, akan tetapi persoalan ekonomi dibahas di dalam bab tersendiri pada undang-undang tertinggi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tentang ekonomi dibahas di dalam Bab XIV, yaitu bab tentang “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Pasal-pasal yang dirumuskan dalam bab tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 33 :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,

---

<sup>27</sup> Pasal Bab 2 Konstitusi USSR Komunis mengatakan : hak milik negara, menentukan bahwa : (1) kekayaan negara, yaitu kekayaan bersama seluruh rakyat Soviet, adalah bentuk utama dari kekayaan sosialis, dan (2) tanah dan mineral, air dan hutan merupakan kekayaan negara yang bersifat eksklusif.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 136-145.

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 :

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara,
- (2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), cet. Ke-7, h. 25-26.

## BAB IV

### PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BÂQIR AL-SHADR

#### A. Iqtishâd dan Ekonomi Menurut Muhammad Bâqir Al-Shadr

##### 1. *Defenisi Ekonomi Islam*

##### *Ekonomi Islam adalah Doktrin, Bukan Ilmu*

Bâqir al-Shadr memandang ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin yang direkomendasikan Islam. Maka sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep ekonomi yang ia tawarkan, terlebih dahulu ia membuat perbedaan yang signifikan antara ilmu ekonomi dan doktrin (mazhab) ekonomi. Dalam hal ini Bâqir Al-Shadr mengatakan :

فعلم الاقتصاد هو: العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادية وأحداثها وظواهرها، وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي تتحكم فيها.<sup>1</sup>

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mencakup penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ*, (Beirut : Dâr al-Ta'âruf li al-Mathbû'ât, 1981), h. 29.

Definisi ini jika dirujuk kepada paradigma konvensional dapat ditemukan dalam pemikiran Samuelson yang menyatakan bahwa “Ilmu ekonomi merupakan ilmu mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menentukan atau menjatuhkan pilihan dengan atau tanpa uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan-penggunaan alternatif untuk memproduksi berbagai barang serta membaginya untuk dikonsumsi baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang kepada berbagai golongan dan kelompok di dalam masyarakat”.<sup>2</sup>

وأما المذهب الاقتصادي للمجتمع فهو: عبارة عن الطريقة التي يفضل  
المجتمع أتباعها في حياته الاقتصادية، وحل مشاكلها العملية.<sup>3</sup>

Sedangkan mazhab<sup>4</sup> atau doktrin ekonomi adalah sebuah nama yang dipakai untuk mengungkapkan cara atau metode yang dipilih dan diikuti oleh suatu masyarakat dalam kehidupan ekonomi mereka dan dipergunakan memecahkan setiap problem praktis yang mereka hadapi.

Al-Shadr selanjutnya menyatakan bahwa perbedaan yang signifikan dari kedua terminologi di atas adalah bahwa doktrin ekonomi berisi setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi

---

<sup>2</sup> Paul A Samuelson dan William Nordhaus, *Economics*, ( New York : McGraw-Hill, 1998), cet. Ke-16, h. 4

<sup>3</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h. 30.

<sup>4</sup> Dalam kamus Arab Inggris al-Maurid kata “*Madzhab*” diartikan dengan *Faith, Belief, Creed, Doctrine, Teaching, Ideology*, dan *School*. Lihat, Rohi Baalbaki, *al-Maurid Qâmus `Arabi-Injilizi*, (Beirut : Dar al-‘Ilm Lilmalayin, 1995), h.1012.

seperti nilai-nilai keadilan.<sup>5</sup> Sementara ilmu ekonomi berisikan setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi yang terpisah dari kerangka ideologi. Dengan demikian, Al-Shadr menyimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan sebuah doktrin dan bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan,<sup>6</sup> karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya.<sup>7</sup> Lebih lanjut Bâqir Al-Shadr mengatakan :

الاقتصاد الإسلامي: المذهب الاقتصادي منظوراً إليه في إطاره الكامل،  
وفي ارتباطه بالرصيد الفكري الذي يعتمد عليه، ويفسر وجهة نظر  
المذهب في المشاكل التي يعالجها.<sup>8</sup>

Ekonomi Islam adalah doktrin ekonomi yang ditinjau dari keutuhan kerangkanya dan keterkaitannya dengan keseimbangan intelektual di mana ia bergantung dan yang menjelaskan sudut pandang ekonomi dalam hubungannya dengan isu-isu yang terkait dengannya.

Untuk melihat lebih jelas bagaimana perbedaan antara ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi dapat dilihat pada contoh berikut. Ketika

---

<sup>5</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h. 290-294.

<sup>6</sup> Ilmu (*science*, '*ilm*') adalah suatu bidang studi atau pengetahuan yang sistematis untuk menerangkan suatu fenomena dengan acuan materi dan fisiknya melalui metode ilmiah. Ilmu bukanlah mistik, kepercayaan atau dongeng, tetapi didapat dengan metode ilmiah yang baku. Ada juga pendapat yang mendefinisikan ilmu sebagai "*a means of solving problems*" (suatu cara yang bisa digunakan menyelesaikan masalah). Pendapat lain mengatakan ilmu sebagai "*organized knowledge*" (pengetahuan yang diorganisir (sistematis). Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, cet. kesembilan, 1991), h. 6-7 dan John Ziman FRS, *An Introduction to Science Studies, the Philosophical and Social Aspects of Science and Technology*, (New York: Cambridge University Press, 1984), h. 1.

<sup>7</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h. 378.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 31.

Ricardo mengatakan bahwa bagian (*share*) yang didapat buruh dari kekayaan yang dihasilkan (*produced wealth*) yang dilambangkan dengan upah, dalam keadaan apapun jumlahnya tidak akan melebihi apa yang sekedar mencukupi kebutuhan hidup,<sup>9</sup> ia tidak mengemukakan sesuatu yang bersifat doktrinal, ia juga tidak memaksudkannya sebagai peraturan yang dapat dipakai oleh negara dalam membentuk suatu sistem pembayaran upah, seperti halnya sistem kepemilikan privat (pribadi) dan kebebasan ekonomi. Ia hanya mencoba menjelaskan realitas yang dijalani oleh para buruh dan hasil niscaya dari realitas itu.<sup>10</sup>

Lebih lanjut mazhab Bâqir Al-Shadr mengemukakan bahwa ada tiga hal yang membedakan antara ilmu ekonomi dengan mazhab ekonomi, yaitu :

- a. Ilmu ekonomi dan mazhab ekonomi berbeda dalam tujuan. Tugas ilmu ekonomi adalah untuk menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi. Sedangkan tugas doktrin (mazhab) ekonomi adalah menyusun suatu sistem berdasarkan keadilan sosial (*al-`Adâlah al-Ijtimâ`iyyah*) yang sanggup mengatur kehidupan ekonomi umat manusia.
- b. Doktrin atau mazhab ekonomi adalah sistem, sementara ilmu ekonomi merupakan interpretasi/penafsiran.

---

<sup>9</sup> Penjelasan pertama tentang upah, yakni *Subsistence Theory*, menekankan bahwa konsumsi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan memelihara populasi pekerja adalah faktor utama yang menentukan level upah. Teori ini dicetuskan oleh para ekonom merkantilis, dijabarkan oleh ekonom Skotlandia Adam Smith (1723-1790), dan disempurnakan oleh ekonom Inggris David Ricardo (1772-1823).

<sup>10</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishâdunâ*, (terj) Yudi, (Jakarta : Zahra, 2008), h. 82-83.

- c. Ilmu Ekonomi dan mazhab ekonomi berbeda dalam hal metode dan tujuan, akan tetapi tidak berbeda dalam hal materi pembahasan dan ruang lingkup. Pada saat yang bersamaan, seperti saat membahas produksi dan distribusi, seseorang akan membahas doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi sekaligus.<sup>11</sup>

Sebagai seperangkat peraturan, Islam datang bukan untuk menemukan fenomena kehidupan ekonomi dan sebab-sebabnya, ia pun tidak semestinya diharapkan untuk menyatakan hukum-hukum ilmu ekonomi. Islam datang untuk mengatur kehidupan ekonomi dan untuk tujuan itu ia menyusun suatu sistem yang berdasarkan keadilan sosial.

Keadilan pada dasarnya bukanlah suatu gagasan ilmiah, ia adalah doktrin karena merupakan sesuatu yang sangat ditekankan oleh sebuah ideologi. Namun jika sebuah gagasan didasarkan kepada doktrin keadilan, maka gagasan tersebut serta merta mendapatkan label doktrinal yang membuatnya berbeda dari pemikiran ilmiah. Jadi, prinsip kepemilikan privat, kebebasan ekonomi, penghapusan sistem bunga, atau nasionalisasi sarana-sarana produksi, semuanya semuanya bisa dikatakan doktrin apabila dikaitkan dengan gagasan keadilan. Sementara hukum hasil yang berkurang,<sup>12</sup> hukum permintaan dan penawaran,<sup>13</sup> atau hukum upah besi<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam : Mengkaji Sistem Ekonomi Barat Dalam Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), cet. Ke-11, h. 155.

<sup>12</sup> *Law of Diminishing Returns* adalah hukum ekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan kuantitas satu faktor produksi (seperti tanah, buruh atau kapital) tanpa adanya perubahan pada faktor-faktor yang lain dalam produksi akan mengarah kepada tambahan (pertumbuhan) hasil yang semakin berkurang.

<sup>13</sup> *Law of Supply and Demand* adalah hukum ekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan kuantitas suplai suatu komoditas, sementara permintaannya dan faktor-faktor lainnya

merupakan aturan ilmiah karena tidak ada sangkut pautnya dengan evaluasi fenomena-fenomena ekonomi itu. Hukum hasil yang berkurang tidak bisa menentukan apakah hasil yang berkurang itu adil atau tidak. Ia hanya mengungkapkan hasil yang berkurang sebagai fakta objektif yang tetap. Seperti itu pula, hukum suplai dan permintaan tidak bisa menyatakan adil atau tidaknya kenaikan harga akibat kelangkaan suplai atau peningkatan permintaan. Ia hanya menunjukkan hubungan objektif yang berbanding terbalik antara harga dan kuantitas suplai serta permintaan sebagai salah satu konsekuensi pasti dari pasar kapitalis. Begitu pula halnya dengan hukum upah besi. Ia hanya mengungkapkan realitas positif di mana para buruh selalu menerima upah yang tidak jauh dari level “sekedar mempertahankan hidup”. Ia tidak mempersoalkan adil tidaknya bagian para buruh yang begitu kecil. Faktanya, semua hukum ilmiah tidak didasarkan pada ideologi keadilan, akan tetapi hanya didasarkan kepada deduksi (kesimpulan) yang diambil dari kenyataan yang ada serta pengamatan terhadap berbagai manifestasinya yang berbeda. Lain halnya dengan hukum-hukum doktrinal, yang selalu melekat pada suatu ideologi keadilan tertentu.<sup>15</sup>

---

tetap, akan menurunkan harga komoditas tersebut, begitu pula sebaliknya. Juga bila kuantitas permintaan akan suatu komoditas meningkat, sementara supplainya dan faktor-faktor lainnya tetap, hal ini akan menaikkan harga komoditas tersebut, begitu pula sebaliknya.

<sup>14</sup> Teori ini dikemukakan Ferdinand Lassalle. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori upah alami (*Natural Wage*) yang dikemukakan oleh David Ricardo, menurutnya penentuan upah yang diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh David Ricardo, kecenderungannya akan menekan ke bawah sehingga pekerja terpaksa menerima upah rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Hal ini disebabkan karena pengusaha selalu ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Solusi dari hal ini, menurut Lassalle adalah dengan membentuk serikat pekerja.

<sup>15</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h. 330-335.



### ***Doktrin Ekonomi Bukanlah Fiqh Muamalah***

Meskipun Al-Shadr mengakui bahwa pendekatannya bersifat hukum, ia menolak jika dikatakan bahwa Ekonomi Islam itu sama saja dengan *Fiqh Mu`âmalah* ataupun hukum-hukum yang berhubungan dengan hak kepemilikan (Hukum Perdata/*Qanun Madani*). Dalam hal ini Shdar mengatakan :

يجب أن نعرف الفرق بين المذهب الاقتصادي والقانون المدني أيضاً، فإن المذهب هو: مجموعة من النظريات الأساسية التي تعالج مشاكل الحياة الاقتصادية، والقانون المدني هو: التشريع الذي ينظم تفصيلات العلاقات المالية بين الأفراد وحقوقهم الشخصية والعينية.<sup>16</sup>

Kita harus mengetahui juga perbedaan antara doktrin ekonomi dengan hukum perdata. Sesungguhnya doktrin ekonomi adalah kumpulan teori dasar yang dipakai untuk memecahkan masalah dalam kehidupan ekonomi, sementara hukum perdata (*Fiqh Mu`âmalah*) adalah undang-undang yang mengatur hubungan moneter (yang berkaitan dengan uang dan harta) antar individu secara detail.

Meski secara teoritis ada perbedaan yang jelas antara doktrin ekonomi dengan hukum perdata/*Fiqh Mu`âmalah*, akan tetapi harus diingat bahwa keduanya merupakan komponen dari satu kesatuan organik yang solid yang memiliki hubungan yang sangat kuat dan erat. Doktrin ekonomi Islam adalah fondasi tempat terbentuknya hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah. Hukum-hukum tersebut ditetapkan di dalam semangat,

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 384.

dan berkenaan dengan teori-teori serta konsep-konsep yang diwakili oleh doktrin itu. Dengan demikian, doktrin adalah pondasi bagi terbentuknya hukum perdata.

Dalam hubungan ini, Al-Shadr yakin akan adanya suatu “sistem ekonomi yang telah selesai terbentuk dengan sempurna” meskipun barangkali belum secara eksplisit ternyata dalam sumber-sumber Islam. Oleh karenanya, Al-Shadr mengemukakan gagasannya berupa proses penemuan (*‘Amaliyyah Iktisyâf al-Madzhab al-Iqtishâdi*). Di dalam proses penemuan tersebut, semua hukum dan aturan ekonomi, bersama-sama dengan sejumlah besar konsep yang berhubungan dengan ekonomi dan masyarakat, dipelajari bersama dan kemudian dipakai untuk menemukan doktrin ekonomi. Dengan kata lain, jika hukum-hukum telah dikumpulkan, maka fondasi doktrin hukum-hukum itu pun akan dapat diketemukan di dalam sumber-sumber Islam. Untuk itu diperlukan ijtihad, yang oleh Al-Shadr dipandang amat penting untuk mengisi celah antara prinsip-prinsip yang bersifat tetap dan permanen dengan hukum-hukum yang bersifat fleksibel, menentukan batas-batas penyelidikan dan secara teoritis mengatur hukum-hukum dan konsep-konsep di dalam suatu keseluruhan yang saling bertalian secara logis.<sup>17</sup>

### ***Ekonomi Islam Harus Beroperasi Dalam Sistem Islam***

Islam adalah suatu sistem yang menyeluruh dan mencakup semua segi kehidupan manusia. Ia memberikan bimbingan dalam semua bidang

---

<sup>17</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Muslim Economic Thought : a Comparative Analysis*, terj. Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer : Analisa Komparatif Terpilih*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), h. 134-135.

kehidupan.<sup>18</sup> Al-Shadr melihat Sistem Ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem Islam secara keseluruhan,<sup>19</sup> dan bersiteguh bahwa ia haruslah dipelajari sebagai suatu keseluruhan interdisipliner, bersama dengan seluruh anggota masyarakat yang merupakan agen-agen sistem Islam itu. Ia menyarankan agar orang memahami dan mempelajari pandangan dunia (*Worldview*) Islam lebih dulu jika ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dalam menganalisis sistem ekonomi Islam. Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, disusunlah teori-teori baru dalam ekonomi yang langsung digali dan dideduksi dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Salah satu konsekuensi dari pernyataan di atas adalah *Rational Economic Man* yang merupakan sosok manusia sebagai *Homo Economicus* yang diyakini dalam ilmu ekonomi harus diganti dengan model *Islamic Man*. *Islamic Man* merupakan individu yang merasa sebagai bagian dari keseluruhan ummah, serta dilandasi oleh ruh dan praktik keagamaan. Jika *Rational Economic Man* hanya terpaku kepada dunia materi, maka *Islamic Man* juga beriman kepada dunia spiritual, dan hal ini telah menjadikannya tidak begitu melekat pada dunia materi. Hal itu berakibat munculnya pengertian yang berbeda tentang *Rationality* atau perilaku rasional. Jika

---

<sup>18</sup> Bimbingan Islam dalam bidang ekonomi bisa digali dari Al-Qur'an sebagai sumber primer dalam Islam. Kemudian dari Hadis Rasulullah SAW yang digali dari perkataan beliau, sikap beliau sebagai seorang konsumen, kepala rumah tangga, produsen melalui perdagangan, kepala Negara yang mengemban tugas menjaga kesejahteraan umatnya dengan membimbing mereka dalam aktifitas ekonomi, memberikan arahan dan kadang-kadang menetapkan aturan pasar, serta mengelola kekayaan public. Lihat Abbas Mirakhor, *A Note On Islamic Economics*, dalam Bâqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, *Essays on Iqtishâd : The Islamic Approach to Economic Problem*, (Silver Spring : Nur, 1989), h.13.

<sup>19</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h, 330.

*Rational Economic Man* semata-mata dimotivasi oleh kepuasan pribadi, maka *Islamic Man* juga dipandu oleh pengawas dari dalam.

Sebagai hamba yang percaya akan eksistensi Tuhan, maka *Islamic Man* juga percaya dengan konsep kekhalifahan<sup>20</sup> yang menuntut dipenuhinya kewajiban, tanggung jawab dan akuntabilitas, yang pada akhirnya membebani kebebasan individu. Bagi Al-Shadr, segala macam beban itu tidak membawa persoalan apapun karena kebebasan, begitu juga perilaku rasional, harus dilihat dalam konteks kerangka sosial masyarakat. Jika dipertimbangkan pula faktor-faktor spiritual, psikologis, dan sejarah/kultural yang membentuk kerangka sosial kaum muslimin, maka desakan seseorang untuk bertindak seperti *Rational Economic Man* dapat dipandang tidak rasional. Misalnya, memungut riba atas pinjaman uang tentu tidak akan diterima oleh *Islamic Man*, sementara bagi *Rational Economic Man* hal itu adalah salah satu cara termudah untuk mendapatkan uang.

Al-Shadr juga lebih memilih bersandar pada agama untuk menyeimbangkan kesejahteraan individu dan publik, bukan pada pemerintah semata. Pasar memiliki perannya sendiri dan negara pun punya peranannya sendiri pula, tetapi lebih penting dari semua itu, terdapat

---

<sup>20</sup> Khalifah secara harfiah berarti “Pengganti”. Dengan demikian *Khalifatullâh fi al-Ardh* berarti pengganti Allah di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia menduduki posisi sentral dalam mengelola dan mengatur bumi beserta segala isinya secara baik dan benar, guna memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kemaslahatan (kesejahteraan). Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : UPBIK Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984). H. 392 dan Ahmad Yusam Thobroni, *Fikih Kelautan II Etika Pengelolaan Laut Dalam Perspektif Al-Qur'an*, dalam Jurnal Al-Fikra Vol. 7 No. 2 (Pekanbaru : Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008), h. 345.

pengaruh dan petunjuk agama yang lebih utama di dalam sistem ekonomi Al-Shadr.<sup>21</sup>

### ***Ruang Kosong dalam Legislasi Ekonomi Islam***

Dalam usaha menemukan doktrin ekonomi Islam, maka ruang kosong hukum Islam di ranah ekonomi harus diperhatikan karena kekosongan itu mewakili satu sisi dari doktrin ekonomi Islam. Faktanya, doktrin ekonomi Islam memiliki dua sisi, satu sisi telah terisi secara sempurna hingga tidak memungkinkan lagi adanya perubahan atau modifikasi, serta sisi lainnya yang masih merupakan ruang kosong yang merupakan wilayah fleksibel di dalam Ekonomi Islam. Islam menyerahkan pengisian ruang kosong ini kepada penguasa atau otoritas yang berkuasa (*Wali al-Amri*) sesuai dengan tuntunan cita-cita umum dan tujuan ekonomi Islam serta kebutuhan setiap zaman.

Yang dimaksud dengan ruang kosong di sini adalah yang berkaitan dengan aturan Islam beserta teks-teks legislasinya, bukan yang berkaitan dengan situasi praktis di mana masyarakat muslim hidup di dalamnya selama masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengisi ruang kosong pada hukum Islam di ranah ekonomi berdasarkan tuntunan situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat muslim saat itu. Jadi, ketika Nabi Muhammad SAW mengisi ruang kosong itu, beliau melakukannya bukan dalam kapasitas beliau sebagai nabi yang menyampaikan syari'at Ilahi, akan tetapi dalam kapasitas beliau sebagai

---

<sup>21</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Muslim Economic Thought ...*, h. 135-137.

otoritas yang berkuasa (*Wali al-Amri*) yang bertindak atas nama Islam dengan tanggung jawab mengisi ruang kosong yang berlaku, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi.<sup>22</sup>

Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan adanya ruang kosong dalam ranah ekonomi Islam, yaitu :

*Pertama*, Fondasi doktrin ekonomi Islam tidak dapat ditemukan secara sempurna tanpa mengikutsertakan kajian tentang ruang kosong dalam hukum Islam di ranah ekonomi, beserta estimasi tentang kemungkinan cakupan pengisian ruang kosong ini, di tambah dengan kajian yang telah terisi atas nama Syari'ah sehingga ekonomi bisa dipetakan dengan elemen-elemen yang bersifat dinamis.

*Kedua*, Jenis-jenis legislasi yang dituangkan Nabi Muhammad SAW dalam mengisi ruang kosong itu bukanlah aturan-aturan yang bersifat permanen. Beliau melakukan itu bukan dalam kapasitas sebagai penyampai hukum ilahi, melainkan sebagai pemegang otoritas yang berkuasa (*Wali al-Amri*) sekaligus memberikan contoh bahwa ada ruang kosong yang harus senantiasa diisi sesuai dengan tuntutan keadaan.

*Ketiga*, atas dasar ini, Doktrin ekonomi Islam benar-benar terikat dengan sistem kekuasaan pada tataran praktis. Ketika tidak ada seorang penguasa atau otoritas yang berkuasa yang memiliki kualifikasi-kualifikasi yang sama dengan Nabi Mubhammad SAW dalam kapasitas beliau sebagai *Wali al-Amri*, maka kecil kemungkinan kekosongan dalam doktrin ekonomi

---

<sup>22</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h. 108.

dapat terisi sesuai dengan tuntutan keadaan sebagaimana dicita-citakan oleh Islam.<sup>23</sup>

## 2. Rancang Bangun Ekonomi Islam

Dengan definisi ekonomi Islam di atas, selanjutnya dalam beberapa pembahasan Al-Shadr merumuskan karakteristik ekonomi Islam yang membedakan sistem (mazhab) ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain, karakteristik tersebut terdiri dari tiga prinsip, yang dalam bahasa Al-Shadr disebut dengan *al-Arkân al-Ra'isiyyah*, ketiga prinsip tersebut adalah *Multiple Ownership*, *Freedom to Act* dan *Social Justice*.<sup>24</sup>

### a. *Mabda' al-Milkiyyah al-Muzdawijah* (*Multiple Ownership* / Prinsip Kepemilikan Multi Jenis).

Prinsip kepemilikan di dalam Islam merupakan implikasi terpenting dari pandangan Islam mengenai kebebasan. Prinsip ini meyakini tiga bentuk kepemilikan yang masing-masing beroperasi di dalam wilayahnya sendiri-sendiri, ia menegaskan bahwa berbagai bentuk kepemilikan itu merupakan ungkapan dari suatu perencanaan agama, yang terletak di dalam suatu kerangka nilai dan makna yang khusus.<sup>25</sup> Bentuk kepemilikan tersebut adalah :

- *al-Milkiyyah al-Khashshah* (*Private Ownership*/Kepemilikan Pribadi)<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam...*, h. 108.

<sup>24</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h. 295.

<sup>25</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Muslim Economic Thought ...*, h. 137.

<sup>26</sup> Bâqir Al-Shadr membedakan antara *al-Milkiyyah al-Khâshshah* dengan *al-Haq al-Khâshshah*.

Kepemilikan pribadi adalah jenis kepemilikan di mana seorang individu atau pihak tertentu berhak menguasai proverti tertentu secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain untuk mengambil manfaat atau mempergunakan benda tersebut dalam bentuk apapun kecuali ada darurat atau keadaan yang mengharuskan hal demikian. Contoh dari kepemilikan ini adalah sejumlah air yang telah diambil seseorang dengan tangannya sendiri.

Dalam hal ini, Al-Shadr dan seluruh pemikir ekonomi baik klasik maupun kontemporer sepakat bahwa yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas kepemilikan sementara, sedangkan kepemilikan yang mutlak hanya terdapat pada Allah SWT.<sup>27</sup>

- *al-Milkiyyah al-Daulah (State Ownership/Kepemilikan Negara)*

Kepemilikan Negara adalah kepemilikan pemegang mandat ilahi dalam negara Islam yang diemban oleh Nabi atau Imam (pemimpin) terhadap harta yang dipergunakan untuk kemaslahatan, seperti kepemilikan terhadap hasil tambang.

- *al-Milkiyyah al-‘Ammah (Public Ownership/Kepemilikan Umum)*

Kepemilikan umum terdiri dari dua jenis, yaitu *Milkiyyah al-Ummah* (Kepemilikan umat) dan *Milkiyyah al-Nâs* (Kepemilikan Masyarakat). *Milkiyyah al-Ummah* adalah hak penguasaan atas properti milik keseluruhan umat Islam, misalnya penguasaan atas properti yang didapat dari perang suci (jihad). Sedangkan *Milkiyyah*

---

<sup>27</sup> Lihat al-Qur'an al-Karim Surat Thaha ayat 6 dan Surat Al-Baqarah ayat 284.



*al-Nâs* atau *People's Ownership* adalah kepemilikan terhadap harta/property di mana harta tersebut terlarang bagi seorang individu untuk menguasainya secara eksklusif dan memilikinya sebagai milik pribadi, sementara seluruh masyarakat (baik muslim maupun non muslim) diizinkan untuk mengambil manfaat serta memperoleh keuntungan darinya. Seperti laut dan sungai.<sup>28</sup>

b. *Mabda' al-Hurriyyah al-Iqtishâdiyah fî Nithâq Maḥdud*/Freedom to Act

Islam mengakui hak-hak individu dalam melakukan aktifitas ekonomi. Hak ini akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian.<sup>29</sup> Akan tetapi kebebasan dalam Islam tidak sama dengan kebebasan yang dipahami dalam sistem kapitalisme. Kebebasan dalam aktifitas ekonomi adalah kebebasan yang dibatasi. Setidaknya ada dua batasan yang ditetapkan oleh Islam terhadap kebebasan dalam interaksi di masyarakat, khususnya di bidang ekonomi,<sup>30</sup> yaitu :

- *Tahdid Dzâti* (Self-Imposed), yaitu batasan berupa norma dan nilai yang berasal dari dalam individu muslim yang menghalangi mereka

<sup>28</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h. 433-434.

<sup>29</sup> Kebebasan dalam melakukan aktifitas ekonomi dirumuskan dalam Kaidah Fiqhiyah في الاشياء الاباحة (pada dasarnya terdapat kebolehan di dalam segala hal), kaidah lain mengatakan (pada dasarnya terdapat kebolehan dalam segala bentuk transaksi bisnis). Lihat Athiyah Abdullah Athiyah Ramadhan, *Mausû'ah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Islâmiyyah wa Dauruha fî Taujîh al-Nizhâm al-Mu'âshirah*, (Iskandariah : Dâr al-Imân, 2007), h. 42 dan 124. Lihat juga Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir*, (Beirut : Dâr al-Fikr al-'Alâmiyyah, 1983), h. 129. 'Ali Ahmad al-Nadwi, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah fî al-Mu'âmalat al-Mâliyyah Juz I*, (Riyadh : Syirkah al-Rajih al-Musharrifiyyah, 2000), h. 297.

<sup>30</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h. 298

untuk berbuat sesuatu yang dilarang tanpa merasa kehilangan kebebasan mereka sendiri.<sup>31</sup>

- *Tahdid Maudhu'i (Socially Enforced)*, Batasan berupa larangan dari luar, larangan ini ada dua macam, yaitu (a) larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh nas-nas syara', seperti larangan *Riba*, *Ihtikar*, *Gharar*, *Tadlis*, *Ikrah* dan lain sebagainya. (b) Larangan-larangan yang dikeluarkan oleh *Wali al-Amri* sebagai pemegang otoritas kekuasaan, seperti intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dipandang mengganggu kepentingan orang lain.<sup>32</sup>

Al-Shadr tidak sepakat dengan gagasan “Keselarasan kepentingan” yang menjadi dasar penekanan sistem kapitalis atas kebebasan individu. Ia tidak mengakui pandangan yang menyatakan bahwa kesejahteraan publik akan menjadi maksimum jika para individu diberi kebebasan untuk mengejar kepuasan dan kepentingan masing-masing, sebaliknya ia malahan melihat hal itu sebagai sumber masalah sosial ekonomi.<sup>33</sup> Kenyataannya, individu yang diberi kebebasan tanpa batas lebih cenderung mengagungkan pemenuhan hak dan kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Atas nama hak asasi, setiap individu berhak untuk mengeksploitasi segala sumberdaya ekonomi yang ada, hal ini bertentangan dengan apa yang mereka yakini sendiri, yaitu sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia.

---

<sup>31</sup> Lihat al-Qur'an Surat Asy-Syams ayat 7-10.

<sup>32</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h. 298.

<sup>33</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Muslim Economic Thought ...*, h. 135.

Negara tidak memiliki hak untuk mengekang setiap individu di dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Keadaan ini diperparah oleh tidak adanya nilai moral yang mengarahkan aktivitas ekonomi setiap individu.<sup>34</sup>

c. *Mabda' al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah/Social Justice*

Keadilan merupakan prinsip yang paling penting dalam ekonomi Islam. Motivasi al-Qur'an dalam berlaku adil dapat dilihat antara lain dalam Surat al-Nahl ayat 90, al-Nisa' ayat 58, al-An'am ayat 152, al-A'raf ayat 28-29, al-Hadid ayat 25, dan lain-lain. Namun demikian, Islam bukan satu-satunya yang menyinggung masalah keadilan dalam sistem ekonominya, semua sistem ekonomi mengusung dan mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun sistem-sistem tersebut memiliki penafsiran yang berbeda tentang konsep keadilan. Dalam sistem sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata (*No one has a privilege to get more than others*) yang diejawantahkan dalam prinsip *From each according to his ability, to each according to his needs*. Sedangkan dalam sistem kapitalis, adil dipahami apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya (*you get what you deserve*).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Irfan Syauqi Beik, *Celah Baru Ekonomi Syri'ah*, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), 27 januari 2010.

<sup>35</sup> Adi Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 36.

Dalam kenyataannya, kita sering menemui bahwa dalam sistem sosialis sekalipun, negara menjadi faktor yang dominan dan dengan dominasinya tersebut para birokrat dan penguasa menjadi kaum kapitalis di tengah kaum sosialis yang miskin. Kapitalisme yang hendak dihilangkan dengan memberikan kekuasaan kepada kaum buruh juga merupakan sebuah ide yang aneh, karena dengan demikian berimplikasi munculnya kelas borjuis-borjuis baru, sehingga kaum borjuis yang hendak dilenyapkan justru muncul kembali dalam bentuk yang berbeda.

Tidak berbeda dengan sistem kapitalis, sistem yang berdasarkan pada mekanisme pasar ini bercita-cita keadilan dapat ditegakkan, namun kenyataan mengatakan tidak. Sistem kapitalisme justru mendorong terbentuknya industri korporasi (perekonomian didominasi oleh sebagian kecil orang saja), melegalkan monopoli dan sangat mendewakan modal dengan penghargaan yang berlebihan, sehingga dapat dikatakan bahwa Konsep adil yang dikemukakan kapitalisme akan bermuara kepada penzaliman terhadap orang miskin, sedangkan konsep adil yang dikemukakan oleh sosialisme akan membawa keadilan terhadap orang kaya.<sup>36</sup>

Walaupun sosialisme dan kapitalisme sama-sama mengakui pemerataan penghasilan secara adil, namun dalam kapitalisme pengakuan ini sekali lagi hanyalah akibat yang timbul dari adanya tekanan kelompok, sedangkan dalam sosialisme pengakuan itu

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

dibarengi dengan pengingkaran terhadap adanya kebebasan perorangan.<sup>37</sup>

Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama suka (*'an tarâdhin minkum*)<sup>38</sup> dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain (*La Tazhlimûn wa La Tuzhlamûn*).<sup>39</sup> Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga, karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, maka Islam membolehkan adanya intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Islam juga melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul.<sup>40</sup> Muara dari keadilan sosial dalam Islam ini akan terwujud dalam bentuk jaminan terpenuhinya semua kebutuhan dasar masyarakat dan terwujudnya keseimbangan sosial di tengah masyarakat sebagai mana yang dikatakan oleh Bâqir Al-Shadr :

والصورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية تحتوي على مبدئين عامين،  
لكل منهما خطوطه وتفصيلاته: أحدهما: مبدأ التكافل العام،  
والآخر: مبدأ التوازن الاجتماعي.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Umar Chapra, *Negara Sejahtera Menurut Islam*, dalam John J Donohue dan John L Esposito (ed), *Islam in Transition : Muslim Perspectives*, (terj), (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995), h. 422.

<sup>38</sup> Lihat al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 29.

<sup>39</sup> Lihat al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 279.

<sup>40</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*,... h. 43-44.

<sup>41</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ*..., h. 303.

Gambaran Islam tentang keadilan sosial mengandung dua prinsip umum yang masing-masing memiliki garis dan rincian tersendiri, yaitu prinsip jaminan sosial umum, dan prinsip keseimbangan sosial.

## **B. Munculnya Persoalan Ekonomi**

Perbedaan filosofi antara ilmu ekonomi dan mazhab/doktrin ekonomi akan berdampak pada perbedaan cara pandang antara keduanya dalam memandang munculnya permasalahan ekonomi. Persoalan ekonomi dalam pandangan ilmu ekonomi merupakan hasil dari penafsiran dan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi (lahiriah), sementara doktrin ekonomi Islam merumuskan teori tentang kemunculan doktrin ekonomi dengan landasan penafsiran terhadap teks suci, ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw.

Dalam pembahasan mengenai persoalan mendasar dalam ekonomi (*al-Musykilah al-Iqtishâdiah*), Al-Shadr memulai pembahasannya dengan mengutip pandangan kaum kapitalis dan kaum Marxis tentang munculnya persoalan ekonomi.<sup>42</sup>

Kaum kapitalis, sebagai mana dikutip Al-Shadr, memandang bahwa persoalan mendasar ekonomi adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan kaum sosialis berpendapat bahwa persoalan ekonomi muncul karena tidak sejalannya sumber produksi dengan proses distribusi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 346.

<sup>43</sup> *Ibid*.

Islam, menurut Al-Shadr, tidak sejalan dengan dua pemikiran di atas.

Al-Shadr mengatakan :

وأما الإسلام فهو لا يعتقد مع الرأسمالية: أن المشكلة مشكلة الطبيعة وقلة مواردها، لأنه يرى أن الطبيعة قادرة على ضمان كل حاجات الحياة، التي يؤدي عدم إشباعها إلى مشكلة حقيقة في حياة الإنسان. كما لا يرى الإسلام أيضاً: أن المشكلة هي التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع، كما تقرر الماركسية.. وإنما المشكلة \_ قبل كل شيء \_ مشكلة الإنسان نفسه، لا الطبيعة، ولا أشكال الإنتاج.<sup>44</sup>

Islam tidak sejalan dengan paham kapitalisme yang memandang persoalan ekonomi merupakan persoalan natural dan sedikitnya sumber daya alam, karena sesungguhnya alam mampu untuk memenuhi semua kebutuhan kehidupan manusia, paham yang diusung kapitalisme ini akan menghambat manusia untuk melihat persoalan yang sesungguhnya. Islam juga tidak sejalan dengan apa yang diyakini oleh kaum Marxiz yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi muncul karena benturan antara proses produksi dan distribusi. Persoalan ekonomi menurut Islam bermula dari manusia itu sendiri, bukan persoalan yang bersifat natural dan bukan pula berhubungan dengan proses produksi.

Al-Shadr menjelaskan bahwa dengan mengatakan masalah ekonomi timbul karena hal yang bersifat natural, lebih merupakan semacam penghindaran terhadap penyebab yang sebenarnya dan bisa dicarikan solusinya,

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 347.

dengan menyuguhkan penyebab imajiner yang tidak ada solusinya. Muara dari teori Ini adalah justifikasi terhadap apa yang dianggap sebagai solusi, yakni peningkatan kekayaan secara membabi buta, yang pada gilirannya malah akan masalah ekonomi baru, bukan menemukan sistem yang dapat mengakhiri masalah ekonomi itu sendiri. Inilah yang dilakukan kapitalisme dengan menyuguhkan penyebab imajiner bagi masalah ekonomi. Seolah-olah selamanya alam tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan manusia, konsekuensinya berbagai kebutuhan dan keinginan itu akan berbenturan satu sama lain, dan dalam kasus ini pembentukan sistem ekonomi yang mengatur berbagai kebutuhan dan keinginan itu serta menentukan kebutuhan dan keinginan mana yang harus dipenuhi, menjadi tidak terhindarkan. Akibat dari pandangan ini adalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak proporsional serta mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya tanpa memperhatikan aspek moral dan kepentingan kemanusiaan.<sup>45</sup>

Al-Shadr juga tidak sependapat dengan teori yang mengatakan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Ia berpendapat bahwa manusia akan berhenti mengkonsumsi suatu barang atau jasa apabila kepuasan terhadap barang dan jasa tersebut menurun atau nol. Sebagai contoh seseorang akan berhenti minum apabila dahaganya terpuaskan, demikian juga seseorang akan berhenti makan apabila ia sudah kenyang.<sup>46</sup>

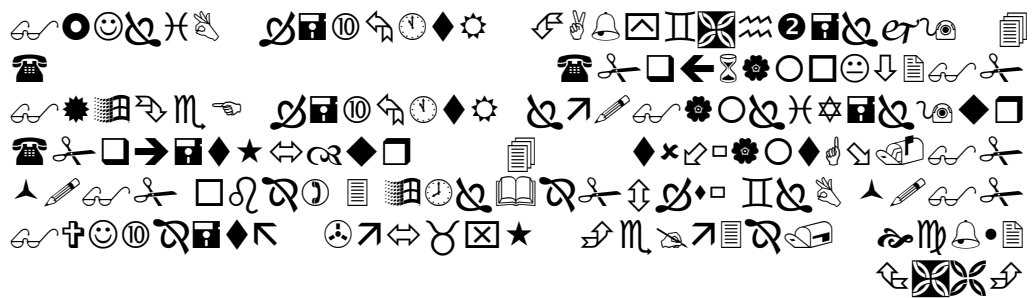
---

<sup>45</sup> Thâhir ‘Abd al-Muhsin Sulaiman, *‘Ilâj al-Musykilah al-Iqtishâdiyyah bi al-Islâm*, terj. (Bandung : Al-Ma’arif, 1985), h. 148.

<sup>46</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*,... h. 7.



Di samping tidak setuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh kaum kapitalis. Bâqir Al-Shadr juga tidak setuju dengan pandangan kaum Marxis yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi muncul karena kesenjangan produksi dan distribusi yang disebabkan oleh adanya pertentangan kelas di tengah masyarakat. Solusi yang dikemukakan oleh kaum Marxis terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia adalah dengan menghapus hak individu dan menghapus kelas yang ada dalam masyarakat.<sup>47</sup> Dalam Islam kepemilikan pribadi diakui oleh agama. Sebagai mana Allah berfirman di dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 32 :



*Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Nisa' : 32)*<sup>48</sup>

Penghapusan kepemilikan pribadi merupakan kezaliman terhadap orang kaya. Di sisi lain, perbedaan status sosial di tengah masyarakat merupakan sunnatullah yang tidak bisa dipungkiri. Dalam al-Qur'an Surat al-Nahl ayat 71 Allah swt berfirman :

<sup>47</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h. 347.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1998), h. 122.



*Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? (QS. Al-Nahl : 71).<sup>49</sup>*

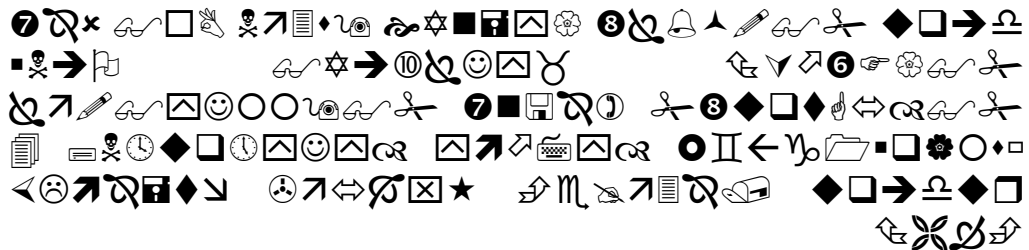
Allah telah menciptakan alam ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bumi,<sup>50</sup> yang menurut sebagian ilmuwan telah berusia empat milyar tahun lebih,<sup>51</sup> merupakan sumber-sumber ekonomi dalam yang mengandung sumber pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan jasa yang bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bagi Al-Shadr, sumber daya hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Pendapat ini didasari oleh dalil yang menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan dengan ukuran yang setepat-tepatnya. Dengan demikian, karena segala sesuatu sudah terukur dengan sempurna, maka

<sup>49</sup> *Ibid.*, h.

<sup>50</sup> Imam Zadjuli, sebagai mana dikutip oleh M. Rusli Karim, mengatakan bahwa bumi mempunyai luas 510 juta km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 148,5 juta km<sup>2</sup> daratan (29,12 %), 361,5 juta km<sup>2</sup> berupa lautan (70,82 %). Jumlah ini tidak termasuk padang pasir, gunung-gunung yang memiliki luas 62,1 juta km<sup>2</sup> dan kutub utara dan kutub selatan yang memiliki luas 12,5 juta km<sup>2</sup>. Sedangkan populasi manusia pada tahun 1998 menurut World Development Report 2000/2001 adalah berjumlah enam milyar lebih. Lihat Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2003), h. 43.

<sup>51</sup> David Bergamini, *Alam Semesta*, terj. Bambang Hidayat, (Jakarta : Tira Pustaka, 1979), h. 168.

pasti Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh umat manusia<sup>52</sup>. di dalam Surat al-Baqarah ayat 29 Allah menyatakan :



“(Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu).”<sup>53</sup>

Kata “Kum” yang mengandung arti kamu sekalian (plural) dalam ayat di atas menunjukkan bahwa al-Qur’an tidak berbicara kepada suku atau bangsa tertentu. Al-Qur’an berbicara kepada seluruh umat manusia di permukaan bumi.<sup>54</sup> Bumi dan segala isinya diciptakan dengan kodrat untuk manusia karena sebagai khalifah di muka bumi manusia dapat menguasai dan memanfaatkan potensi alam untuk kepentingan tugas dan kehidupannya.<sup>55</sup>

M. Quraish Shihab, ketika mengomentari ayat di atas, menyatakan bagaimana kalian kafir, padahal Allah bukan hanya menghidupkan kamu di dunia, tetapi juga menyiapkan sarana kehidupan di dalamnya. Dia yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi semua, sehingga semua yang

<sup>52</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, h. 7.

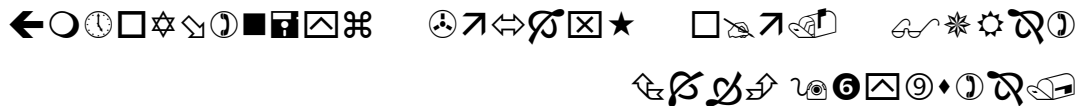
<sup>53</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 13

<sup>54</sup> Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam...*, h. 77.

<sup>55</sup> Abd. Muin Salim, “Metode Dakwah untuk Menanggulangi Lahan Kritis: Sebuah Telaah Qurani”, *Laporan Penelitian*, dalam Perumusan Model Dakwah dalam Pelaksanaan Penanggulangan Lahan Kritis di Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang: Kerjasama BAPPEDA Tkt. I Sulawesi Selatan dengan P3M IAIN Alauddin, 1989/1990), h. 86

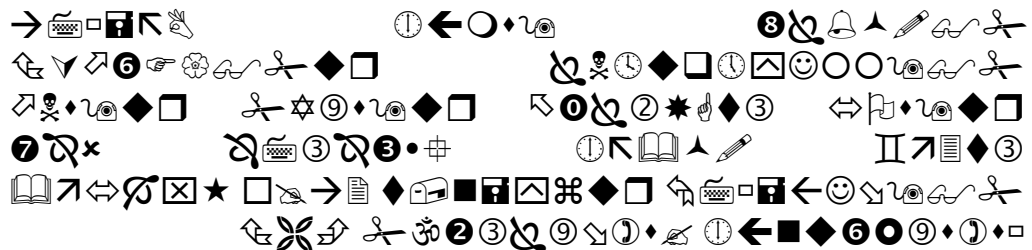
kamu butuhkan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup tersedia dan terhampar, dan itu adalah bukti ke-Mahakuasaan-Nya.<sup>56</sup>

Ayat lain yang kembali menegaskan dan mendukung pernyataan di atas adalah Surat al-Qomar ayat 49 yang menyatakan :



*“Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya”.*<sup>57</sup>

Dalam ayat lain, Surat al-Furqan ayat 2 Allah swt mengatakan :



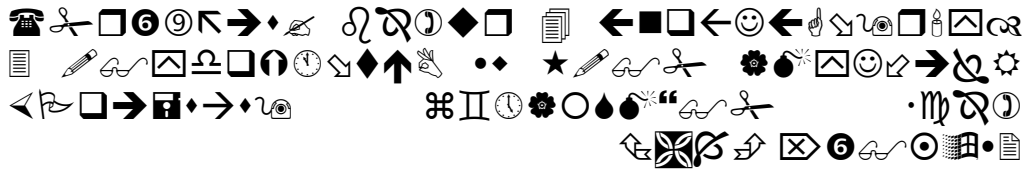
*“Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya (QS. Al-Furqan : 2)*

Mengatakan bahwa alam tidak mampu merespon kebutuhan manusia berarti tidak sejalan dengan keadilan Allah swt yang tidak akan menzalimi hamba-Nya dengan tidak mencukupi kebutuhannya setelah Allah menciptakan manusia. Dalam surat Yunus ayat 44 Allah swt mengatakan :

<sup>56</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol I*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 135

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 883.





*Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. (32) Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.(33) Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).(34)<sup>61</sup>*

Dari elaborasi Surat Ibrahim ayat 32-34 di atas, Al-Shadr berpendapat bahwa permasalahan ekonomi muncul karena disebabkan oleh dua factor yang mendasar. Yaitu :

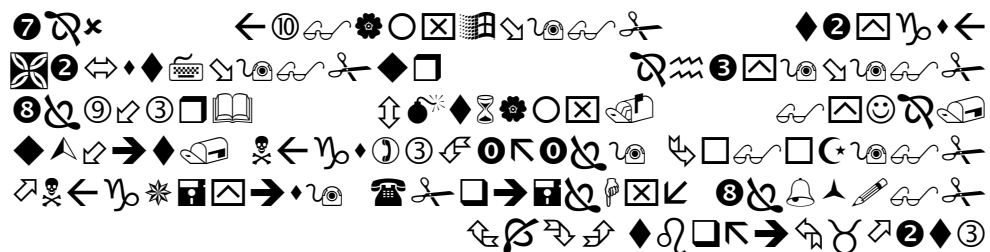
فظم الإنسان في حياته العملية وكفرانه بالنعمة الإلهية، هما السببان الأساسيان للمشكلة الاقتصادية في حياة الإنسان.<sup>62</sup>

Pertama adalah karena perilaku manusia yang melakukan kezaliman (*Zhalum*) dan kedua karena mengingkari nikmat Allah SWT (*Kaffar*). Dzalim disini dimaksudkan bahwa betapa banyak ditemukan dalam realitas empiris, manusia dalam aktivitas distribusi kekayaan cenderung melakukan kecurangan-

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 385.

<sup>62</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h. 347.

kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi semata, seperti melakukan tindakan penimbunan atau iktikar dan eksploitasi satu pihak ke pihak lain. Sedangkan yang dimaksud ingkar adalah manusia cenderung menafikan nikmat Allah dengan semena-mena mengeksploitasi sumber-sumber alam.<sup>63</sup> Pernyataan ini diperkuat lagi dengan ayat al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 :



*Telah nampak kerusakan<sup>64</sup> di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>65</sup>*

Dari kedua aspek tersebut, Al-Shadr menyimpulkan sebagai salah satu factor yang dominan yang menjadi akar lahirnya permasalahan ekonomi dalam kehidupan manusia, bukan karena akibat terbatasnya alam atau karena ketidakmampuan alam dalam merespon setiap dinamika kebutuhan manusia.

<sup>63</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h. 347

<sup>64</sup> Quraish Shihab menyatakan ketika menafsirkan Surat Al-Baqarah ayat 11-12, bahwa perusakan di bumi, sebagaimana juga terkandung dalam ayat di atas, adalah aktifitas yang mengakibatkan sesuatu yang nilai-nilainya berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi kehilangan sebagian atau seluruh nilainya, sehingga kurang atau tidak berfungsi lagi (kurang manfaatnya). Kata *Fasada* di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 50 kali yang tersebar pada 43 ayat dengan makna antara lain mengikuti hawa nafsu (Al-Mukmin : 71), mengurangi takaran atau timbangan, mengurangi hak-hak manusia (Al-A'raf : 85, Hud : 85, Al-Syu'ara : 183), memutuskan hubungan kekeluargaan (Muhammad : 22), Mencuri (Yusuf : 73), memecah belah dan menindas rakyat (al-Qasas : 4) dan merusak tanaman dan binatang ternak (Al-Baqarah : 205). Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, h. 101 dan Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, (Kairo : Dar al-Hadits, 1364 H), h. 518-519. Muhammad Syabbam Rusydi Zaib dan Muhammad Adnan Salim, *Mu'jam Mufahras li Ma'âni al-Qur'ân al-Azhîm*, (Beirut : Dar el-Fikr, 1995), h. 895-897.

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 647.

Menurut Al-Shadr, masalah tersebut hanya dapat teratasi dengan mengakhiri kedzaliman dan keingkaran manusia. Untuk mengakhiri kezaliman manusia Islam telah menurunkan perangkat peraturan yang berkaitan dengan distribusi harta dan transaksi. Sedangkan untuk mengakhiri keingkaran manusia Islam telah memberikan aturan tentang produksi.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ...*, h. 348.



### C. Tanggung Jawab Negara Dalam Bidang Ekonomi

Pemikiran Bâqir Al-Shadr tentang tanggung jawab Negara dalam bidang ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan pemikiran beliau tentang Negara Islam. Islam merupakan agama yang menjamin tegaknya dakwah dalam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>67</sup> Peran Negara sangat diperlukan dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi sebagai mana juga dalam bidang lain. Karena, sebagai mana telah dikemukakan di atas, ekonomi Islam bukanlah ekonomi konvensional yang bebas nilai, akan tetapi merupakan ekonomi yang sangat berkaitan dengan nilai moral. Nilai moral dalam masyarakat, khususnya dalam kehidupan ekonomi, harus ditegakkan melalui partisipasi semua pihak dan di sinilah diperlukan peran dan intervensi Negara untuk memastikan dan mengawasi tindakan dan sikap masyarakat. Tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi juga erat kaitannya dengan prinsip kepemilikan di mana kepemilikan negara merupakan salah satu bentuk kepemilikan dalam prinsip *Multiple Ownership*. Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan *pertama*, penyediaan akan terlaksananya Jaminan Sosial dalam masyarakat, *kedua* berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial dan *ketiga* terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi.

#### 1. Jaminan Sosial di Tengah Kehidupan Masyarakat

Islam telah menugaskan Negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, 331.

Kewajiban negara tidak hanya dalam batas-batas kebutuhan pokok saja, akan tetapi juga jaminan terhadap kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Jaminan yang dimaksud di sini adalah "jaminan pemeliharaan", pemberian bantuan dan sarana agar individu bisa hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam dan mempertahankannya. Maksudnya, jika secara umum standar hidup masyarakat Islam meningkat, maka harus meningkat pula standar hidupnya. Jadi, atas dasar ini, Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, di mana pemenuhan segala kebutuhan ini, baik kualitas maupun kuantitasnya, disesuaikan dengan standar hidup masyarakat Islam. Demikian pula, Negara wajib memenuhi seluruh kebutuhan individu di luar kebutuhan pokok, yakni segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan individu berada dalam standar hidup masyarakat Islam.<sup>68</sup>

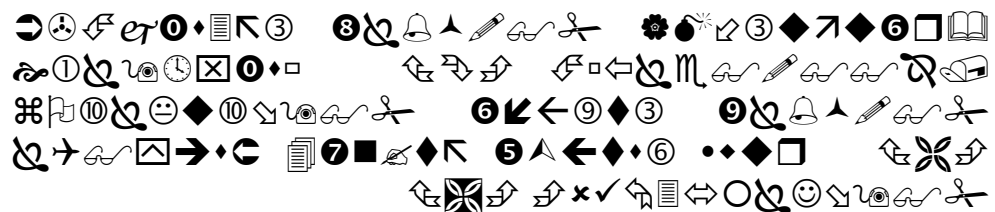
Prinsip jaminan sosial dalam Islam didasarkan pada dua basis doctrinal. Pertama keharusan adanya kewajiban timbal balik dalam masyarakat. Kedua hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai Negara. Kedua basis tersebut memiliki batas dan urgensi tersendiri yang berkenaan dengan penentuan jenis kebutuhan apa yang pemenuhannya harus dijamin, juga berkenaan dengan penetapan standart hidup minimal yang harus dijamin oleh prinsip jaminan social bagi setiap individu.

---

<sup>68</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishâdunâ...*, h. 459-460.

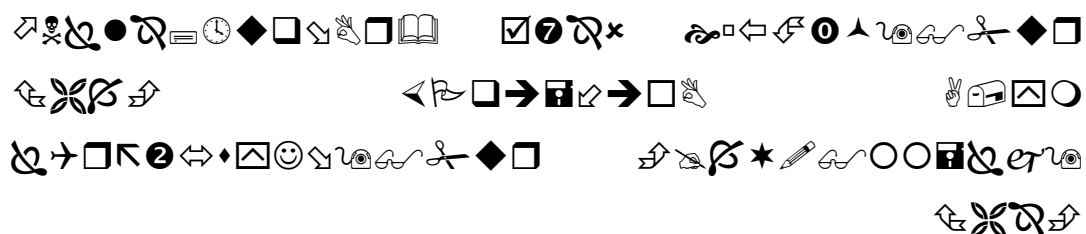
*Prinsip Pertama, Kewajiban Timbal Balik Anggota Masyarakat*

Fungsi Negara dalam mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik masyarakat sebenarnya mencerminkan peran negara dalam memaksa warganya untuk mematuhi apa yang telah digariskan oleh syari'ah untuk memastikan agar kaum muslimin mematuhi hukum-hukum Islam. Islam mewajibkan kepada setiap pemeluk Islam untuk untuk membantu saudaranya. Perintah ini dapat dilihat antara lain dalam Surat al-Ma'un ayat 1-3 :



*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1) Itulah orang yang menghardik anak yatim, (2) Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. (3). (al-Mâ'ûn : 1-3)<sup>69</sup>*

Dalam surat al-Ma'ârij ayat 24-25 Allah swt juga berfirman :



*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, (24) Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)(25). (al-Ma'ârij : 24-25).<sup>70</sup>*

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 1108.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 974.

Kewajiban ini merupakan kewajiban bersama (*Fardhu Kifâyah*) yang ditunaikan dalam batas-batas kemampuan dan kekuasaannya.<sup>71</sup> Ia harus menunaikan kewajiban ini sebagaimana ia juga harus menunaikan seluruh kewajiban yang lain. Dengan demikian, Sebagaimana negara berhak memaksa kaum muslimin untuk berjihad, maka negara juga berhak memaksa untuk menunaikan kewajiban mereka yang berkenaan dengan membantu dan menolong orang-orang yang tidak berkemampuan (cacat).<sup>72</sup> Dengan hak ini, negara bisa memberikan jaminan sosial kepada mereka yang tidak berkemampuan dengan mewajibkan kaum muslimin untuk mengimplementasikan jaminan tersebut dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang yang cukup sebagai bentuk penunaian kewajiban mereka kepada Allah Yang Maha Tinggi.

*Prinsip Kedua, Hak Masyarakat Atas Sumber Kekayaan Yang dikuasai Negara*

Teks-teks hukum yang ada cukup memberikan penekanan bahwa negara berkewajiban menjamin kebutuhan individu karena adanya hak masyarakat atas sumber kekayaan yang dikuasai oleh negara.

Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq bahwa Rasulullah SAW biasa berkata dalam khutbahnya :

---

<sup>71</sup> Abu Muhammad 'Ali bin Hazm, *al-Muhalla* Juz 6, (Beirut: al-Maktab al-Tijari, tt), h. 156, lihat juga, Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah* Juz 2, (Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, t.t), h. 177.

<sup>72</sup> Pemaksaan tersebut sudah ada pada periode awal Islam, yaitu ketika Abu Bakar memerangi kaum yang enggan membayar zakat.

مَنْ تَرَكَ ضَيَاعَهُ فَعَلِيَ ضَيَاعَهُ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا فَعَلِيَ دِينَهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالَهُ فَأَكَلَهُ

*"Siapa saja yang meninggalkan kerugian, maka kerugiannya itu menjadi tanggung jawabku. Siapa saja yang meninggalkan utang, maka utangnya menjadi tanggung jawabku. Juga siapa saja yang meninggalkan hartanya maka aku yang memberi makannya".<sup>73</sup>*

Diriwayatkan bahwa Imam Musa ibn Ja'far berkata :

أَنَّهُ وَارِثٌ مِنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَيَعُولُ مِنْ لَا حِيلَةَ لَهُ

*"Beliau (Nabi SAW) adalah pewaris orang yang tidak memiliki pewaris, dan beliau memelihara orang yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri."<sup>74</sup>*

Walaupun dalam masalah ini al-Shadr hanya mengutip hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam syi'ah –mengingat latar belakangnya sebagai ahli hukum syi'ah-, akan tetapi banyak sekali hadis yang terdapat dalam kitab hadis mu'tabar yang memiliki makna yang sama dengan dua hadis di atas.

Jaminan sosial yang berkaitan dengan prinsip kedua ini, menurut al-Shadr, dilaksanakan dengan dua bentuk, yakni, *Pertama*, Negara harus memberikan setiap individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. *Kedua*, bagi individu yang tidak mampu melakukan aktifitas kerja produktif, maka Negara wajib mengaplikasikan jaminan

---

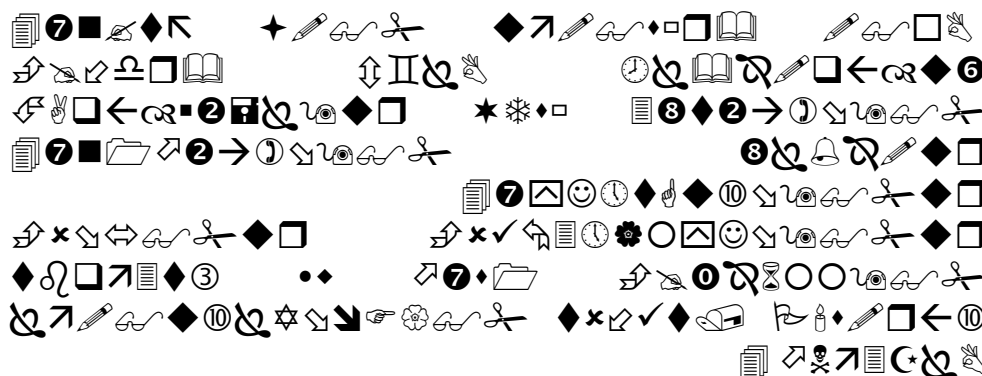
<sup>73</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishâdunâ...*, h.701.

<sup>74</sup> *Ibid.*

sosial bagi kelompok yang demikian dalam bentuk pemberian uang secara tunai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk memperbaiki standar kehidupannya.

## 2. Mewujudkan Keseimbangan Sosial

Keseimbangan sosial merupakan salah satu tuntunan Islam dalam hidup bermasyarakat. Dalam Al-Qur'an Surat al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman :



*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. (Al-Hasyr : 7)<sup>75</sup>*

Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, maka Islam memberikan beberapa instrumen berupa kewajiban membayar zakat dan pajak lain, seperti *Khums*, *Kharaj*, *Fay'* Anfal dan lain sebagainya. Keseimbangan juga akan terwujud dengan mengeliminasi segala bentuk

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 916.

kezaliman dalam aktifitas ekonomi. Inilah yang ingin dituju oleh Ekonomi Islam (*Iqtishâd*).

Pentingnya mewujudkan keseimbangan dalam tatanan sosial masyarakat tergambar dari makna kata *Iqtishâd* itu sendiri. Kata *Iqtishâd* merupakan derivasi dari kata *Qashada*, yang secara literal memiliki arti seimbang atau pertengahan (*al-Wasthu Bainā Amrain*). Makna ini bisa dipahami dari Hadis Nabi :

القصد القصد تبلغوا

“Ambillah jalan tengah maka kamu akan sampai (pada tujuanmu).<sup>76</sup>

Makna lain dari kata *Qashada* adalah tidak kikir dan tidak pula boros. Maka orang yang memiliki keseimbangan dalam konsumsi disebut juga *Muqtashid*.<sup>77</sup> Dengan demikian, tindakan ekonomi hendaknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan (*needs*), bukan untuk memuaskan keinginan (*wants*).<sup>78</sup> Dari arti secara literal ini dapat dipahami, bahwa di samping mewujudkan keseimbangan secara individual, *Iqtishâd* juga bertujuan mewujudkan keseimbangan (*Equilibrium*) di tengah masyarakat. Namun walaupun demikian, keseimbangan sosial yang dipahami Islam bukanlah seperti yang dipahami oleh kaum sosialis.

---

<sup>76</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jâmi` al-Shahîh Juz 4*, (Kairo : al-Maktabah al-Salafiyah, t.th), h. 184.

<sup>77</sup> Ibnu al-Manzhur, *Lisân al-`Arab Jilid 5*, (Kairo : Dar al-Ma`arif, t.th), h. 3642.

<sup>78</sup> Muhammad Syafi'i Antonio dan Tim Tazkia, *Ensiklopedi Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager" 2, Bisnis dan Kewirausahaan*, (Jakarta : Tazkia Publishing, 2010), cet. Ke-1, h. 194.

Konsep keseimbangan sosial yang ditawarkan oleh Al-Shadr adalah konsep keseimbangan yang didasarkan pada dua asumsi dasar. Yaitu fakta kosmik (*Haqiqah Kauniyyah*) dan fakta doktrinal (*Haqiqah Mazhabiyah*). Fakta kosmik merupakan suatu perbedaan yang eksis ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Menurut Al-Shadr, adalah suatu fakta yang tidak bisa diingkari oleh siapapun bahwa setiap individu secara alamiah memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dalam satu titik pada akhirnya akan melahirkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, perbedaan tersebut dikenal dengan strata sosial. Perbedaan yang bersifat bawaan atau kosmik di atas bukanlah hasil dari proses sejarah yang bersifat eksidental seperti yang diyakini oleh Marx dan para pengikutnya. Menurut Marx proses tranformasi sistem kehidupan masyarakat dari tingkatan komunal menuju sistem puncak, yakni komunisme, berakar dari proses dialektis dalam relasi produksi (interaksi ekonomi).

Adapun fakta doktrinal adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah salah satu instrumen terwujudnya kepemilikan pribadi yang membawa konsekwensi atas segala sesuatu yang melekat padanya. Perbedaan kualitas dan kuantitas kerja tentu akan berdampak pada perbedaan penghasilan yang diterima oleh seseorang. Dari dua fakta di atas Al-Shadr menyimpulkan :



التوازن الاجتماعي هو التوازن بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة، لا في مستوى الدخل<sup>79</sup>

Keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Islam melarang konsumsi yang berlebihan (pemborosan) di kalangan orang kaya dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan demikian, perbedaan standar hidup yang berjauhan bisa didekatkan, hingga pada akhirnya tercipta satu standar hidup. Standar hidup yang satu itu pasti mengandung perbedaan derajat, akan tetapi tidak akan terdapat standar hidup yang bertolak belakang seperti dalam masyarakat kapitalis.<sup>80</sup>

Sebagai mana Islam telah memformulasikan prinsip keseimbangan sosial, ia juga telah melengkapi negara dengan wewenang yang diperlukan dalam usaha mengaplikasikan prinsip tersebut. Esensi dari wewenang ini dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut ini :

*Pertama*, pemberlakuan pajak-pajak permanen yang sinambung dan memanfaatkan pajak-pajak itu demi kepentingan keseimbangan sosial, seperti zakat dan *Khums*.

*Kedua*, menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan, di mana keuntungan itu dimanfaatkan demi kepentingan keseimbangan sosial.

---

<sup>79</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ....*, h. 708.

<sup>80</sup> Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam....*, h. 470.

*Ketiga*, aturan-aturan hukum Islam meregulasi berbagai bidang yang berbeda dalam kehidupan ekonomi, seperti larangan *Ihtikâr*, penetapan hukum waris, kewenangan negara dalam *Ihyâ' al-Mawât*.<sup>81</sup>

### 3. Prinsip Intervensi Negara

Seluruh kekuasaan dan wewenang yang komprehensif dan umum yang diberikan kepada Negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi Islam.

Intervensi Negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Pada satu sisi, Negara mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam. Sementara di sisi lain, ia merancang elemen-elemen dinamis guna mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam, sesuai dengan kondisi yang ada.

Pada tataran praktis, Negara mengintervensi kehidupan ekonomi guna menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan kehidupan individu. Misalnya, Negara melarang transaksi bisnis dengan bunga, atau penguasaan atas sebidang tanah tanpa mereklamasinya. Demikian pula, Negara menjalankan sendiri aturan hukum yang terkait langsung dengannya. Misalnya, Negara mengimplementasikan prinsip jaminan social dan keseimbangan social sesuai dengan arahan Islam.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 474.

Pada tataran legislatif, intervensi Negara ditujukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum Islam. Negara mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis, sedemikian hingga ia bisa menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum system ekonomi Islam serta merealisasikan keadilan sosial menurut Islam.<sup>82</sup>

Konsep intervensi negara yang dikemukakan Bâqir al-Shadr sangat erat kaitannya dengan konsep beliau tentang *Iqtishâd* yang mengatakan bahwa ada ruang kosong dalam ranah Ekonomi Islam. Dengan demikian, negara, atau lebih tepatnya *wali al-amr*, mendapat amanah pula untuk menciptakan dinamisme dalam penafsiran teks sesuai dengan situasi kontemporer. Oleh karena itu merupakan tugas para mujtahid, berarti Al-Shadr memandang bahwa negara semestinya dijalankan oleh para ahli fiqih atau negara seharusnya memiliki semacam dewan penasehat yang terdiri dari para tetua di tengah masyarakat.<sup>83</sup>

Pemikiran al-Shadr tentang kapasitas Rasulullah sebagai pembawa risalah Ilahi di satu sisi dan sebagai *Wali al-Amr* di sisi lain, memungkinkan terjadinya perubahan hukum disebabkan adanya perubahan waktu dan perbedaan tempat. Sebagai contoh, prinsip hukum yang mengatakan bahwa individu yang mencurahkan kerja di sebidang tanah hingga membuat tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif, lebih berhak atas tanah tersebut ketimbang orang lain, dipandang sebagai prinsip yang adil dalam Islam, karena tidak adil jika ia diposisikan sejajar dengan orang yang tidak

---

<sup>82</sup> Muhammad Bâqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi...*, h. 485.

<sup>83</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Muslim Economic Thought ...*, h. 140.

melakukan kerja apa pun pada tanah tersebut. Namun, dengan meningkatnya kuasa manusia atas alam, prinsip ini bisa dijadikan landasan untuk berekspansi. Pada periode ketika tanah digarap dengan cara-cara tradisional, seorang individu hanya bisa menggarap lahan yang terbatas. Tetapi, dengan berkembangnya kemampuan dan kuasa manusia atas alam, juga dengan hadirnya berbagai sarana yang bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan alam, segelintir individu yang memiliki modal dan kemampuan bisa menggarap lahan yang sangat luas dengan memanfaatkan mesin-mesin besar dan alat-alat berat, sehingga mereka bisa menguasai lahan tersebut. Hal ini dapat mengguncang fondasi keadilan sosial dan mengganggu masalah masyarakat. Maka, dalam hukum harus ada ruang kosong yang bisa diisi sesuai dengan situasi dan kondisi yang aktual. Dalam hal ini, izin umum diberikan kepada penggarap tanah dalam kondisi yang pertama, sementara pada kondisi yang kedua individu hanya diizinkan untuk menggarap tanah dalam batas-batas tertentu yang selaras dengan tujuan-tujuan ekonomi Islam dan gagasan keadilan sosialnya.<sup>84</sup>

Dasar pemikiran Bâqir Al-Shadr tentang intervensi negara sesungguhnya sudah bisa dilacak sejak periode awal Islam (masa Rasulullah saw), jika eksistensi lembaga hisbah dianggap sebagai implementasi dari fungsi intervensi negara di bidang ekonomi, maka pelaksanaan wewenang *hisbah*, walaupun belum terlembaga secara resmi,

---

<sup>84</sup> Muhammad Bâqir al-Shadr, *buku Induk Ekonomi Islam...*, h. 489.

telah dilakukan oleh Rasulullah saw dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar.<sup>85</sup>

Di sisi lain, Fleksibilitas dalam kebijakan ekonomi juga sudah ada sejak periode awal kedatangan Islam, sebagai contoh, dalam pembagian harta *fay'*, di zaman Rasulullah saw *fay'* langsung dibagikan pada hari harta *fay'* didapatkan oleh kaum muslimin dan Rasulullah saw memberikan dua bagian kepada orang yang berkeluarga dan satu bagian kepada bujangan. Pada masa Abu Bakar *fay'* dibagikan kepada orang merdeka dan hamba sahaya sesuai kebutuhannya. Dan pada masa Umar bin Khattab harta *fay'* dibagikan dengan mempertimbangkan kebutuhan seseorang, kedahuluannya masuk Islam, perjuangannya dalam Islam, serta faktor keluarganya. Yang menjadi prinsip dasar dalam perbedaan seperti ini adalah bahwa yang dilakukan berdasarkan ijtihad, lalu masing-masing memperhatikan sisi kemaslahatan menurut apa yang dilihatnya pada masanya.<sup>86</sup>

Contoh fleksibilitas lain nampak dalam kasus penetapan harga di Zaman Umar bin Khattab. Dalam satu kondisi ia pernah memerintahkan Khatib bin Abi Balta'ah untuk menaikkan harga anggur yang diobralnya karena itu bisa merusak harga di pasaran.<sup>87</sup> Akan tetapi pada masa paceklik, yang disebut dengan *'Amm al-Ramadah*, yang terjadi hanya di Hijaz, terjadilah kelangkaan makanan dan pada tahun tersebut harga membubung

---

<sup>85</sup> Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 264

<sup>86</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *al-Fiqh al-Iqtishâdi li Amîr al-Mu'minîn Umar Ibn al-Khaththab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, (Jakarta : Khalifa, 2006), h. 272.

<sup>87</sup> Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'* (terj), (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999), h 360

tinggi. Dalam kondisi ini Umar tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut, bahkan sebaliknya, beliau mengirim makanan dari Mesir dan Syam ke Hijaz. Sehingga berakhirilah krisis tersebut tanpa harus mematok harga.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Taqyuddin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (terj)*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), h. 214

#### **D. Pemikiran Ekonomi Bâqir Al-Shadr di Antara Pemikiran Ekonomi Lain**

##### ***Defenisi Ekonomi Islam***

Secara umum, Ekonomi yang dipahami oleh ekonom konvensional berbeda dengan ilmu ekonomi yang dipahami oleh ekonom muslim karena ekonomi konvensional dan ekonomi Islam beranjak dari *worldview* yang berbeda. Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler sehingga ilmu ekonomi menjadi bebas nilai (*positivistic*). Sementara itu, ekonomi Islam justru dibangun atas prinsip-prinsip Islam dan bermuara kepada akidah Islam.<sup>89</sup> Prof. Dr. Mubyarto, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada dan Ketua Yayasan Agro Ekonomika menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, etika agama kuat sekali melandasi hukum-hukumnya. Dan hal kontradiktif justru terjadi dalam sistem agama lain, keberhasilan ekonomi malahan didasarkan pada penyimpangan ajaran-ajarannya.<sup>90</sup>

Dalam tataran di atas, semua ilmuwan muslim sepakat bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi rabbani atau ekonomi tauhid yang didasarkan atas sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis.<sup>91</sup> Akan tetapi dalam tataran epistimologi, Al-Shadr memiliki pandangan yang berbeda dengan ekonom muslim lain. Latar belakangnya sebagai ahli hukum Islam membuat ia memiliki pemikiran ekonomi tersendiri yang berbeda dengan pemikir ekonomi muslim lain yang memang memiliki latar belakang ilmu ekonomi, terutama ekonomi konvensional, seperti Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah

---

<sup>89</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif...*, h. 15.

<sup>90</sup> Mubyarto, *Etika, Agama dan Sistem Ekonomi*, Makalah pada Pertemuan III Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, YAE-Bina Swadaya, di Financial Club, Jakarta, 19 Februari 2002.

<sup>91</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), cet. Ke-1, h. 2.

Siddiqi, Monzer Khaf, Muhammad Umar Chapra, Kurshid Ahmad dan lain-lain.

Beberapa pengertian ekonomi Islam dikemukakan oleh beberapa orang ekonom muslim. SM. Hasanuzzaman mengatakan bahwa Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah.

Defenisi lain dikemukakan oleh M.A. Mannan, menurutnya Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Kurshid Ahmad mengatakan ilmu Ekonomi Islam adalah upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. M. Nejatullah Siddiqi mengatakan bahwa Ilmu Ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka yang dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah maupun akal dan pengalaman. M. Akram Khan mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (Falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi. Syed Nawab Haidar



Naqvi mengatakan bahwa Ilmu Ekonomi Islam merupakan representasi dari perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim.<sup>92</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pada umumnya ilmuwan muslim memahami bahwa ekonomi Islam mencakup semua teori tentang ekonomi yang telah dijiwai oleh semangat Islam. Dalam hal inilah Al-Shadr memiliki pandangan yang berbeda dengan ilmuwan muslim lainnya. Bagi Al-Shadr ekonomi Islam adalah doktrin yang hanya bermain dalam tataran pondasi dasar. Adapun teori-teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi masyarakat, itu bukanlah bagian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam hanya menyediakan pondasi dasar, di mana di atas pondasi tersebut akan dibangun sebuah sistem yang mengatur kehidupan ekonomi masyarakat.

Apa yang ingin ditekan oleh Al-Shadr dengan membedakan antara ilmu ekonomi dengan doktrin ekonomi adalah bahwa dia ingin menggariskan bahwa Sistem Ekonomi merupakan doktrin yang terikat dengan ideologi Islam. Sehingga sistem ekonomi Islam bersifat pasti (*Rigid*) dan sakral yang tidak bisa berubah disebabkan oleh perubahan zaman dan keadaan. Di atas ideologi inilah seharusnya kita membangun kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi.

Dalam literatur konvensional, kita mengenal bahwa ilmu ekonomi bisa dibedakan menjadi ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi positif membahas atau mempelajari tentang apa dan bagaimana masalah-masalah ekonomi sebenarnya diselesaikan, sedangkan ilmu ekonomi

---

<sup>92</sup> M. Umer Chapra, *Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, terj. Amidar Amir dkk, (Jakarta : SEBI, 2001), h. 146 dan Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif ...*, h. 16-17.

normatif membahas tentang apa dan bagaimana seharusnya (*Value Judgment*) permasalahan ekonomi diselesaikan.<sup>93</sup> Bâqir Al-Shadr tidak terjebak untuk memperdebatkan antara normatif dan positif. Sehingga ekonomi normatif menjadi benda langit yang tidak pernah membumi dan sebaliknya ekonomi positif menjadi fakta yang jauh dari kondisi ideal (yang diharapkan). Dari pemikiran ini Bâqir Al-Shadr membedakan antara ilmu ekonomi dengan doktrin ekonomi Islam.

### ***Kepemilikan Multi Jenis***

Konsep Al-Shadr tentang kepemilikan multi jenis yang terdiri dari kepemilikan pribadi, kepemilikan publik dan kepemilikan negara, merupakan pendapat mayoritas dari para ekonom muslim modern. Beberapa ekonom muslim yang pernah mengemukakan teori kepemilikan dalam Islam, seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi, Mauhammad Abdul Manan, Syed Nawab Haider Naqvi,<sup>94</sup> Monze Khaf, Taqiuddin al-Nabhani dan Sayyid Mahmud Taleghani<sup>95</sup> mengemukakan pendapat yang sama.

---

<sup>93</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, h. 3

<sup>94</sup> Syed Nawab Haider Naqvi dilahirkan di Pakistan pada tahun 1935, ia mendapatkan gelar Master di Yale University (1961) dan Ph.D dari Princeton University (1966). Lihat Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Muslim Economic Thought ...*, h. 63.

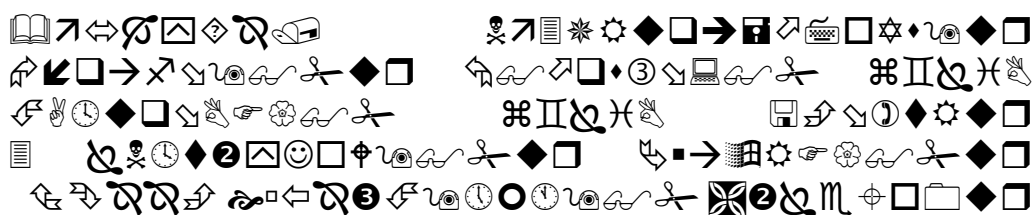
<sup>95</sup> Sayyid Mahmud Taleghani dilahirkan di Desa Golyard, distrik Taliqan, Iran Utara. Ia mendapatkan pendidikan formalnya di Qom, di Madrasah Razaviyah dan Faiziyah yang terkenal dan memperoleh sertifikat kompetensi dalam bidang *Ijtihad* dari para gurunya di sana. Lihat *Ibid.*, h. 111.

### ***Persoalan Ekonomi Dalam Pandangan Pakar***

Persoalan ekonomi, bagi sebagian besar pemikir ekonomi, bertitik tolak dari dua hal, yaitu kelangkaan sumber daya dan tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Dua hal ini ditolak oleh Bâqir Al-Shadr.

Bagi Bâqir Al-Shadr, *Scarcity* (kelangkaan sumber daya) merupakan pendapat yang keliru karena menurutnya Allah telah menciptakan alam ini dengan penuh perhitungan dan keseimbangan. Dalam hal ini Masudul Alam Choudhury dalam bukunya *Contributions to Islamic Economic Theory*, sebagai mana dikutip oleh Edwin Nasution dkk, mengatakan bahwa manusia menduga adanya kelangkaan karena adanya keterbatasan tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.<sup>96</sup>

Akan tetapi, pendapat ini tidak sepenuhnya disetujui oleh semua ekonom muslim. Seperti Muhammad Abdul Mannan yang mengatakan masalah ekonomi muncul karena kelangkaan. Bagi sebagian ilmuwan muslim, kelangkaan itu sendiri diakui oleh al-Qur'an dan Hadis Nabi. Beberapa ayat yang dikemukakan adalah :



<sup>96</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), cet. Ke-2, h. 55.

*“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.*<sup>97</sup>

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ekonom muslim tentang kelangkaan sumber daya, khususnya antara Bâqir Al-Shadr dengan ekonom muslim dari mazhab mainstream, bukanlah perbedaan yang tidak bisa dicarikan titik temunya. Perbedaan pendapat muncul karena mereka menilai objek yang berbeda. Ketiadaan kelangkaan yang dimaksudkan Bâqir Al-Shadr adalah kelangkaan absolut, sementara kelangkaan yang dimaksudkan oleh ilmuwan muslim lain adalah kelangkaan relatif.

Adanya relatifitas kelangkaan bukan berarti sumber-sumber ekonomi yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan umat manusia saat ini ataupun generasi berikutnya. Hal tersebut merupakan pemahaman yang berbeda. Ketika sebagian ilmuwan muslim berbicara tentang kelangkaan barang, maka fokus bahasannya adalah tersedianya sumber-sumber ekonomi baik dari segi bentuk, macam, waktu dan tempat dalam rangka memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Dan saat Bâqir Al-Shadr berbicara tentang kecukupan sumber-sumber ekonomi, maka pembahasannya berpusat pada kecukupan sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara global demi terjaganya eksistensi kehidupan manusia di atas bumi. Singkatnya dapat dikatakan bahwa kelangkaan yang dimaksudkan oleh ilmuwan lain bersifat

---

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 39.

mikro, sementara Bâqir Al-Shadr berbicara dalam konteks makro (*Absolute Scarcity*).

Teori Bâqir Shadr tentang ketiadaan kelangkaan Absolut ternyata pernah disinggung oleh Keynes. Menurut Keynes kelangkaan absolut (universal) bukanlah hal yang tidak bisa dihindari, kelangkaan ini bisa teratasi dengan meningkatkan kredit secara progresif untuk meningkatkan *Full Employment* (produksi secara maksimal).<sup>98</sup>

Dia juga menolak teori yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas. Namun demikian, sebagian ahli ekonomi Islam mengatakan bahwa keinginan manusia yang tidak terbatas yang pada akhirnya memunculkan persoalan ekonomi dianggap sebagai hal yang alamiah dan merupakan sesuatu yang diakui oleh Islam. Hal ini antara lain dapat dilihat pada Surat al-Takâtsur ayat 1-5:

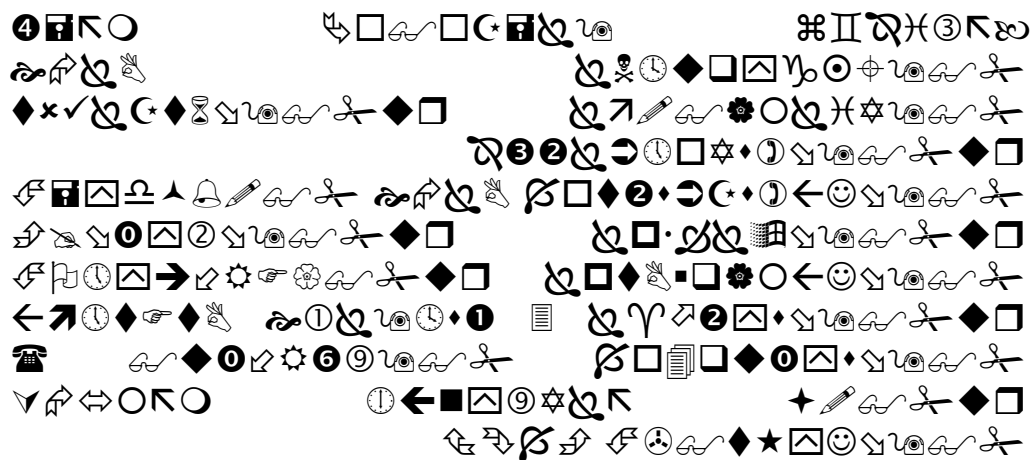
﴿مَرَجَ الْبَرْصَ وَالْبَقَاةَ إِخْفَاءَ ۚ وَمِنْ فَجْأٍ لَّهُ يَكْسِبُونَ ﴿١﴾ لَا يَصْلَاهُ أَعْيُنُكُمْ ۚ إِنَّمَا يَرَىٰ عِلْمُ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ غَافِلٌ إِلَّا تَشَاءَ ۚ وَلَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ ۖ إِنَّمَا يُدْرِكُ الْبَصَرَ شَرُّ دَلِيلٍ ۚ وَإِنَّكَ إِذْ يَمُنُّ بِآيَاتِنَا لَا يَحْكُمُ بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّمَا لَدُنَّا عِلْمُ الْغُيُوبِ ﴿٢﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۚ وَابْتَغِ الْوَعْدَ الْآخِرَ ۚ إِنَّكَ مُبْهَمٌ بِالْأُولَىٰ ۚ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا ۖ فَلْيَأْكُلُوا مِمَّا دَلَّ لَهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ ۚ ﴿٣﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۚ وَابْتَغِ الْوَعْدَ الْآخِرَ ۚ إِنَّكَ مُبْهَمٌ بِالْأُولَىٰ ۚ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا ۖ فَلْيَأْكُلُوا مِمَّا دَلَّ لَهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ ۚ ﴿٤﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۚ وَابْتَغِ الْوَعْدَ الْآخِرَ ۚ إِنَّكَ مُبْهَمٌ بِالْأُولَىٰ ۚ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا ۖ فَلْيَأْكُلُوا مِمَّا دَلَّ لَهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ ۚ ﴿٥﴾﴾

*Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu, (1) Sampai kamu masuk ke dalam kubur. (2) Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), (3) Dan janganlah begitu, kelak kamu akan Mengetahui. (4) Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, (5). (QS. Al-Takâtsur : 1-5)*<sup>99</sup>

Argumen lain yang dikemukakan adalah Surat Ali Imran ayat 14 :

<sup>98</sup> Mark Skousen, *The Making of Modern Economics : The Lives and Ideas of Great Thinkers*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern : Sejarah Pemikiran Sosial*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-3, h. 115.

<sup>99</sup> *Ibid.*, h. 1096.



*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa*

*yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*<sup>100</sup>

Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغى ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب

*“Jika seandainya manusia memiliki dua lembah yang dipenuhi dengan harta, maka niscaya mereka akan mencari lembah yang ketiga, mulut manusia tidak akan penuh (tidak akan puas) kecuali oleh tanah, dan bertobatlah kepada Allah bagi orang yang mau bertobat.”*(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>101</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, ilmuwan muslim klasik telah memberikan penjelasan tentang perbedaan *Hajah* (kebutuhan) dengan *Rughbah* / *Syahwah*

<sup>100</sup> *Ibid.*, h. 77.

<sup>101</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bâri Juz 11*, (Beirut : Dar al-Ma‘rifah, th), h. 253.

(keinginan). Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis di atas berkaitan dengan *Rughbah* dalam kehidupan dunia.<sup>102</sup> Dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hajah adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Sementara ayat-ayat yang dikemukakan di atas cenderung berbicara tentang ketamakan manusia dalam mengejar kesenangan dunia. Jadi ada perbedaan antara *satisfying wants* (memperoleh kepuasan) dengan *meeting needs* (memenuhi kebutuhan). Kepuasan manusia mungkin tidak terbatas, akan tetapi kebutuhan manusia memiliki garis demarkasi yang bisa ditentukan.<sup>103</sup> Di samping itu, perlu digarisbawahi, bahwa ketamakan manusia adalah terhadap harta secara umum, bukan terhadap barang tertentu. Seseorang mungkin tidak akan pernah puas mencari kekayaan, akan tetapi seseorang akan menemui kepuasan dan kejenuhan ketika dia mengkonsumsi jenis barang yang sama terus menerus. Pendapat ini jika dilacak dalam teori ekonomi modern memiliki kemiripan dengan Hukum Gossen I, yaitu hukum kepuasan yang semakin berkurang (Law of diminishing utility), yang berbunyi : ” *Jika suatu kebutuhan dipenuhi terus menerus, maka kenikmatannya makin lama makin berkurang, sehingga akhirnya dicapai rasa kepuasan*”. Dan Hukum Gossen II, yaitu hukum perata nilai batas atau Law of Marginal utility, yang berbunyi : ”*Manusia akan berusaha untuk*

---

<sup>102</sup> al-Nawawi, *al-Minhâj Syarah Shahih Muslim Juz 7*, (Kairo : al-Mathbaqah al-Mishriyah al-Azhar, 1929), h. 139.

<sup>103</sup> Ulama klasik telah banyak membahas tentang tingkatan kebutuhan manusia. Pada umumnya ulama membedakan tingkat kebutuhan kepada tiga tingkat, yaitu *Dharuriyah*, *Hâjîyah* dan *Tahsiniyah*. Akan tetapi belakangan Imam Suyuthi menulis lima tingkatan kebutuhan, yaitu *Dharurah*, *Hajah*, *Manfa'ah*, *Zinah* dan *Fudhul*.

*memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama.”*

### ***Tanggung Jawab Negara Di Bidang Ekonomi***

Ilmu tentang hubungan dan kebijakan pemerintah dengan perkembangan ekonomi dewasa ini dikenal dengan nama *Political Economy*.<sup>104</sup> Pemikiran Bâqir al-Shadr tentang perlunya negara campur tangan negara dalam urusan ekonomi merupakan pendapat mayoritas ulama Islam. Bahkan pemikiran ini sudah bisa dilacak dari pemikiran ilmuwan muslim klasik. Hal ini antara lain bisa dilihat dalam *Ihyâ' Ulum al-Dîn* karya Imam al-Ghazali,<sup>105</sup> Sementara al-Mawardi mengatakan bahwa pelaksanaan kepemimpinan merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia.<sup>106</sup> Ibnu Khaldun mengatakan bahwa syariah tidak akan tegak jika tidak melalui peran negara atau penguasa, negara tidak akan berjalan baik tanpa adanya implementasi hukum syariah. Negara atau pemerintahan tidak akan berjalan baik tanpa adanya orang (khalifah). Keberlangsungan orang tidak akan berjalan tanpa adanya kapital/harta (*al-mâl*). Harta didapatkan dari pembangunan yang signifikan (*imârât*), dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya keadilan, dan keadilan adalah salah satu kriteria manusia dihisab oleh Allah

---

<sup>104</sup> Syed Farid Alatas, *Islam and the Science of Economics*, dalam *the Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*, (Victoria : Balckwell Companion, 2006), h. 596-599.

<sup>105</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyâ' Ulum al-Dîn Juz 1*, (Beirut: Dar an-Nadwah, tt), h. 17

<sup>106</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1978), h. 5.



SWT. Maka, menurut Ibnu Khaldun penerapan syariah pada negara tidak akan tegak tanpa didasari oleh keadilan di bidang sosial dan ekonomi.<sup>107</sup>

Ketegasan nash syara' dalam menjelaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan umum dan mewujudkan keseimbangan sosial merupakan penyebab hampir tidak adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Namun dari tiga peran pemerintah yang dikemukakan Baqir al-Shadr di atas, peran intervensi pemerintah merupakan salah satu poin yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Peran intervensi negara dalam ekonomi yang dikemukakan Baqir al-Shadr memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penetapan regulasi ekonomi. Dalam hal ini Baqir al-Shadr mengatakan bahwa adakalanya Rasulullah saw menetapkan regulasi di tengah masyarakat dalam kapasitas sebagai seorang kepala negara, bukan sebagai seorang pembawa risalah Ilahi. Regulasi seperti ini bisa saja berubah seiring perubahan tempat, waktu dan kondisi.

Syah Waliyullah al-Dahlawi mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis bisa dibagi dua,<sup>108</sup> yaitu :

*Pertama*, hadis yang disampaikan dengan maksud untuk menyampaikan risalah (syari'at). Hadis-hadis yang seperti inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam al-Qur'an :

---

<sup>107</sup>Muhammad Imaduddin, *Kontribusi Para Ilmuwan Muslim Terhadap Perkembangan Ilmu Ekonomi*, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com)

<sup>108</sup>Syah Waliyullah al-Dahlawi, *Hujjah Allâh al-Bâlighah Juz I*, (Beirut : Dar al-Jil, 2005), h. 224.



*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. (QS. Al-Hasyr : 7)<sup>109</sup>*

Contoh dari hadis-hadis ini adalah perkataan Rasulullah saw yang berkaitan dengan janji dan alam ghaib, syari'at dan bentuk ibadah, hikmah dan mashlahah mutlak serta hadis-hadis yang menerangkan tentang fadhilah amal.

*Kedua*, hadis yang disampaikan bukan untuk maksud menyampaikan risalah. Seperti kata-kata Rasulullah saw dalam kisah penyerbukan bunga kurma yang dilakukan oleh penduduk Madinah :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَّأْيٍ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ<sup>110</sup> (رواه المسلم)

*“Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa, apabila saya memerintahkan persoalan agama kepadamu, maka laksanakanlah, dan apabila saya memerintahkan persoalan dari pendapatku (tentang dunia), maka sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa” (HR. Muslim)<sup>110</sup>*

Termasuk ke dalam kategori ini adalah perkataan Rasulullah saw tentang pengobatan, sesuatu yang dilakukan Nabi saw sebagai adat kebiasaan, bukan sebagi ibadah, sesuatu yang ia katakan sebagai mana juga dikatakan oleh kaumnya. Termasuk juga dalam kategori ini adalah sesuatu yang disampaikan Rasulullah saw dalam meraih Mashlahah Juz'i, bukan mashlahah yang berlaku

<sup>109</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 916.

<sup>110</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shaheh* Juz 7, (tt, Dar al-Fikr, t.th), h. 95.

umum untuk semua umat dan sepanjang masa. Seperti pengaturan pasukan dalam pertempuran,<sup>111</sup>

Baqir al-Shadr melihat bahwa ketetapan dalam hal ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah saw adalah untuk mencapai mashlahah yang bersifat parsial dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala negara.

Pemikiran Bâqir al-Shadr tentang tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi sangat berbeda dengan apa yang diyakini dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, akan tetapi pemikiran-pemikirannya dalam hal ini memiliki kesamaan, walaupun tidak secara keseluruhan, dengan teori-teori yang pernah dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Keynes, bagi sebagian ahli, dianggap sebagai penyelamat kapitalisme. Dia menolak ide tantang nasionalisasi perekonomian, penetapan kontrol upah-harga, intervensi dalam penawaran dan permintaan, dan teori-teori lain yang dikemukakan dalam sistem sosialis. Akan tetapi Keynes sendiri juga tidak sepakat dengan kapitalisme murni. Menurut Keynes, kapitalisme pada dasarnya tidak stabil dan tidak berkecenderungan ke arah *Full Employment*. Oleh karena itu peran pemerintah tetap diperlukan untuk mengendalikan kendaraan kapitalis dan mengembalikannya ke jalan menuju kemakmuran.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Syah Waliyullah al-Dahlawi, *Hujjah Allâh al-Bâlighah Juz I...*, h. 225.

<sup>112</sup> Mark Skousen, *The Making of Modern Economics ...*, h. 395

## **E. Relevansi Pemikiran Ekonomi Bâqir Al-Shadr dengan Konteks Kekinian**

### ***Eksistensi Doktrin Ekonomi***

Doktrin ekonomi merupakan sesuatu yang eksis di tengah masyarakat dalam memecahkan persoalan ekonomi yang dihadapinya. Begitu juga teori-teori dalam ilmu ekonomi sering kali beranjak dari doktrin yang diyakini di tengah masyarakat. Anjuran pengendalian kelahiran adalah salah satu contoh solusi yang ditawarkan oleh Thomas Robert Malthus untuk memecahkan persoalan ekonomi yang akan dihadapi umat manusia di masa yang akan datang, anjuran ini beranjak dari doktrin yang ia yakini tentang pertumbuhan umat manusia.

Kemunculan Doktrin ekonomi kadang-kadang juga merupakan reaksi terhadap kenyataan yang ada ketika itu, sebagai contoh, di tahun 1776, ketika Adam Smith menulis buku *The Wealth of Nations* yang menganjurkan doktrin kebebasan dalam perdagangan, saat itu kebebasan dalam perdagangan bukanlah merupakan gejala sehari-hari.<sup>113</sup> Begitu juga dengan kemunculan jilid pertama dari buku *Das Capital* karya Karl Marx di tahun 1867 yang merupakan reaksi atas kesenjangan sosial yang terjadi pada saat itu, ajaran dalam buku ini baru

---

<sup>113</sup> Filsafat moral Smith sendiri sangat dipengaruhi oleh filsafat Stoa atau Stoisisme, suatu aliran filsafat yang berkembang di Yunani Kuno yang bernama Zeno, pasca Aristoteles dan Plato. Zeno berpendapat bahwa keteraturan dunia ini bukanlah suatu kebetulan semata. Keteraturan segala sesuatu, dan mengarahkan segala sesuatu itu disebut juga sebagai nasib, atau takdir. Lihat Sonny Keraf, *Pasar bebas Keadilan dan Peran Pemerintah, Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta : Kanisius, 1996), h. 23-25

terwujud 50 tahun kemudian, yaitu ketika terjadinya Revolusi Bolshevik pada bulan Oktober 1917.<sup>114</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, doktrin ekonomi tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari cita-cita pendirian Bangsa. UUD 1945 merupakan sebuah konstitusi ekonomi yang menjadi doktrin rujukan untuk menjalankan sistem ekonomi nasional dalam menjamin kesejahteraan rakyat, melalui penerapan sistem ekonomi Indonesia yang berbasis kerakyatan dan keadilan bagi masyarakat luas. Hal ini dipertegas lagi dengan amandemen keempat UUD 1945 yang merubah judul Bab XIV UUD 1945 dari semula berjudul “Kesejahteraan Sosial” menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Dengan judul ini UUD 1945 menegaskan diri sebagai konstitusi ekonomi di samping juga merupakan konstitusi di bidang politik.

Dalam perekonomian pancasila sebagai sistem khas perekonomian Bangsa Indonesia, kita akan menemukan beberapa kemiripan dan kesesuaian dengan doktrin ekonomi yang pernah dikemukakan Baqir al-Shadr. Hal ini bisa kita lacak dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila-sila dari Pancasila. Dalam alinea tiga Pembukaan UUD 1945 dirumuskan empat tujuan pokok Bangsa Indonesia. Tujuan tersebut adalah, *Pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum, *Ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan *Keempat*, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

---

<sup>114</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, (terj.), (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) h. 14 dan Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h, 361.

perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>115</sup> Tujuan tersebut, bila ditarik relevansinya dengan konsepsi ekonomi Islam sebagaimana yang ditawarkan oleh Bâqir Al-Shadr, merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sangat menekankan keadilan sosial.

Dalam hal kepemilikan multi jenis, Dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, begitu juga bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi hal ini tidak menafikan kepemilikan dan kebebasan individu untuk berakfitias di ranah ekonomi. Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 menyatakan : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.<sup>116</sup>

Kenyataan bahwa di suatu negara ada kepemilikan pribadi dan kepemilikan negara juga didapatkan di berbagai negara dan diakui oleh negara tersebut. Kata-kata “dikuasai oleh negara” yang termaktub dalam pasal 33 UUD 1945 juga dirumuskan dalam konstitusi negara lain yang menggunakan istilah *Owned by, belong to*, atau ada yang tegas menyebutnya sebagai *state's property*. Penggunaan istilah tersebut terdapat dalam beberapa konstitusi negara-negara komunis dan negara anti komunis. Di Eropa hal tersebut dapat kita temukan dalam konstitusi Perancis, Portugal, Spanyol dan Belgia. Untuk negara-negara bekas komunis kita dapat melihatnya dalam konstitusi Rusia, Hongaria, Polandia dan Ukraina. Di Afrika dan Amerika Selatan ketentuan

---

<sup>115</sup> Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), cet. Ke-7, h. 3.

<sup>116</sup> *Ibid.*, h. 56.

yang sama juga bisa ditemukan dalam konstitusi Nigeria, Afrika Selatan, Mesir, Brasil, Argentina, Meksiko, Ekuador, dan Kuba. Sementara untuk Asia ketentuan yang sama bisa ditemukan dalam konstitusi RRC, India, Filipina, Vietnam, Singapore dan Taiwan. Negara-negara kapitalis yang didasari oleh asas hak milik yang bebas tanpa batas ternyata tidak dapat menghindari diri dari kejatuhannya dalam jurang kapitalisme yang tak terkendali, dan sebagai akibatnya terjadilah nasionalisasi alat-alat produksi dan industri-industri besar. Di lain pihak, asas-asas kolektivisme yang diusung oleh kaum sosialis dan komunis, betapapun ketatnya asas-asas itu dilaksanakan, ternyata dalam batas-batas tertentu memungkinkan orang memperoleh hak milik atas keperluan-keperluan pokok seperti perumahan dan tanah pertanian. Penyimpangan-penyimpangan ini menunjukkan bahwa pandangan kapitalisme dan kolektivisme dalam hal kepemilikan bukanlah pandangan yang benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan nyata.<sup>117</sup>

Kebebasan tanpa batas sebagai mana yang dikampanyekan oleh kaum kapitalis melalui slogan *Laissez Faire*-nya juga bukan pandangan yang benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Keynes, yang dianggap sebagai penyelamat kapitalisme dari kehancuran pada dekade 30an, dalam pidatonya yang berjudul *the End of Laissez Faire* mengatakan : “tidak benar bahwa individu mempunyai kebebasan alamiah dalam aktifitas ekonominya”.<sup>118</sup> Kebebasan tanpa batas, di samping akan menimbulkan eksploitasi satu pihak

---

<sup>117</sup> Mahmud Taligani, *Ciri-ciri Ekonomi Islam*, dalam John J Donohue dan John L Esposito (ed), *Islam in Transition : Muslim Perspectives*, (terj), (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995), h. 385.

<sup>118</sup> Mark Skousen, *The Making of Modern Economics ...*, h. 414.

terhadap pihak lain, juga akan membuka jurang kesenjangan sosial yang semakin lebar. Sebagai contoh, menurut indeks kebebasan ekonomi 2012 dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *The Heritage Foundation*, Hong Kong merupakan negara yang menempati peringkat pertama dari 179 negara dalam hal kebebasan ekonomi. Akan tetapi konsekuensinya, di Hong Kong terdapat kesenjangan sosial yang cukup jauh.<sup>119</sup> Dalam kaitan ini, pandangan al-Shadr tentang prinsip *al-Hurriyyah al-Iqtishâdiyah fi Nithaq Mahdud*, kebebasan dalam melakukan aktifitas ekonomi dalam batas-batas tertentu layak untuk dikedepankan. Dalam tataran praktis, di Indonesia prinsip ini sudah terlihat dengan adanya beberapa undang-undang dan perpu yang berkaitan dengan transaksi bisnis, seperti perpu kepailitan, perpu persaingan dan monopoli. Di Amerika Serikat peraturan-peraturan yang mengatur lalu lintas bisnis juga bisa ditemukan, seperti *Sherman Act* yang menyatakan setiap usaha monopoli atau usaha mengontrol perdagangan adalah ilegal. Kemudian diikuti oleh *Federal Trade Comission Act* dan *Clayton Act* (1914), *Robinson-Patman Act* (1936), *Celler-Kefauver* (1950), *Hart-Scott-Rodino* (1976) dan seterusnya.<sup>120</sup>

#### *Ketiadaan Kelangkaan Versus Essay on Population*

Konsep Bâqir al-Shadr tentang ketiadaan kelangkaan di dunia akan bertolak belakang dengan konsep yang dihadirkan oleh Thomas Robert

---

<sup>119</sup> [www.heritage.org](http://www.heritage.org), 2012 *Index of Economic Freedom*, 15 Januari 2012.

<sup>120</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 30.



Malthus.<sup>121</sup> Malthus, dengan teori populasinya (*Essay on Population*) mengatakan bahwa : *pertambahan populasi manusia mengikuti deret ukur dan pertumbuhan sumber daya pendukung mengikuti deret hitung*. Itu berarti suatu ketika daya dukung alam tidak akan mampu memberi kehidupan kepada manusia karena kalah cepat pertumbuhannya. Bahkan lebih lanjut Malthus mengatakan : “kekuatan populasi yang superior tidak bisa diimbangi tanpa menghasilkan penderitaan atau kejahatan”.<sup>122</sup>

Ternyata teori Malthus tidak terbukti, karena ternyata selalu ada teknologi dan penemuan baru untuk mengatasi kelangkaan. Sebagai contoh, ketika kuantitas minyak bumi dunia jumlahnya terbatas, maka akan dapat kita temukan sumber energi lain yang dapat kita gunakan sebagai ganti, seperti gas, nuklir, biofuel dan lain-lain. Luas lahan yang kita gunakan untuk bertani bisa jadi terbatas, namun akan dapat ditemukan teknologi baru untuk mengatasi keterbatasan lahan tersebut. Hal ini selalu saja mungkin terjadi karena kesempatan untuk melakukan penelitian dan penemuan teknologi sangat tidak terbatas.<sup>123</sup> Di sisi lain, pertumbuhan hewan dan tumbuh-tumbuhan jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan manusia. Kita jarang menemukan manusia yang melahirkan anak kembar, akan tetapi hewan bisa melahirkan anak dalam jumlah yang banyak.

---

<sup>121</sup> Thomas Robert Malthus (1766-1834) pernah menjadi pendeta untuk Gereja Inggris. Tahun 1805 dia diangkat menjadi profesor sejarah modern dan ekonomi politik di East India Company College, Haileybury. JM Pullen mengatakan “Malthus sang demografer tidak bisa dipisahkan dari Malthus sang teolog”. Lihat *Ibid*, h. 88.

<sup>122</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>123</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), cet. Ke-2, h. 74-75.

### ***Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah***

Paul A Samuelson mengatakan bahwa bentuk ideal ekonomi pasar tidak pernah terwujud dalam dunia nyata. Tidak ada negara di dunia di mana pemerintahnya betul-betul tidak ikut campur dalam masalah ekonomi masyarakatnya.<sup>124</sup> Sementara Keynes,<sup>125</sup> sebagaimana dikutip Skousen, mengatakan bahwa kapitalisme pada dasarnya tidak stabil dan tidak berkecenderungan ke arah *full employment*.<sup>126</sup> Lebih lanjut Samuelson mengatakan bahwa ada beberapa fungsi yang harus dijalankan pemerintah di bidang ekonomi, yaitu :

- (a) Meningkatkan efisiensi dengan meningkatkan persaingan, mengendalikan efek buruk dari kegiatan ekonomi atau produksi seperti polusi, dan menyediakan fasilitas umum,
- (b) Meningkatkan keseimbangan sosial dengan menarik pajak dan mendistribusikan kembali kepada golongan tertentu, seperti jompo dan orang-orang miskin,
- (c) Mengembangkan stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan fiskal dan regulasi moneter.<sup>127</sup>

Pernyataan Samuelson dan Keynes di atas menunjukkan bahwa sistem kapitalisme nyata-nyata tidak bisa hanya beroperasi dengan mekanisme

---

<sup>124</sup> Paul A Samuelson dan William Nordhaus, *Economics ...*, h. 34.

<sup>125</sup> John Maynard Keynes (5 Juni 1883-21 April 1946) adalah ekonom kelahiran Inggris terkenal dengan karyanya *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936). Dalam catatan sejarah dikatakan sebagai penyelamat kapitalisme. Walaupun sebagian ahli mengatakan bahwa buku yang ditulis Keynes tersebut merupakan serangan paling halus dan jahat terhadap Kapitalisme Ortodoks dan kebebasan berusaha. Majalah Times memilih Keynes sebagai ekonom yang paling berpengaruh di abad XX. Lihat Mark Skousen, *The Making of Modern Economics...*, h. 399.

<sup>126</sup> *Ibid.* H. 397.

<sup>127</sup> Paul A Samuelson dan William Nordhaus, *Economics ...*, h. 35.

*Invisible Hand* tanpa disokong oleh keberadaan pemerintah dalam ranah ekonomi. Peran pemerintah di bidang ekonomi menjadi sangat penting dan fatal jika mekanisme pasar bebas tidak mampu berjalan dengan sebenarnya.

Dalam konteks keindonesiaan, Pernyataan Al-Shadr tentang kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan sosial diamini oleh konstitusi Negara RI yang tertuang dalam Bab XIV UUD 1945, dalam bab ini secara tegas dijelaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam amandemen keempat tahun 2002, pasal 34 ayat 2 dengan tegas mengatakan :

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”<sup>128</sup>

Selanjut pada ayat 3 pasal yang sama dinyatakan :

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”.<sup>129</sup>

Di samping pasal di atas, juga disinggung masalah pendidikan yang juga merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Amandemen keempat tahun 2002 Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 mengatakan :

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.<sup>130</sup>

Di bidang sosial, seperti gerakan pengentasan angka kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran juga merupakan salah satu bentuk tanggung

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ibid.*, h. 58.

jawab negara yang bila ditelaah sedikit banyak telah mengacu kepada konsepsi yang ditawarkan oleh Bâqir Al-Shadr di atas. Beberapa program yang berkenaan dengan pernyataan ini, bisa dilihat bentuknya dalam bentuk PNPM, serta bentuk jaminan sosial lainnya, seperti ASKESKIN, BLT (Bantuan Langsung Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), Raskin dan lain sebagainya.

Tidak hanya jaminan sosial, mewujudkan keseimbangan sosial di tengah masyarakat juga menjadi perhatian Bâqir al-Shadr. Keseimbangan sosial yang ditawarkan al-Shadr adalah dengan pemberdayaan masyarakat miskin, di samping distribusi kekayaan secara langsung. Dalam konteks Indonesia, usaha untuk mewujudkan keseimbangan sosial tersebut terlihat dalam program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Di zaman Orde Baru, program pemberdayaan masyarakat bisa dilihat dalam program transmigrasi, PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan lain-lain.

Di samping jaminan sosial, Al-Shadr juga mengungkapkan bahwa intervensi dalam kegiatan ekonomi juga menjadi salah satu bagian dari peran negara di bidang ekonomi. Dewasa ini, lembaga hisbah, sebagai wujud dari intervensi negara dalam kegiatan ekonomi, masih ditemukan di beberapa negara Islam, seperti di Arab Saudi, berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Arab Saudi tanggal 03 September 1396 H, dan Kerajaan Marokko, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20/82 tanggal 21 Juni 1982.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Akhmad Mujahidin, *Pelembagaan Hisbah di Indonesia*, Jurnal Al-Fikra Vol. 03 No. 2, (Pekanbaru : Suska Press, ), h. 62.

Di samping itu, intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi pada saat ini tidak hanya menjadi ciri khas negara-negara yang dikenal beraliran sosialis, di negara-negara kapitalis wujud intervensi negara sudah mulai ditemukan, AS yang sangat mendukung globalisasi dan pasar bebas ternyata tetap memberi proteksi atas sejumlah sektor pertanian dan industrinya.<sup>132</sup> Begitu juga negara-negara seperti Perancis, Spanyol dan lain sebagainya.

Dalam *The Roaring Nineties* yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Dekade Keserakahan: Era 90-an dan Awal Petaka Ekonomi Dunia, sebagaimana dikutip oleh Khairunnisa Musari, Stiglitz mengangkat dampak buruk kebijakan liberalisasi pasar yang menjadi konsekuensi sistem globalisasi, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Buku ini membongkar kemunafikan dan standar ganda kebijakan ekonomi AS yang didesakkan ke negara-negara berkembang dalam paket liberalisasi pasar perdagangan. Bagi Stiglitz, kekuatan pasar bebas sering merugikan segmen-segmen besar masyarakat yang lemah, sehingga harus dilindungi oleh intervensi pemerintah.<sup>133</sup>

Dalam konteks keindonesiaan peran pemerintah dalam ranah ekonomi nampak jelas dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Kata “disusun” dalam pasal di atas menunjukkan bahwa

---

<sup>132</sup> Joseph E Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, [www.josephstiglitz.com](http://www.josephstiglitz.com), 10 Januari 2012.

<sup>133</sup> Khairunnisa Musari, *Stiglitz Indonesia dan Ekonomi Syari'ah*, [www.pkesinteraktif.com](http://www.pkesinteraktif.com), 4 October 2010.

perekonomian indonesia diatur sengaja, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan sistematis dan menyeluruh.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam pidato akademik penganugrahan gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) Bidang Pemikiran Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang tanggal 08 Oktober 2011, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini lebih bertumpu pada konglomerasi, menimbulkan berbagai kepincangan yang menghalangi rakyat Indonesia meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya, kondisi ekonomi seperti ini tidak bisa dipertahankan terus menerus, sebaliknya harus diperbaiki dengan memberdayakan ekonomi rakyat. Di antaranya adalah dengan meningkatkan peran koperasi. Namun, lanjutnya, tantangan Bangsa Indonesia ke depan adalah mengembangkan koperasi yang kuat, sehat, mampu hidup berkesinambungan dan dapat bersaing dengan kekuatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, perlu dukungan kebijakan pemerintah, yakni kebijakan yang memberikan prioritas kepada koperasi dan ekonomi rakyat secara keseluruhan, sehingga koperasi bisa bersaing dengan kekuatan-kekuatan pasar lainnya.<sup>134</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hatta Radjasa, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Dalam sambutannya saat menghadiri Musykernas II Pimpinan Pusat Persatuan Islam (persis) di Pesantren Persis Putri, Bangil, Pasuruan Jawa Timur tanggal 09 Oktober 2011, Hatta Radjasa mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa dibangun dengan prinsip

---

<sup>134</sup> www.Media Indonesia.Com, *Ekonomi Konglomerasi Harus Dihentikan*, 08 Oktober 2011.

neoliberalisme atau pasar bebas karena tidak mampu mendatangkan keadilan ekonomi dan tidak mampu mengontrol keserakahan. Yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah pasar sosial berkeadilan. Menurut Hatta globalisasi dan keterbukaan dalam ekonomi tidaklah menjadi masalah, tetapi tetap diperlukan tangan negara untuk menjaga agar tidak ada distorsi akibat keserakahan. Masyarakat lemah harus dilindungi dengan dana subsidi serta program perlindungan sosial.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> [www.Okezone.com](http://www.Okezone.com). *Ini Alasan Neoliberalisme Tidak Cocok Untuk Ekonomi RI*, 09 Oktober 2011.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi Islam dalam pandangan Sadr bukanlah ilmu yang berisi yang penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala (fenomena-fenomena) lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya. Ekonomi Islam adalah doktrin yang berisi aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi seperti nilai-nilai keadilan. Konsep-konsep dasar ini bersifat *Tsubut* dan dari sini dihasilkan aturan-aturan (teori-teori) yang bersifat fleksibel sesuai dengan tuntunan zaman. Di antara doktrin ekonomi tersebut adalah Kepemilikan multi jenis, Kebebasan dalam aktifitas ekonomi dan nilai keadilan. Karena ekonomi Islam adalah doktrin yang berisi prinsip dasar, maka Islam menyisakan ruang kosong yang cukup luas untuk diisi oleh negara sebagai *wali al-amr*.
2. Persoalan Ekonomi bukan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas sebagai mana yang diyakini oleh kaum kapitalis, juga bukan disebabkan oleh kesenjangan mode produksi dengan distribusi kekayaan yang disebabkan oleh



pertentangan kelas sebagaimana yang diyakini oleh kaum sosialis. Allah Maha Adil sehingga tidak akan mungkin zalim terhadap hamba-Nya dengan membiarkan hamba-Nya hidup tanpa menyediakan kebutuhan kehidupan mereka. Islam juga mengakui kepemilikan pribadi sebagai mana yang dibantah oleh kaum sosialis. Persoalan Ekonomi muncul karena disebabkan oleh dua factor yang mendasar. Pertama adalah karena perilaku manusia yang melakukan kezaliman (*Zhalum*) dan kedua karena mengingkari nikmat Allah SWT (*Kaffar*). Dzalim disini dimaksudkan bahwa betapa banyak ditemukan dalam realitas empiris, manusia dalam aktivitas distribusi kekayaan cenderung melakukan kecurangan-kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi semata. Sedangkan yang dimaksud ingkar adalah manusia cenderung menafikan nikmat Allah dengan semena-mena mengeksploitasi sumber-sumber alam.

3. Mengingat kepemilikan negara merupakan salah satu bentuk kepemilikan terbesar dalam pemikiran ekonomi Bâqir Sadr, serta adanya landasan keadilan dalam ekonomi Islam serta adanya ruang kosong dalam ekonomi Islam yang harus diisi sesuai perkembangan zaman, maka negara mempunyai peran dan tanggung jawab dalam bidang ekonomi. Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan *pertama*, penyediaan akan terlaksananya Jaminan Sosial dalam masyarakat, *kedua* berkenaan dengan tercapainya keseimbangan social dan *ketiga* terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi.

4. Pemikiran Bâqir Sadr tentang hakikat Ekonomi Islam memberikan suatu kesimpulan bahwa dalam aktifitas ekonomi kita tidak membedakan ilmu ekonomi positif yang bebas nilai dan ilmu ekonomi normatif yang tidak pernah membumi (hayalan atau utopia belaka). Akan tetapi dengan pemikiran Bâqir Sadr tentang hakikat Ekonomi Islam kita bisa mengetahui bahwa dalam aktifitas ekonomi ada prinsip-prinsip pokok yang tidak boleh berubah dan ada teori-teori tentang masalah-masalah praktis yang bersifat kebijakan dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pemikiran Bâqir Sadr tentang awal munculnya persoalan ekonomi merupakan pemikiran yang orisinal dan justru tidak disepakati oleh sebagian besar ekonom muslim lain (para ekonom dari mazhab mainstream seperti MA Manan, Siddiqie dll), akan tetapi pemikiran ini diamini oleh beberapa teori yang berasal dari pemikiran ekonom konvensional (non muslim), seperti teori *Marginal Utility*, *Law of Diminishing Return* dan Hukum Ghosen. Di samping itu, saat ini tidak ada lagi negara yang menerapkan sistem kapitalis dan sosialis dalam bentuk aslinya, sudah ada campur tangan pemerintah di negara kapitalis, begitu juga kepemilikan pribadi mulai diakui di negara komunis, hal ini menunjukkan, bahwa sebagian pemikiran ekonomi Bâqir Sadr, terutama tentang peran dan tanggung jawab pemerintah di bidang ekonomi sudah mulai diterapkan.

## B. Saran

Mengakhiri tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembahasan dalam Tesis ini masih terbatas pada tiga poin pemikiran Bâqir al-Shadr, selain perlu meninjau pemikiran Bâqir al-Shadr dalam hal-hal lain, seperti dalam bidang produksi dan distribusi, juga perlu dilakukan telaah yang amat mendalam untuk melakukan perbandingan pemikiran ekonomi Bâqir al-Shadr dengan pemikiran ekonomi ilmuwan muslim lain untuk mencari alternatif kebijakan ekonomi yang sejalan dengan syari'ah dan cocok dengan konteks keindonesiaan.
2. Pembahasan yang penulis lakukan terhadap tiga poin di atas masih memerlukan pengembangan lebih jauh dan telaah yang lebih mendalam. Dalam poin pertama, yaitu konsep dan makna Iqtishad dalam pandangan Bâqir al-Shadr, perlu telaah lebih mendalam lagi tentang batasan antara doktrin dengan yang bukan doktrin, serta bagaimana metode penggalian (*Istinbath*) dan sumber doktrin yang diakui oleh Bâqir al-Shadr. Pada poin kedua, yaitu munculnya persoalan ekonomi. Dalam pembahasan ini telah dikemukakan jawaban Bâqir al-Shadr terhadap pandangan kaum sosialis dan kapitalis tentang munculnya persoalan ekonomi, akan tetapi pandangan dan penafsiran Bâqir al-Shadr terhadap ayat-ayat dan hadis Nabi yang dikemukakan oleh pendukung mazhab ekonomi Islam mainstream, yang memiliki kesamaan pandangan dengan pandangan pendukung ekonomi konvensional, belum dibahas secara mendalam. Pada poin ketiga, yaitu peran negara di bidang ekonomi, walaupun memiliki pandangan yang

berbeda dengan pandangan kaum sosialis dan kapitalis, akan tetapi pandangannya memiliki beberapa kesamaan dengan pandangan John Maynard Keynes, bahkan tidak itu saja, teori Bâqir al-Shadr yang mengingkari kelangkaan juga pernah disinggung Keynes sebelumnya. Oleh karena itu, eksploitasi lebih mendalam tentang perbandingan pemikiran kedua tokoh ini dan bagaimana pengaruh pemikiran Keynes terhadap pemikiran ekonomi Bâqir al-Shadr akan sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam.

3. Kenyataan bahwa banyak landasan kebijakan ekonomi Indonesia yang sejalan dengan ruh dan semangat ekonomi Islam, maka sudah saatnya para pemegang dan pemangku kebijakan di negara ini, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan tentang ekonomi, memperkaya wawaasan mereka tentang pemikiran ekonomi Islam.
4. Kepada pihak universitas dan pihak-pihak yang *concern* dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hendaknya melengkapi literatur-literatur tentang pemikiran ekonomi, terutama ilmuwan syi'ah dan pemikir kontemporer, sehingga universitas betul-betul menjadi sumber data dan informasi yang dibutuhkan untuk perkembangan pemikiran selanjutnya.
5. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritikan yang konstruktif sangat penulis harapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdullah, Taufik, (ed), *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)

Abû Dâwud al-Sijistâni, *Sunan Abû Dâwud Jilid II*, (Kairo : 'Isa al-Babi al-Halabi, 1952)

Abu Raghif, Al-Sayid `Ammar, *Al-Sayid Muhammad Baqir As-Sadr : Theoritarian in Iqtishad* dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, *Essays on Iqtishad : The Islamic Approach to Economic Problem*, (Silver Spring : Nur, 1989)

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Târikh al-Madzâhib al-Islâmiyyah fî al-Siyâsah wa al-Aqâ'id Jilid I*, ( Beirut : Dâr al-Fikr al-`Arabî, t.th)

Alatas, Syed Farid *Islam and the Science of Economics*, dalam *the Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*, (Victoria : Balckwell Companion, 2006)

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2005)

Anshari, Endang Saifuddin, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1991), cet. Ke-9

Antonio, Muhammad Syafi'i, dan Tim Tazkia, *Ensiklopedi Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager" 2, Bisnis dan Kewirausahaan*, (Jakarta : Tazkia Publishing, 2010)

Asqalâni, al-Hâfizh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-, *Fath al-Bâri Juz 11*, (Beirut : Dâr al-Ma`rifah, t.th)

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta : Kompas, 2010)

Aziz, Abdul, dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selektâ Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung : Alfabeta, 2010), cet. Ke-1

Azra, Azyumardi, dkk, *Ensiklopedi Islam Jilid 6*, (Jakarta : Ientiar Baroe Van Hoeve, 2005)

- Baalbaki, Rohi, *al-Maurid Qâmûs `Arabi-Injilizi*, (Beirut : Dâr al-`Ilm Li al-Malayîn, 1995)
- Bâqî, Muhammad Fu'ad `Abdu al, *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, (Kairo : Dâr al-Hadîts, 1364 H)
- Bergamini, David, *Alam Semesta*, terj. Bambang Hidayat, (Jakarta : Tira Pustaka, 1979)
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Jâmi` al-Shahîh Juz 4*, (Kairo : al-Maktabah al- Salafiyah, t.th)
- Chapra, M Umar, *The Future of Economics, An Islamic Perspective*, (Leicester : The Islamic Foundation, 2000)
- \_\_\_\_\_, *Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, terj. Amidar Amir dkk, (Jakarta : SEBI, 2001)
- \_\_\_\_\_, *Negara Sejahtera Menurut Islam*, dalam John J Donohue dan John L Esposito, *Islam in Transition : Muslim Perspectives*, terj. Machnun Husein, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-malasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), cet. Ke-5
- Dahlawi, Syah Waliyullah al-, *Hujjah Allâh al-Bâlighah Juz I*, (Beirut : Dar al-Jil, 2005)
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), edisi revisi
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1998)
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam Jilid V*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. Ke-3
- Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2003)
- Ghazali, Abu Hamid Al-, *Ihyâ' Ulum al-Dîn Juz I*, (Beirut: Dar an-Nadwah, t.th)
- Haddad, Sayyid Abdullah, *al-Fushûl al-`Ilmiyyah wa al-Ushûl al-Hikmiyyah*, (terj.), (Bandung : Mizan, 1990), cet. Ke-4
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 5*, (Singapura : Pustaka Nasional, 2003), cet. Ke-5

- Haneef, Mohamed Aslam, *Contemporar Muslim Economic Thought : a Comparative Analysis*, terj. Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010)
- Hardiman, Budi, *Filsafat Modern, dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia, 2004
- Haritsi, Jaribah bin Ahmad al-, *al-Fiqh al-Iqtishâdi li Amîr al-Mu'minîn Umar Ibn al-Khaththab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, (Jakarta : Khalifa, 2006)
- Hasan, Nazeh al-, *al-Sayyid Muḥammad Bâqir al-Shadr Dirâsah fî al-Manhaj*, (Beirut : Dâr al-Ta'âruf li al-Mathbû'ât, 1992)
- Hasani, Baqir al-, *The Concept of Iqtishad*, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, *Essays on Iqtishad : The Islamic Approach to Economic Problem*, (Silver Spring : Nur, 1989)
- Heilbroner, Robert L., *Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, (Jakarta : UI Press, 1986)
- Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Ali, *al-Muḥalla* Juz 6 (Beirut: al-Maktab al-Tijâri, t.th)
- Ibnu Katsir, Abul Fida' Ismail, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm Jilid 14*, (tt, Maktabah Aulâd Syaikh Li al-Turats, t.th)
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mâjah Juz 4*, (Beirut : Dâr al-Ma`rifah, 1996), cet. Ke-1
- Ibnu al-Manzhur, *Lisân al-`Arab Jilid 5*, (Kairo : Dâr al-Ma`ârif, t.th)
- Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)
- Keraf, Sonny, *Pasar bebas Keadilan dan Peran Pemerintah, Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta : Kanisius, 1996)
- Maliki, Abdurrahman al-, *al-Siyâsah al-Iqtishâdiyyah al-Mutslâ*, (terj.), (Jakarta : Al-Izzah, 2001)
- Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, (New York : South-Western College Pub, 2003), cet. Ke-19

- Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'* (terj), (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999)
- Mannan, Muhammad Abdul, *Islamic Economics Theory and Practice*, (terj.), (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)
- Maraghi, Ahmad Mushtafa al-, *Tafsîr al-Marâghi Juz 11*, (tt : Mushtafa al-Bâbi al-Halabi, 1946)
- Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000)
- Mawardi, Al-, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, (Beirut : Dâr al-Kutub, 1978)
- Mirakhor, Abbas, *A Note On Islamic Economics*, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, *Essays on Iqtishad : The Islamic Approach to Economic Problem*, (Silver Spring : Nur, 1989)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1998)
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta :Rake Sarasin, 1989)
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Pelebagaan Hisbah di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Fikra Vol. 03 No. 2, (Pekanbaru : Program Pasca Sarjana UIN Suska,)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : UPBIK Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984)
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shaheh* Juz 7, (tt, Dar al-Fikr, t.th)
- Nabhani, Taqiyuddin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Magfur Wahid, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996)
- Nadwi,`Ali Ahmad al-, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah fî al-Mu`âmalat al-Mâliyyah Juz I*, (Riyadh : Syirkah al-Rajih al-Musharrifiyyah, 2000)
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), cet. Ke-2
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Cet. Ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)



- Nawawi, Muhyiddin ibn Syaraf al, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim Juz 7*, (Kairo : al-Mathbaqah al-Mishriyah al-Azhâr, 1929)
- Nuri, Fadil al-, *al-Syâhid al-Shadr Fada'iluhu wa Syamâ'iluh*, (Qum: Mahmuwwd al-Hashimi Office, 1984)
- Putong, Iskandar, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2009), ed. Ke-3
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, (terj.), Jilid II, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Ramadhan, `Athiyah Abdullah Athiyah, *Mausû'ah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Munazhzhamah li al-Mu`âmalât al-Mâliyyah al-Islâmiyyah wa Dauruhâ fî Taujîh al-Nizhâm al-Mu'âshirah*, (Iskandariah : Dâr al-Imân, 2007)
- Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), cet. Ke-7
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2003)
- Rivai Veithzal, dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), cet. Ke-1
- Salim, Abd. Muin, "Metode Dakwah untuk Menanggulangi Lahan Kritis: Sebuah Telaah Qurani", *Laporan Penelitian*, dalam Perumusan Model Dakwah dalam Pelaksanaan Penanggulangan Lahan Kritis di Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang: Kerjasama BAPPEDA Tkt. I Sulawesi Selatan dengan P3M IAIN Alauddin, 1989/1990)
- Samuelson, Paul A, dan William Nordhaus, *Economics*, ( New York : MgRaw-Hill, 1998), cet. Ke-16
- Shadr, Muhammad Baqir As-, *Bah̡ts Haul al-Mahdi*, (Beirut : Dâr al-Ta`âruf li al-Mathbû`ât, 1992)
- \_\_\_\_\_, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (terj.), (Jakarta : Zahrah, 2008)
- \_\_\_\_\_, *Falsafatunâ*, (Beirut : Dar al-Ta`âruf li al-Mathbû`ât, 1989)
- \_\_\_\_\_, *Iqtishâdunâ*, (Beirut : Dâr al-Ta`âruf li al-Mathbû`ât, 1981)

- \_\_\_\_\_, *Keunggulan Ekonomi Islam : Mengkaji Sistem Ekonomi Barat Dalam Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), cet. Ke-11
- Sulaiman, Thahir Abdul Mughsin, *'Ilâj al-Musykilât al-Iqtishâdiyyah bi al-Islâm*, terj. (Bandung : Al-Ma'arif, 1985)
- Syatibi, Abu Ishaq al-, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah Jilid II*, (Kairo: al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubra, t.th)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I, (Jakarta : Lentera Hati, 2000)
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *The History of Islamic Economic Thought*, Dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Reza Awan, *Lecture on Islamic Economics*, (Jeddah : IRTI IDB, 1992)
- Skousen, Mark, *The Making of Modern Economics : The Lives and Ideas of Great Thinkers*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern : Sejarah Pemikiran Sosial*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009)
- Sugono, Dendy, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Suyûthi, Jalâl al-dîn Abd al-Rahmân al-, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir fî Qawâ'id wa Furû' Fiqh Syâfi'î*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Alamiyah, 1983)
- Syahrastani, Abdul Fatah Abdul Karim al-, *al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut : Dar el-Fikr, t.th)
- Taligani, Mahmud, *Ciri-ciri Ekonomi Islam*, dalam John J Donohue dan John L Esposito (ed), *Islam in Transition : Muslim Perspectives*, (terj), (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995)
- Thobroni, Ahmad Yusam, *Fikih Kelautan II Etika Pengelolaan Laut Dalam Perspektif Al-Qur'an*, dalam Jurnal Al-Fikra Vol. 7 No. 2 (Pekanbaru : Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008)
- Turmudzi, Abi Isa Muhammad bin Isa at-, *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Turmudzî Juz 5*, (Kairo : Mustafa Albabi Al-Halabi, 1975), cet. Ke-2
- Zaib Muhammad Syabbam Rusydi, dan Muhammad Adnan Salim, *Mu'jam Mufahras li Ma'âni al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Beirut : Dar el-Fikr, 1995)

Ziman, John, FRS, *An Introduction to Science Studies, the Philosophical and Social Aspects of Science and Technology*, (New York: Cambridge University Press, 1984)

Mubyarto, *Etika, Agama dan Sistem Ekonomi*, Makalah pada Pertemuan III Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, YAE-Bina Swadaya, di Financial Club, Jakarta, 19 Februari 2002

Majalah *Al-Wa'ie*, no. 100 tahun IX

Agustianto, *Dekontruksi Kapitalisme*, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). 07 Februari 2010

\_\_\_\_\_, *The Death Of Economics Dan Chance Ekonomi Syariah*, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com). 07 Februari 2010

Beik, Irfan Syauqi, *Celah Baru Ekonomi Syri'ah*, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), 27 januari 2010.

*Ekonomi Konglomerasi Harus Dihentikan*, [www.Media Indonesia.Com](http://www.Media Indonesia.Com), 08 Oktober 2011

Imaduddin, Muhammad, *Kontribusi Para Ilmuwan Muslim Terhadap Perkembangan Ilmu Ekonomi*, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com)

*Ini Alasan Neoliberalisme Tidak Cocok Untuk Ekonomi RI*, [www.Okezone.com](http://www.Okezone.com). 09 Oktober 2011

Musari, Khairunnisa, *Stiglitz Indonesia dan Ekonomi Syari'ah*, [www.pkesinteraktif.com](http://www.pkesinteraktif.com), 4 October 2010

Oweiss, Ibrahim M, *Ibnu Khaldun Father of Economics*, [www.islamicworld.com](http://www.islamicworld.com). 11 Mei 2008

Stiglitz, Joseph E, *Globalization and Its Discontents*, [www.josephstiglitz.com](http://www.josephstiglitz.com), 10 Januari 2012

TM Aziz, *The Role of Muhammad Baqir Al-Sadr in Shi'a Political Activism in Iraq from 1958 to 1980*, [www.victorynewsmagazine.com](http://www.victorynewsmagazine.com), 07 Februari 2010

*2012 Index of Economic Freedom*, [www.heritage.org](http://www.heritage.org), 15 Januari 2012

[www.IRTI.com](http://www.IRTI.com)